

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 harus adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dilakukan penyesuaian rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa perubahan rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 telah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan surat Nomor B. 159/M.PPN/D.5/PP.03.02/02/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendikbudristek adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kemendikbudristek adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Renstra Kemendikbudristek digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbudristek dalam melakukan:
 - a. penyusunan rencana strategis Unit Eselon I, rencana strategis Unit Eselon II, rencana strategis perguruan tinggi negeri, dan rencana strategis unit pelaksana teknis;
 - b. penyusunan rencana kerja Kemendikbudristek;
 - c. penyusunan rencana kerja anggaran;
 - d. pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
 - e. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - (2) Selain digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Renstra Kemendikbudristek juga digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbudristek pada periode tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran.
- (3) Ketentuan mengenai Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Data dan informasi kinerja Renstra Kemendikbudristek yang termuat dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui aplikasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

5. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 319

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024, dan Visi Indonesia 2045, sebagai berikut:

1. cita-cita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 adalah “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 memiliki visi “...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI”;
3. Dua dari sembilan misi presiden yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
4. sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”; dan

5. salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045 yaitu “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

Kaitannya dengan upaya nasional dalam pembangunan manusia, perhatian khusus perlu diberikan pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan sumber daya manusia tersebut harus melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga memajukannya melalui interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan, sebagaimana Visi Kebudayaan Indonesia 2040, hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, maka Kemendikbudristek harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu, Kemendikbudristek perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen rencana strategis. Dokumen Renstra Kemendikbudristek dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

baik bagi 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya.

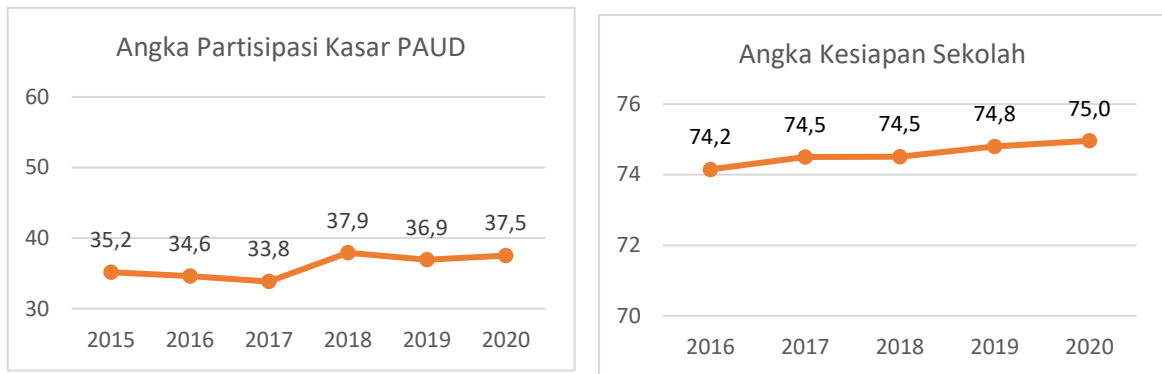
Dokumen Renstra Kemendikbudristek ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan rencana strategis juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Kemendikbudristek dalam menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. *Corona Virus Disease 2019* yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan 60 (enam puluh) juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan rencana strategis ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan – salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Renstra Kemendikbudristek ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini lebih mengkristalkan peran Kemendikbudristek dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden.

B. Kondisi Umum

1. Akses

Gambar 1.1 Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2015-2020 dan Angka Kesiapan Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

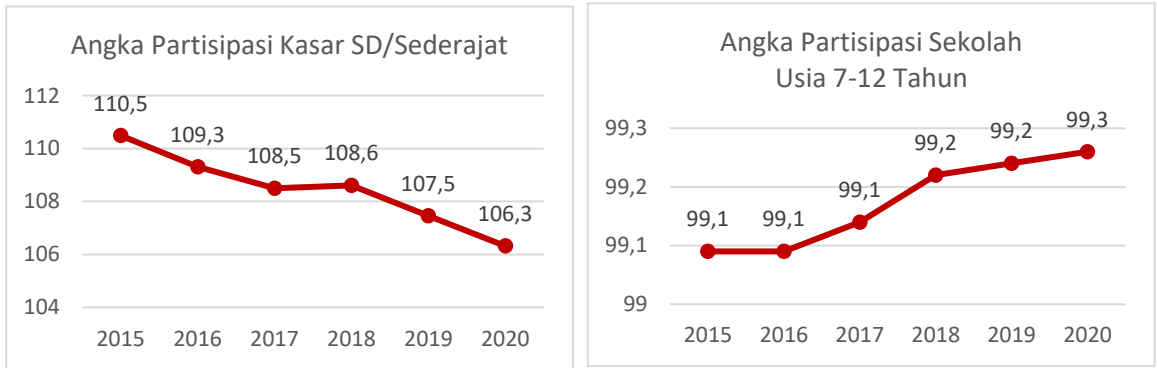
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2020

Secara umum, capaian angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat pada periode tahun 2015-2020, meski sempat terjadi penurunan di tahun 2015-2017, yakni peningkatan anak usia PAUD tidak diiringi dengan penambahan jumlah satuan PAUD. Namun, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD kembali terjadi pada tahun 2018-2020 dari 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) menjadi 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) yang antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah satuan PAUD serta peningkatan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan PAUD melalui dana transfer.

Untuk lebih memastikan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar (SD), kebijakan Kemendikbudristek bidang PAUD fokus pada program pendidikan 1 (satu) tahun prasekolah. Kebijakan ini selaras kebijakan nasional yang tercantum pada RPJMN 2020-2024 dan juga menjadi bagian dari kebijakan global pada *Sustainable Development Goals*, serta merupakan salah satu dari kebijakan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut, Kemendikbudristek menggunakan angka kesiapan sekolah sebagai alat ukur untuk menggambarkan kesiapan anak memasuki jenjang SD. Angka kesiapan sekolah merupakan angka indeks persentase proporsi anak kelas 1 (satu) SD pada tahun berjalan yang sudah pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Gambar 1.1 juga menunjukkan tren peningkatan angka kesiapan sekolah dalam kurun waktu tahun 2016-2020.

Tren positif angka kesiapan sekolah menunjukkan kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Mengingat lembaga PAUD yang ada masih didominasi oleh satuan pendidikan berbasis masyarakat, Kemendikbudristek terus mendorong kebijakan pertumbuhan lembaga PAUD tersebut, yang fokus untuk mempersiapkan anak masuk SD. Selain itu, kebijakan tersebut juga difokuskan pada daerah-daerah dengan angka kesiapan sekolah yang masih rendah untuk mendukung percepatan pencapaian 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD.

Gambar 1.2 Capaian Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/ sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

Berbeda dengan angka partisipasi kasar PAUD, angka partisipasi kasar SD dari tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan angka partisipasi kasar ini adalah berkurangnya siswa baru kelas 1 (satu) SD yang berusia di bawah 7 (tujuh) tahun akibat berkembangnya layanan PAUD. Oleh karena itu, penggunaan angka partisipasi kasar sebagai indikator keberhasilan akses untuk SD perlu dipertimbangkan kembali. Alternatif indikator akses SD adalah angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun. Setelah melihat capaian angka partisipasi sekolah pada tahun 2020 telah mencapai 99,3% (sembilan puluh sembilan koma tiga persen), dapat disimpulkan bahwa hampir semua anak usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun telah mengenyam pendidikan atau berada di bangku sekolah.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan angka partisipasi sekolah agar mendekati 100% (seratus persen), perlu diperkuat dukungan terhadap pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti anak

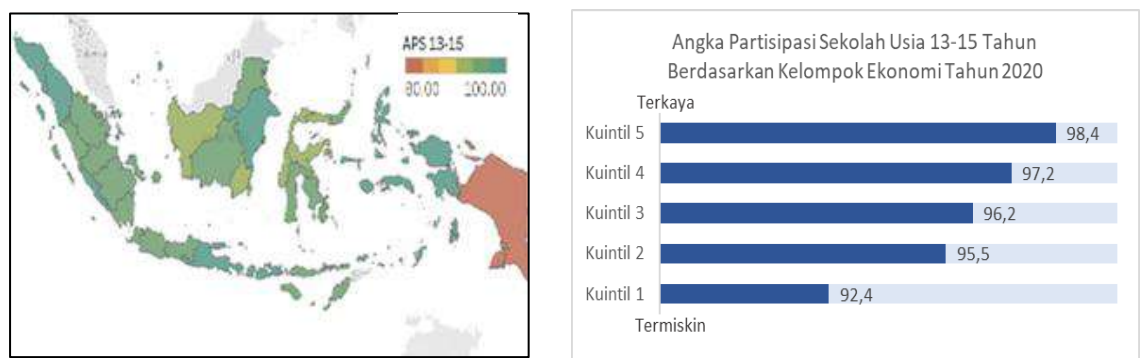
rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan pertimbangan sebaran angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun per provinsi, perhatian khusus perlu diberikan kepada Provinsi Papua yang capaian angka partisipasi sekolah-nya sebesar 82,99% (delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen). Strategi khusus perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun di Provinsi Papua mendekati rata-rata nasional.

Gambar 1.3 Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun per Provinsi Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.4 Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun per Provinsi dan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

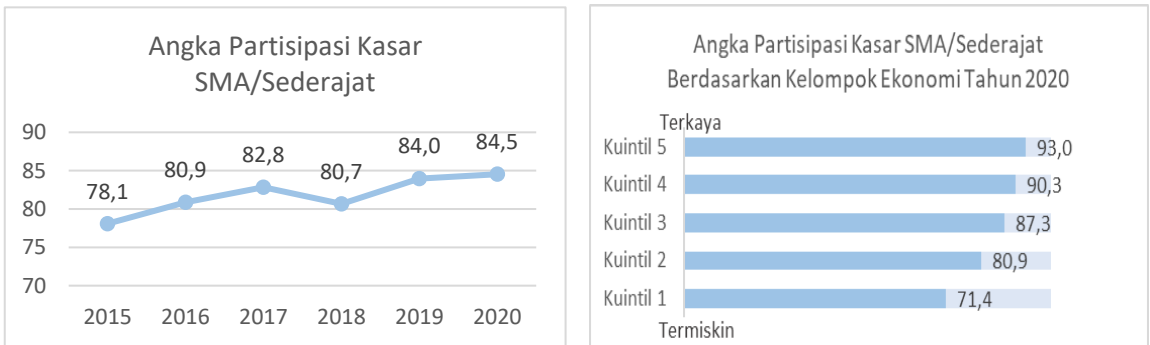
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Sama halnya dengan angka partisipasi kasar SD, pola penurunan juga terjadi pada angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama (SMP), sehingga pengukuran ketercapaian akses pada jenjang SMP/ sederajat akan lebih akurat apabila menggunakan angka partisipasi sekolah usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun. Pada periode tahun 2015 - 2020, angka partisipasi sekolah usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun mengalami peningkatan dari 94,72% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen) menjadi 95,74% (sembilan puluh lima koma tujuh

puluh empat persen). Capaian angka partisipasi sekolah tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar anak usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun telah mengenyam pendidikan. Namun, karena masih terdapat 4,26% (empat koma dua puluh enam persen) anak usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun yang belum mengenyam pendidikan perlu dipertimbangkan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan pada jenjang usia tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya disparitas antarkondisi kelompok ekonomi, khususnya penduduk pada kuintil termiskin yang masih berada di angka 92,4% (sembilan puluh dua koma empat persen).

Selain dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin, dukungan terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti: anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum, juga perlu diperkuat.

Gambar 1.5 Capaian Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/ sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/ sederajat Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

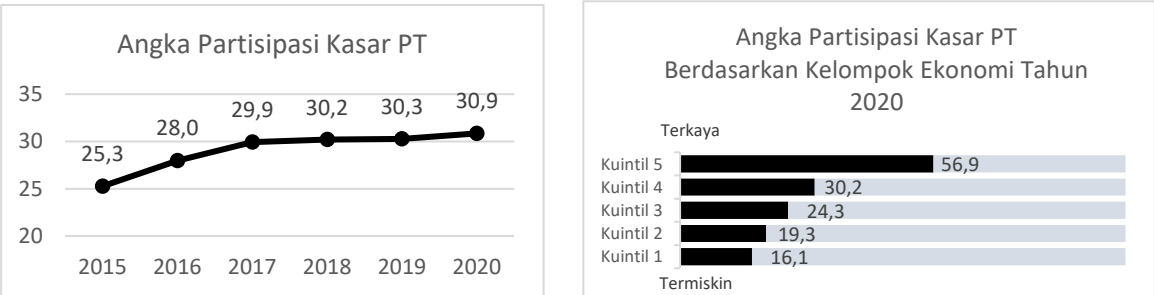
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA)/sederajat masih jauh dari nilai ketuntasan. Oleh karena itu, penggunaan angka partisipasi kasar untuk mengukur akses pendidikan menengah masih relevan. Meskipun terjadi peningkatan angka partisipasi kasar pada periode tahun 2015-2020, capaian pada tahun 2020 masih sebesar 84,5% (delapan puluh empat koma lima persen). Terlebih jika melihat kesenjangan pada kelompok ekonomi, terdapat selisih 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) antara kelompok ekonomi termiskin dan terkaya. Data ini menunjukkan bahwa masih ada 1 (satu) dari 4 (empat)

anak kelompok ekonomi termiskin yang belum mendapatkan layanan pendidikan menengah.

Kemendikbudristek perlu memprioritaskan dukungan pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau atau terbatas layanannya. Layanan SMA/sekolah menengah kejuruan (SMK) 1 (satu) atap dapat dipertimbangkan untuk melayani daerah dengan jumlah anak usia pendidikan menengah yang terbatas. Penetapan target Kartu Indonesia Pintar yang lebih baik juga menjadi salah satu fokus guna memastikan anak-anak dari kelompok ekonomi termiskin dapat tetap bersekolah.

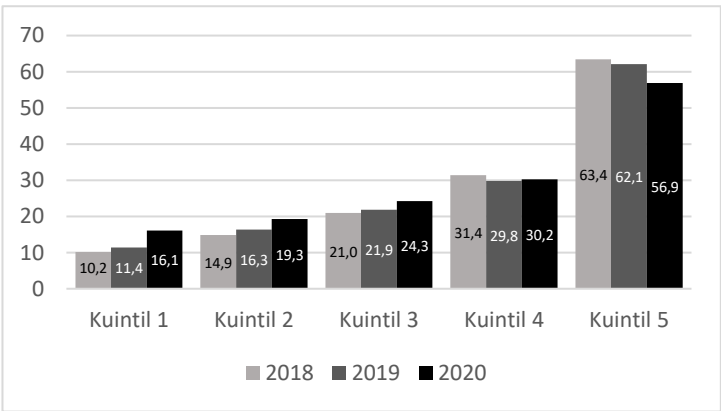
Gambar 1.6 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.7 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2018-2020 Berdasarkan Kelompok Ekonomi

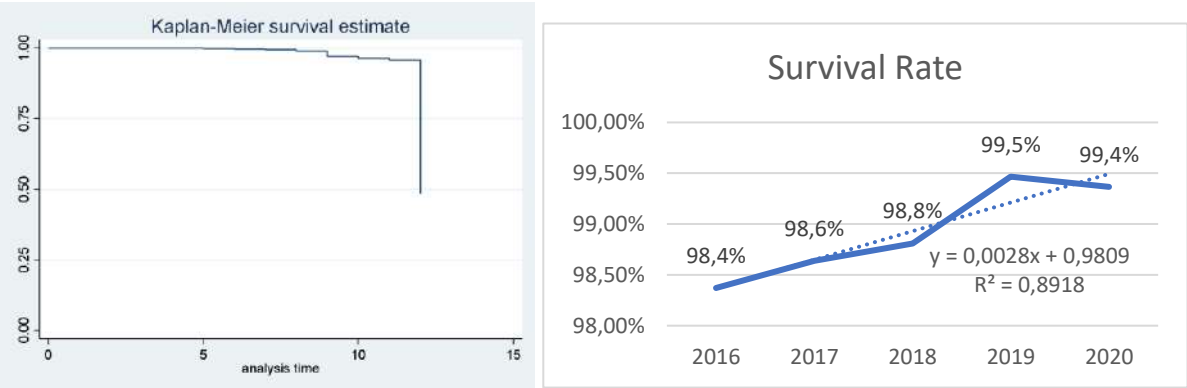


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020

Indonesia juga masih menghadapi tantangan disparitas akses layanan pendidikan tinggi yang dapat diukur melalui angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang jauh dari ketuntasan. Pada tahun 2020, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional sebesar 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen) atau hanya 1 (satu) dari 3 (tiga) anak yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Bila dilihat dari latar belakang ekonomi,

kesenjangan masih sangat lebar. Dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ekonomi termiskin sebesar 16,1% (enam belas koma satu persen), berarti hanya 1 (satu) dari 6 (enam) anak Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Padahal angka partisipasi kasar SMA/SMK/ sederajat dari kelompok kemiskinan yang sama, sudah mencapai 71,4% (tujuh puluh satu koma empat persen) atau di atas 4 (empat) dari 6 (enam) anak Indonesia yang bersekolah di SMA/SMK/ sederajat.

Gambar 1.8 Survival Rate Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik, 2016-2020

Berdasarkan analisis keberlangsungan (*survival analysis*), sebagaimana terlihat pada Gambar 1.8, hampir semua anak Indonesia tetap berada di sekolah hingga lulus jenjang SMA/SMK/ sederajat; namun lebih dari 45% (empat puluh lima persen) anak tersebut tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun demikian, selama 5 (lima) tahun terakhir, tingkat keberlangsungan anak Indonesia dalam sistem pendidikan menunjukkan tren yang positif.

Kendala ekonomi menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, pada periode tahun 2018-2020 terdapat peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang cukup signifikan pada kelompok ekonomi termiskin, termasuk pada kuintil 2 (dua) dan 3 (tiga), meskipun peningkatannya tidak setajam kuintil 1 (satu). Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah menjadi salah satu program yang mendorong terjadinya peningkatan tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa minat siswa lulusan pendidikan menengah dari kelompok ekonomi termiskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi cukup kuat.

Adapun pada kelompok ekonomi kaya (kuintil 4 (empat) dan 5 (lima)) terjadi penurunan angka partisipasi kasar, salah satunya dapat disebabkan karena penyelesaian pendidikan yang lebih cepat. Dengan mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, Kemendikbudristek perlu memperluas ketersediaan layanan pendidikan tinggi berkualitas.

2. Isu Partisipasi Pendidikan Lintas Sektor

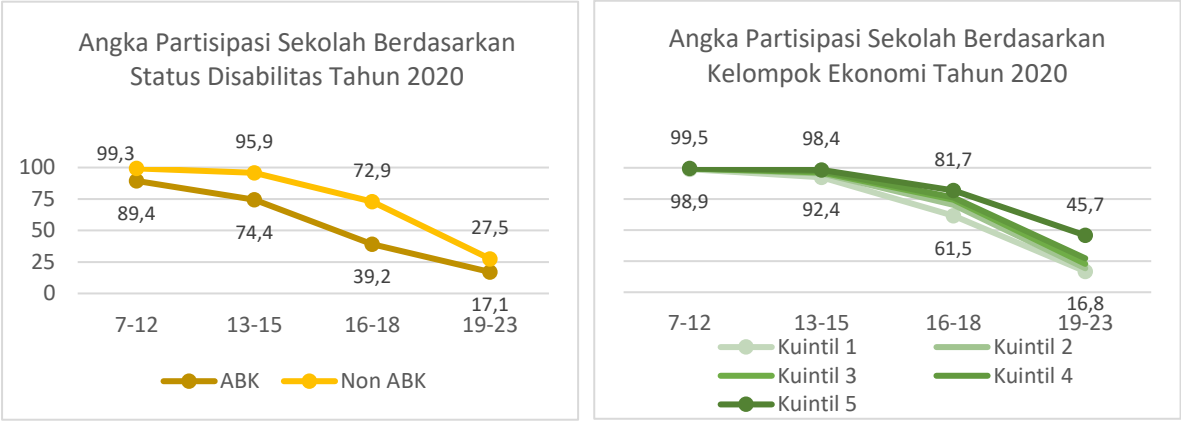
Selain berdasarkan kelompok ekonomi, angka partisipasi pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor gender dan disabilitas. Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan gender menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki probabilitas sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, meskipun perbedaan antara keduanya tidak pernah melebihi 2% (dua persen). Perbedaan ini jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antarkelompok ekonomi dan perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan kelompok ekonomi, capaian angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun menunjukkan perbedaan tipis, hanya terpaut 0,6% (nol koma enam persen), tetapi semakin melebar menjadi 28,9% (dua puluh delapan koma sembilan persen) pada usia 19 (sembilan belas) - 23 (dua puluh tiga) tahun. Sementara itu, selisih capaian angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun antara anak berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus sudah mendekati 10% (sepuluh persen), dan 33,7% (tiga puluh tiga koma tujuh persen) pada angka partisipasi sekolah 15 (lima belas) – 18 (delapan belas) tahun. Selisih tersebut kembali mengecil pada jenjang usia 19 (sembilan belas) - 23 (dua puluh tiga) tahun yaitu sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen). Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus bila mencapai jenjang SMA/ sederajat lebih besar probabilitasnya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Mempertimbangkan capaian isu lintas sektor ini, Kemendikbudristek memerlukan 2 (dua) program afirmasi untuk menyasar kelompok ekonomi termiskin dan juga anak berkebutuhan khusus. Program afirmasi bagi kelompok ekonomi termiskin dapat berupa dukungan

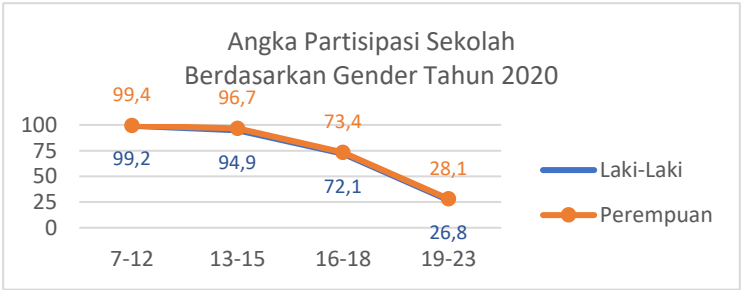
pembiayaan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar sekolah/kuliah, afirmasi pendidikan menengah (Adem) dan afirmasi pendidikan tinggi (ADik). Sementara itu program afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus dapat berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa.

Gambar 1.9 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Disabilitas, Kelompok Ekonomi, dan Gender Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

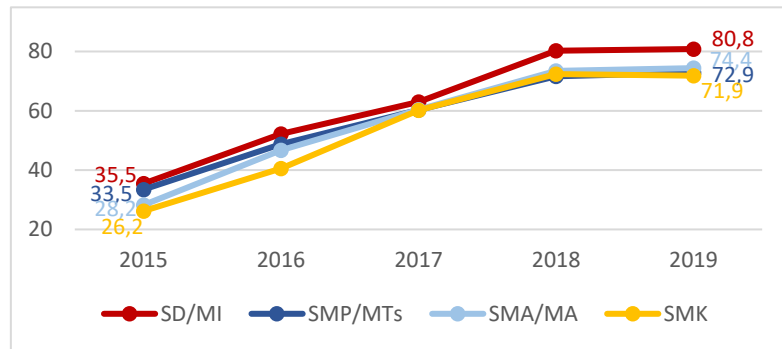


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3. Mutu

Dalam rangka mengukur capaian mutu pada periode tahun 2015-2019, Kemendikbudristek menggunakan 4 (empat) alat ukur yaitu akreditasi, ujian nasional tahun 2015-2019, nilai Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SD tahun 2016 dan SMP tahun 2019, serta nilai hasil uji *Programme for International Student Assessment*.

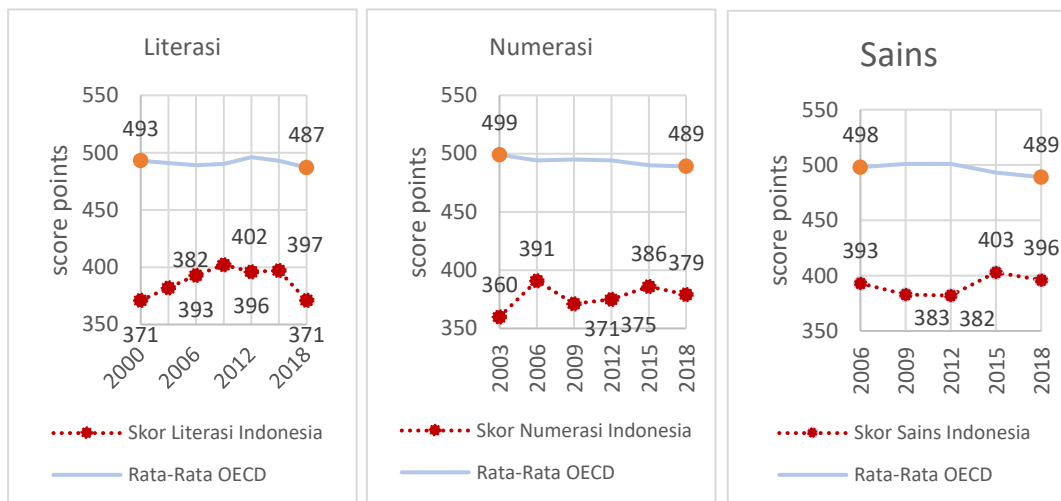
Gambar 1.10 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Tahun 2015-2019



Sumber: BAN-S/M, 2015-2019

Akreditasi mengukur bagaimana satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selama periode tahun 2015-2019, jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B di seluruh jenjang meningkat rata-rata 44,2% (empat puluh empat koma dua persen). Jenjang SD/MI merupakan jenjang dengan akreditasi minimal B terbanyak. Namun, apabila memperhatikan peningkatan akreditasi minimal B pada jenjang pendidikan menengah, jenjang SMK merupakan yang terendah dan jenjang SMA/MA mengalami peningkatan tertinggi.

Gambar 1.11 Capaian Skor *Programme for International Student Assessment* Indonesia Tahun 2000-2018



Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019

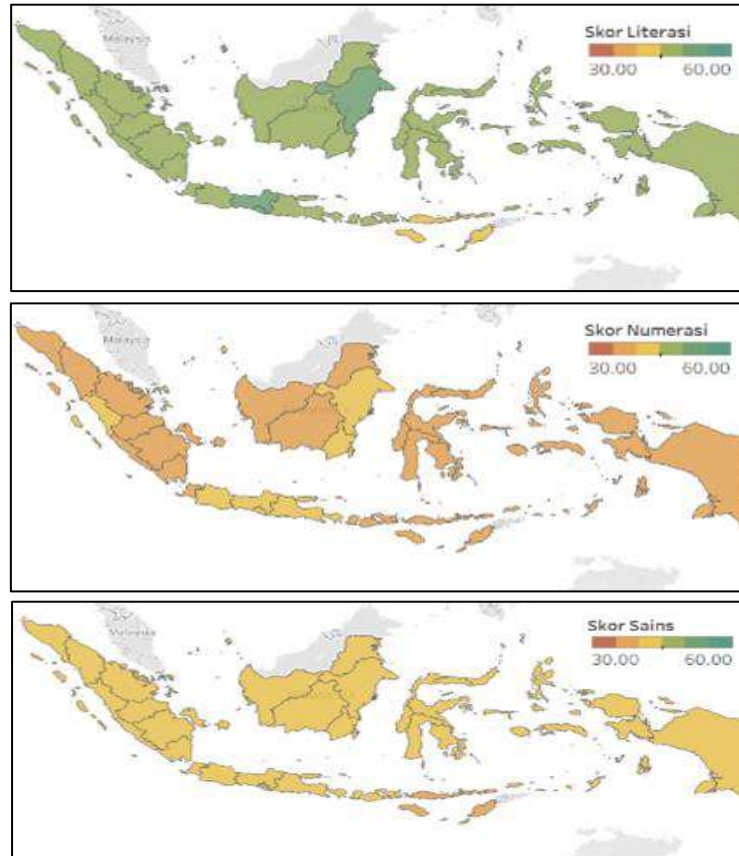
Uji *Programme for International Student Assessment* adalah instrumen asesmen capaian pendidikan yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* untuk mengukur capaian belajar siswa usia 15 (lima belas) tahun di bidang literasi, numerasi, dan sains. Melihat perkembangan uji *Programme for International Student Assessment* dari tahun 2000-2018, capaian nilai *Programme for*

International Student Assessment Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development*.

Meskipun capaian skor literasi *Programme for International Student Assessment* Indonesia telah mengalami peningkatan sejak tahun 2000 dari 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) menjadi 402 (empat ratus dua) pada tahun 2009, di tahun 2018 skor literasi *Programme for International Student Assessment* Indonesia kembali turun menjadi 371 (tiga ratus tujuh puluh satu). Skor numerasi *Programme for International Student Assessment* Indonesia juga menunjukkan pola yang sama, pada tahun 2003-2006 meningkat dan kembali turun (menjadi 371 (tiga ratus tujuh puluh satu)) pada tahun 2009. Skor numerasi *Programme for International Student Assessment* Indonesia masih cenderung positif. Sementara itu, skor sains *Programme for International Student Assessment* Indonesia yang sempat menurun pada tahun 2009 dan 2012 memiliki tren yang relatif positif. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, capaian belajar siswa belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, *Organisation for Economic Co-operation and Development* menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tren skor *Programme for International Student Assessment* yang positif.

Untuk melihat capaian hasil belajar siswa antar wilayah di Indonesia, Kemendikbudristek menggunakan nilai Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Dengan memperhatikan skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SMP tahun 2019 per provinsi pada grafik spasial skor literasi, numerasi, dan sains, terlihat adanya disparitas capaian antarwilayah. Beberapa daerah seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain.

Gambar 1.12 Sebaran Capaian Skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia Sekolah Menengah Pertama per Provinsi Tahun 2019



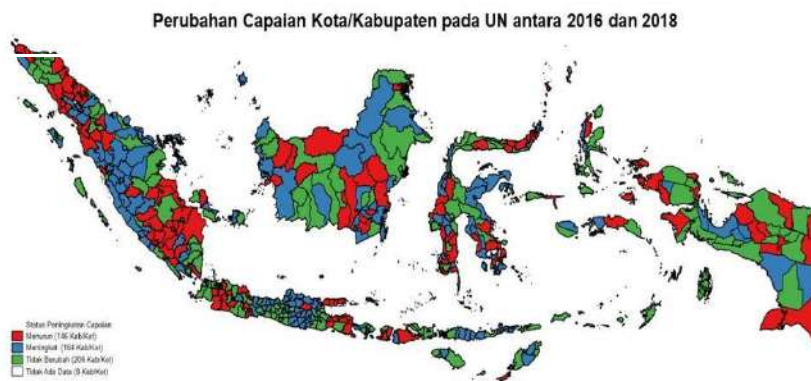
Sumber: Puspendik, 2019

Sementara itu, daerah seperti Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan capaian rendah untuk ketiga mata uji Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SMP tahun 2019.

Capaian skor *Programme for International Student Assessment* dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia yang belum signifikan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah desain kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan belum secara khusus menekankan pada pengembangan kompetensi dasar yaitu literasi, numerasi, dan sains. Sebagai contoh, mekanisme kurikulum di SD yang menggunakan pendekatan tematik kurang menyediakan ruang yang memadai bagi guru untuk pengembangan kompetensi literasi, terutama di kelas awal. Contoh lainnya adalah pada mata pelajaran matematika yang lebih menekankan penguasaan rumus-rumus, formula, dan teori matematika daripada penggunaan numerasi di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penyempurnaan strategi penilaian hasil belajar yang lebih berfokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, dan sains akan mendorong satuan pendidikan agar lebih fokus pada peningkatan kompetensi dasar dan kualitas satuan pendidikan, termasuk sistem pendidikan di daerah, agar dapat diukur dengan kebijakan asesmen atau penilaian yang tepat.

Gambar 1.13 Perubahan Capaian Kota/Kabupaten pada Ujian Nasional antara Tahun 2016 dan 2018



Sumber: SMERU, 2021

Gambar 1.13 merepresentasikan grafik spasial sebaran perubahan nilai Ujian Nasional antara tahun 2016 dan 2018 yang menunjukkan bahwa 40% (empat puluh persen) kabupaten/kota tidak mengalami perubahan nilai Ujian Nasional yang signifikan. Peningkatan hasil Ujian Nasional terjadi pada 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten/kota dan penurunan terjadi pada 146 (seratus empat puluh enam) kabupaten/kota.

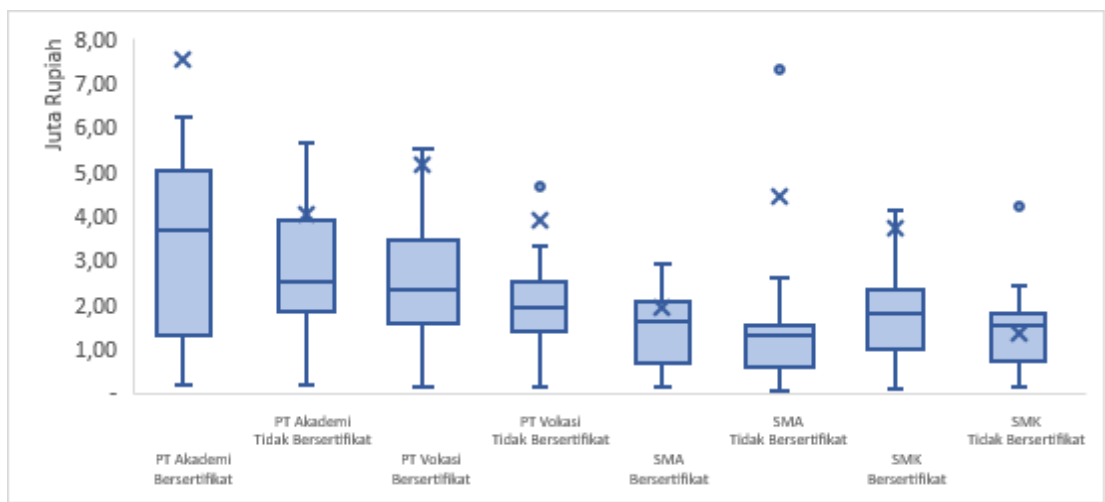
Beberapa daerah menunjukkan peningkatan hasil Ujian Nasional yang tidak selaras dengan peningkatan jumlah satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut, diantaranya, adalah sebaran satuan pendidikan yang mengalami peningkatan akreditasi yang belum merata antarwilayah, peningkatan hasil Ujian Nasional yang disebabkan oleh faktor di luar satuan pendidikan atau akreditasi yang belum dapat mengukur dengan baik faktor-faktor kunci yang berdampak pada capaian pembelajaran.

Bila melihat kembali peningkatan yang terjadi pada 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa peningkatan

terjadi cukup merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan sebaran paling banyak di pulau Kalimantan (37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)). Berdasarkan capaian tersebut, peningkatan hasil belajar siswa bukan hanya terjadi di pulau Jawa, melainkan juga merata di seluruh wilayah di Indonesia, walau dengan derajat peningkatan yang berbeda-beda.

Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi untuk menemukan praktik-praktik dari pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan untuk kemudian dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan konteks dan kebutuhan tiap-tiap daerah.

Gambar 1.14 Pendapatan Lulusan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

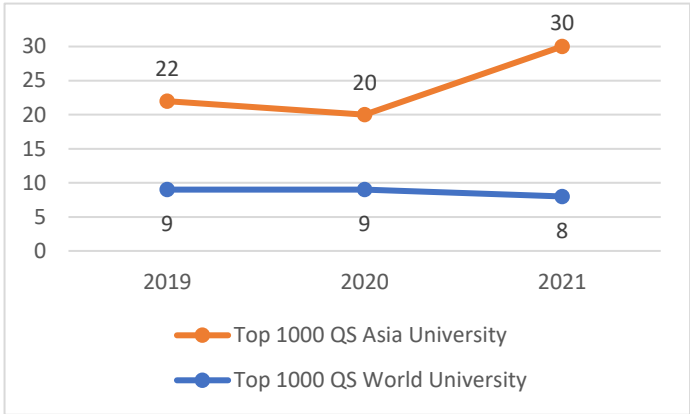
Data mengenai pendapatan lulusan berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan SMK yang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan tinggi vokasi.

Berkaitan dengan mutu lembaga perguruan tinggi, pemeringkatan perguruan tinggi di tingkat internasional menjadi salah satu tolok ukur. Merujuk pada *QS World University* yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan *academic reputation*, *employer reputation*, *faculty/student ratio*, *citations per faculty*, *international faculty ratio*, dan

international student ratio, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung konsisten berada di 3 (tiga) besar peringkat *Top University* asal Indonesia. Sementara itu di luar 500 (lima ratus) besar, beberapa universitas seperti Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor menunjukkan peningkatan peringkat yang cukup signifikan.

Berdasarkan *Top 1000 QS World Rank* perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan karena salah satu universitas negeri tidak lagi masuk dalam kategori ini. Bila pemeringkatan ini difokuskan pada negara-negara di Asia, pada tahun 2019 terdapat 22 (dua puluh dua) perguruan tinggi yang masuk dalam *Top 1000 QS Asia University* dan pada tahun 2021 jumlah ini meningkat secara signifikan menjadi 30 (tiga puluh) perguruan tinggi.

Gambar 1.15 Jumlah Perguruan Tinggi Indonesia dalam *Top University Rankings* Tahun 2019-2021



Sumber: QS TOPUNIVERSITIES, 2019-2021

Tabel 1.1 Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia dalam *QS World University* Tahun 2019-2021

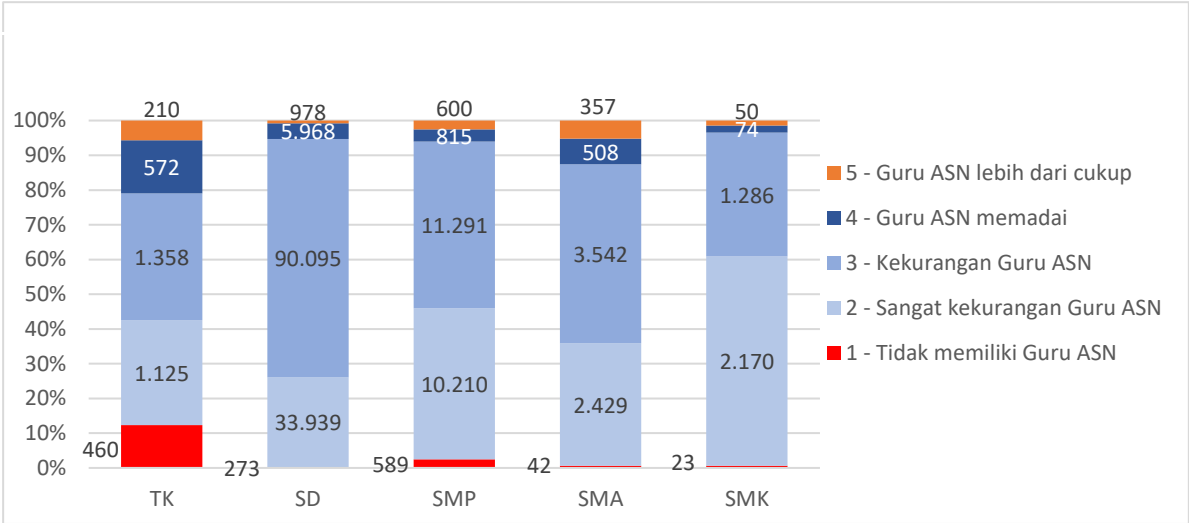
Institusi	2019	2020	2021
UGM	391	320	254
UI	292	296	305
ITB	359	331	313
Unair	751-800	651-700	521-530
IPB	701-750	601-650	531-540

Sumber: QS TOPUNIVERSITIES, 2019-2021

Atas dasar itu, Kemendikbudristek lebih aktif mendorong perguruan-perguruan tinggi untuk menaikkan peringkatnya dengan mendokumentasikan kiprah perguruan tinggi yang sudah progresif mencapai peningkatannya untuk kemudian didiseminasikan kepada perguruan tinggi yang lain.

4. Kondisi Pendidik

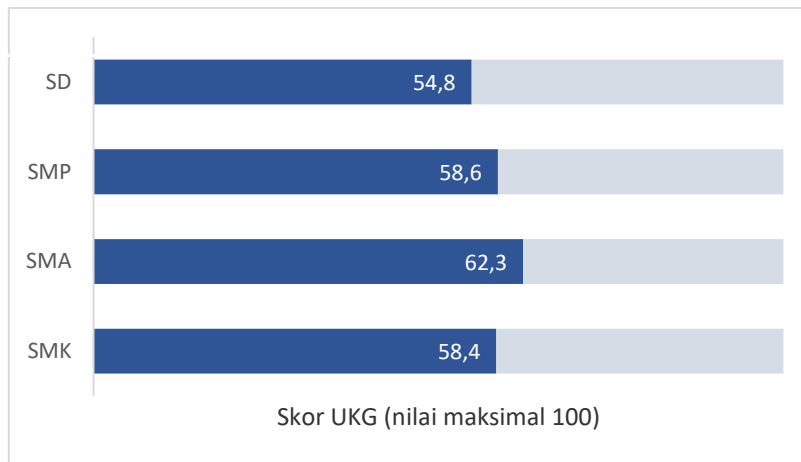
Gambar 1.16 Ketersediaan Guru Aparatur Sipil Negara di Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2019



Sumber: Dapodik GTK, 2019

Data ketersediaan guru aparatur sipil negara di satuan pendidikan negeri menunjukkan bahwa kurang dari 5% (lima persen) satuan pendidikan memiliki guru aparatur sipil negara yang memadai. Mayoritas sekolah masih membutuhkan guru aparatur sipil negara, bahkan terdapat sekitar 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) satuan pendidikan negeri yang tidak memiliki guru aparatur sipil negara sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah pembatasan perekrutan guru aparatur sipil negara dari tahun 2014-2018. Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi yang lebih baik agar daerah dapat melakukan perekrutan guru aparatur sipil negara untuk ditugaskan di satuan pendidikan negeri. Namun, perlu dipertimbangkan juga upaya redistribusi guru karena masih terdapat sekitar 2.195 (dua ribu seratus sembilan puluh lima) satuan pendidikan yang memiliki guru aparatur sipil negara lebih dari kebutuhannya.

Gambar 1.17 Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2019

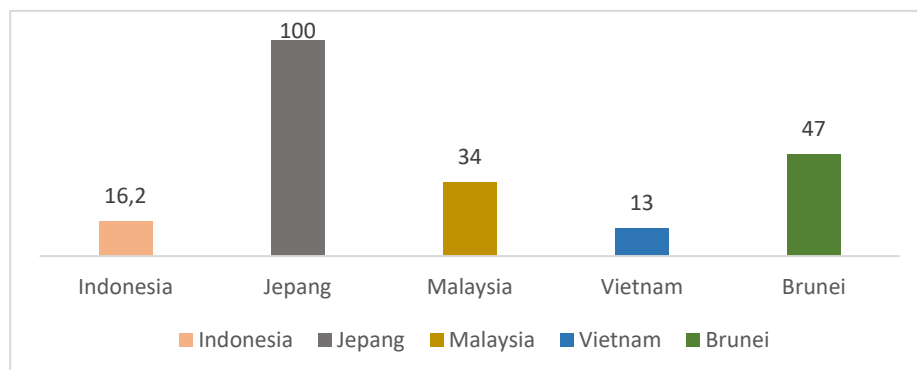


Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019

Selanjutnya dari sisi kualitas guru, hasil skor Uji Kompetensi Guru yang mengukur pencapaian guru terhadap standar kompetensi yang terdiri atas kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian menunjukkan bahwa capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2015. Meskipun demikian, rata-rata capaian ini belum mencapai nilai 60 (enam puluh) dari nilai maksimal 100 (seratus). Capaian skor tertinggi (mencapai skor 62,3 (enam puluh dua koma tiga)) ada pada guru dijenjang SMA, sedangkan capaian skor terendah (54,8 (lima puluh empat koma delapan)) ada pada guru di jenjang SD.

Atas dasar itu, Kemendikbudristek berupaya memperkuat mekanisme pelatihan guru dalam jabatan dan seleksi perekrutan guru agar mutu guru dapat meningkat secara signifikan. Apabila diperlukan, penajaman standar kompetensi guru dapat dipertimbangkan untuk mengarahkan guru dalam mengembangkan kompetensinya.

Gambar 1.18 Proporsi Dosen Berkualifikasi Akademik S3 di Indonesia dan Negara Asia Tahun 2019

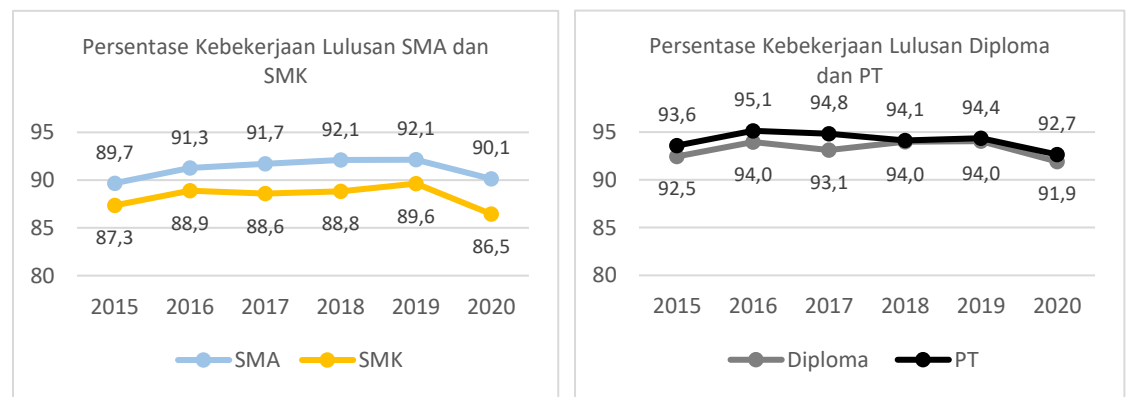


Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019

Kualitas dosen di perguruan tinggi dapat dilihat melalui proporsi dosen yang memiliki kualifikasi akademik S-3. Berdasarkan Gambar 1.18, proporsi dosen yang memenuhi kualifikasi akademik S-3 relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia hanya sedikit lebih tinggi di atas Vietnam. Adapun negara maju, seperti Jepang, memiliki persentase dosen dengan kualifikasi akademik S-3 mencapai 100% (seratus persen). Apabila dibandingkan dengan target nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen), upaya-upaya yang signifikan perlu dilakukan untuk mendorong ketercapaian target nasional tersebut.

5. Kebekerjaan Lulusan

Gambar 1.19 Persentase Kebekerjaan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020



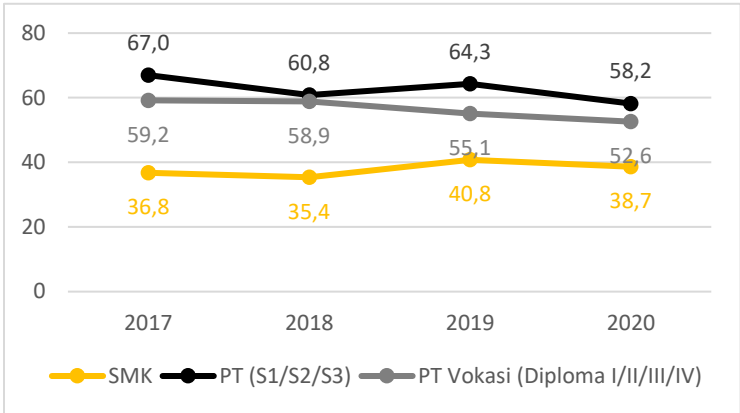
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam menganalisis keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat kebekerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan, jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang lebih baik daripada jalur pendidikan tinggi vokasi.

Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspeksif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari

satuan pendidikan. Berdasarkan Gambar 1.19, terdapat pola yang sama dari perspektif sebelumnya. Tren penurunan keterserapan terjadi pada lulusan pendidikan tinggi sedangkan tren peningkatan keterserapan terjadi pada lulusan SMK.

Gambar 1.20 Persentase Penduduk yang Bekerja Satu Tahun Setelah Kelulusan Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2020

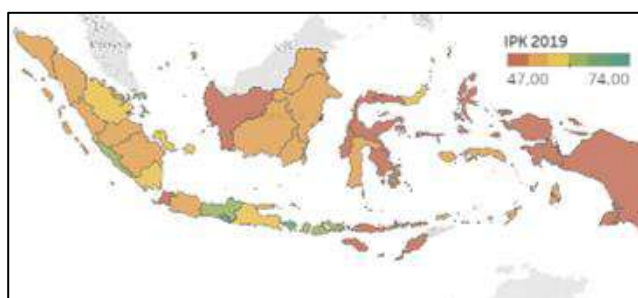
Terkait dengan adanya perbedaan keterserapan lulusan pendidikan tinggi antara jalur vokasi dan akademis, Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi khusus dalam mendorong mutu pendidikan vokasi melalui strategi penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau melalui strategi lainnya yang relevan.

Isu lain yang terkait kebhkerjaan lulusan pendidikan SMK adalah adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki tingkat kebhkerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad 21 (seperti *critical thinking*, *creativity*, *communication*, dan *collaboration*). Hal ini sejalan dengan proyeksi dari studi *World Economic Forum* tahun 2020 terkait pergeseran kebutuhan kecakapan di pasar kerja masa depan.

6. Bahasa dan Kebudayaan

Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbudristek menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas, ketahanan budaya, dan bahasa bangsa. Sepanjang periode tahun 2015-2019, Kemendikbudristek telah menjalankan program-program dalam memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional.

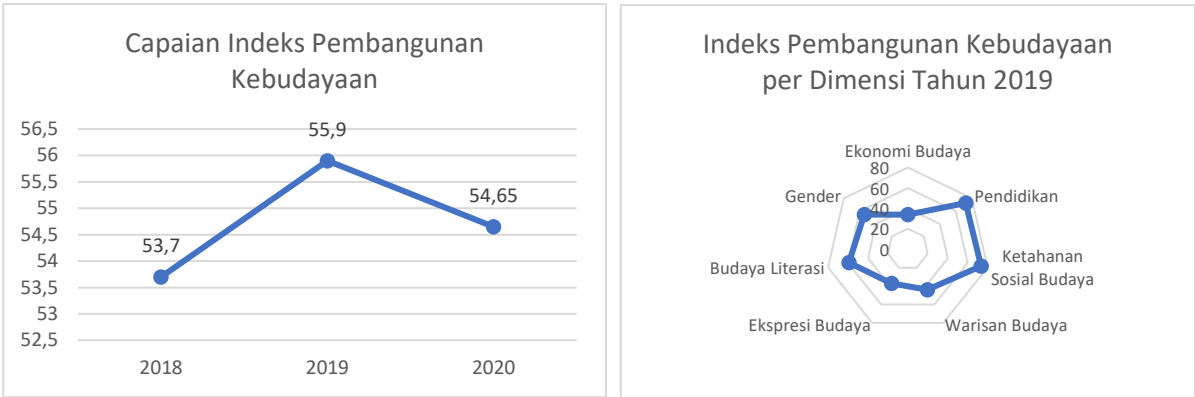
Gambar 1.21 Sebaran Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi Tahun 2019



Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2019

Secara nasional, Indeks Pembangunan Kebudayaan mengalami kenaikan dari 53,75 (lima puluh tiga koma tujuh puluh lima) pada tahun 2018 menjadi 55,91 (lima puluh lima koma sembilan puluh satu) pada tahun 2019 dengan variasi kenaikan antar dimensi. Peningkatan yang cukup besar pada dimensi Budaya Literasi, Ekonomi Budaya, Pendidikan dan Warisan Budaya. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekspresi Budaya meningkat sedikit. Sementara itu dimensi gender mengalami penurunan pada periode tahun 2018-2019. Dimensi Ekonomi menunjukkan capaian terendah dibandingkan dimensi lainnya, tetapi peningkatan yang dialami cukup signifikan yaitu sebesar 3,24* (tiga koma dua puluh empat). Namun Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) poin menjadi 54,65 (lima puluh empat koma enam puluh lima), yang salah satunya disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

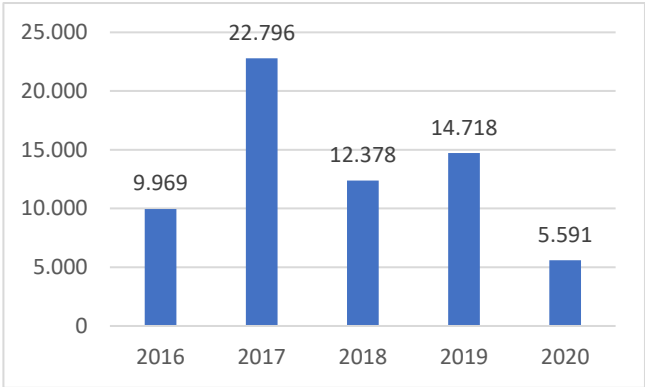
Gambar 1.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2020 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Tahun 2019



Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2018-2020

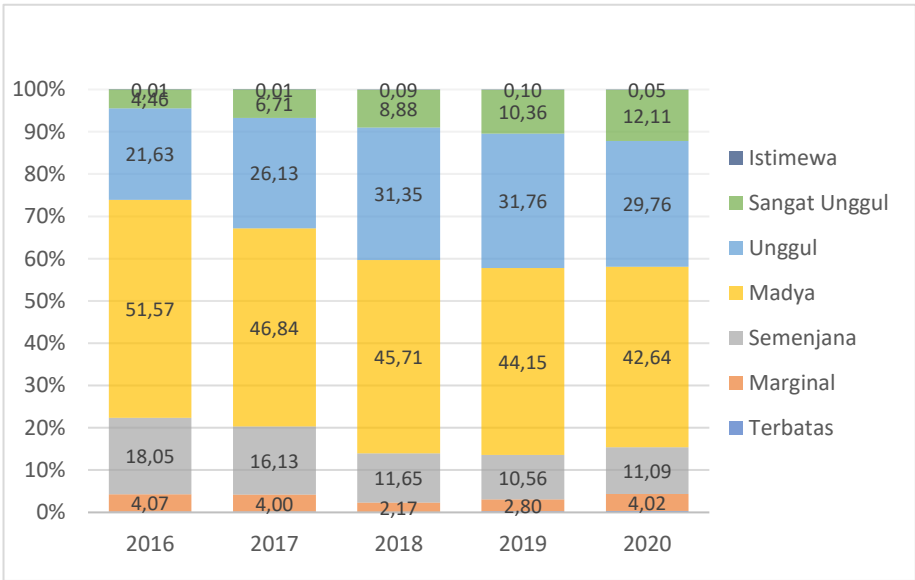
Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2020

Gambar 1.23 Jumlah Peserta Ujian UKBI Tahun 2016-2020



Sumber: Pangkalan Data UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016-2020

Gambar 1.24 Persentase Tingkatan Predikat pada Hasil Ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Tahun 2016-2020



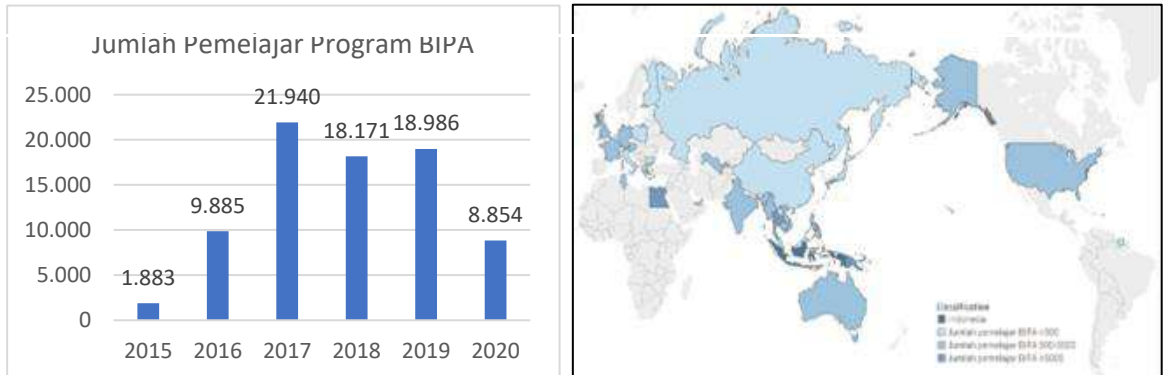
Sumber: Pangkalan Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016-2020

Berkaitan dengan kebahasaan, dapat disimpulkan jumlah peserta ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia pada periode tahun 2016-2020

relatif meningkat, dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 22.796 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) orang. Sementara itu, pada tahun 2020 peserta ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia hanya mencapai 5.591 (lima ribu lima ratus sembilan puluh satu) orang. Penurunan itu terjadi karena adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang menghambat keperluan personal, sosial, keprofesian, maupun keilmiahan untuk mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Di samping itu, pada tahun 2020 dilakukan pengembangan sistem Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang fundamental (menjadi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adaptif). Dengan sistem baru itu diharapkan pada tahun-tahun mendatang terjadi lompatan jumlah peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Secara umum, mayoritas peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2016-2020 memperoleh predikat madya. Namun banyak juga yang mendapat predikat unggul dan sangat unggul. Pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) orang yang berhasil mendapatkan predikat istimewa. Capaian ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa, adanya beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, (seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) menjadi faktor pendorong Kemendikbudristek dalam mengintensifkan program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat secara umum dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama di ranah publik.

Gambar 1.25 Jumlah Pemelajar Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tahun 2015-2020 dan Sebaran Pemelajar Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Dunia Tahun 2020



Sumber : Laporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2015-2020

Peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia tidak hanya menargetkan penutur jati bahasa Indonesia, tetapi juga penutur asing. Selaras dengan upaya meningkatkan fungsi dan peran bahasa Indonesia di kancah internasional, upaya pembelajaran bahasa Indonesia melalui pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dikembangkan dengan berbagai bentuk fasilitasi teknis, seperti penyediaan bahan ajar dan pengajar, peningkatan kompetensi pengajar, serta penyelenggaraan apresiasi dan kompetisi bagi pengajar dan pemelajar. Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang difasilitasi pembelajarannya oleh Kemendikbudristek pada periode tahun 2015-2020 mencapai 79.719 (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) orang penutur asing yang belajar di 206 (dua ratus enam) lembaga penyelenggara program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di 30 (tiga puluh) negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Afrika, dan Amerika. Dengan berbagai bentuk fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Kemendikbudristek mendorong Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia untuk mengembangkan diplomasi bahasa dan budaya secara terpadu.

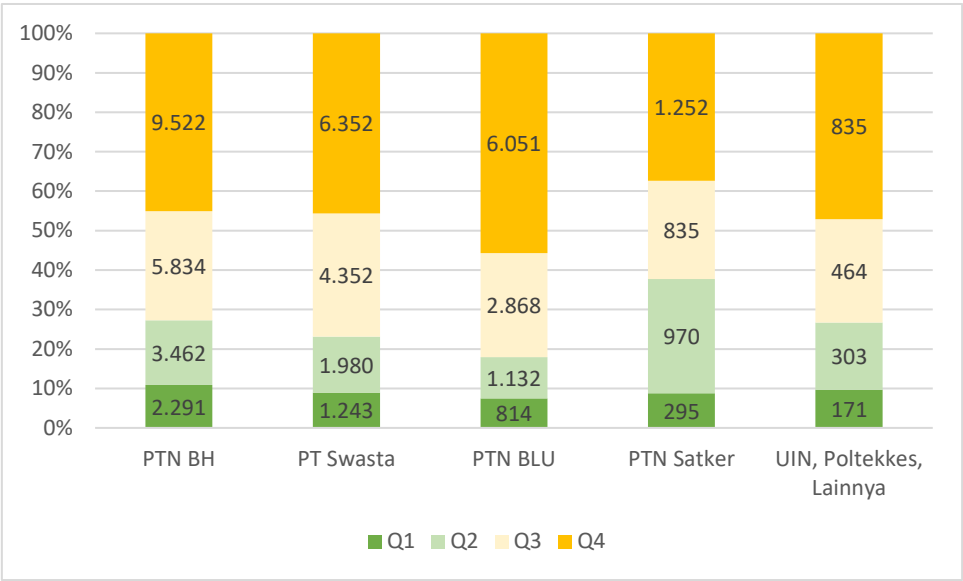
Dalam kaitannya dengan perlindungan bahasa dan sastra daerah, sampai akhir tahun 2021, sebanyak 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah di Indonesia dan 136 (seratus tiga puluh enam) sastra daerah terpetakan. Dari jumlah 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah tersebut, telah terkonservasi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) bahasa dan 30 (tiga puluh) sastra lisan dalam bentuk pendokumentasian, penyusunan kamus, dan penyusunan tata bahasa.

Selain itu, telah dilakukan pula revitalisasi terhadap 21 (dua puluh satu) bahasa daerah dan 24 (dua puluh empat) sastra lisan. Untuk konservasi revitalisasi bahasa daerah pada tahun 2020 melibatkan sebanyak 25.651 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu) partisipan penutur muda bahasa daerah. Sedangkan pada tahun 2021 melibatkan sebanyak 26.551 (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu) partisipan penutur muda bahasa daerah. Revitalisasi bahasa dan sastra daerah dengan pendekatan dan model baru berbasis sekolah di 3 (tiga) provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan) dengan fokus 5 (lima) bahasa daerah (Sunda, Jawa, Bugis, Makasar dan Toraja) telah melibatkan 1.108.442 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh dua) siswa SD dan SMP. Praktik baik ini akan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya dengan melibatkan lebih banyak bahasa dan sastra daerah untuk menjamin pelestarian yang lebih menyeluruh. Dalam tataran global, perlindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia selaras dengan gerakan yang digaungkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) untuk menjadikan periode tahun 2022-2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah (*International Decade of Indigenous Languages*).

7. Produktivitas dan Daya Saing Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi

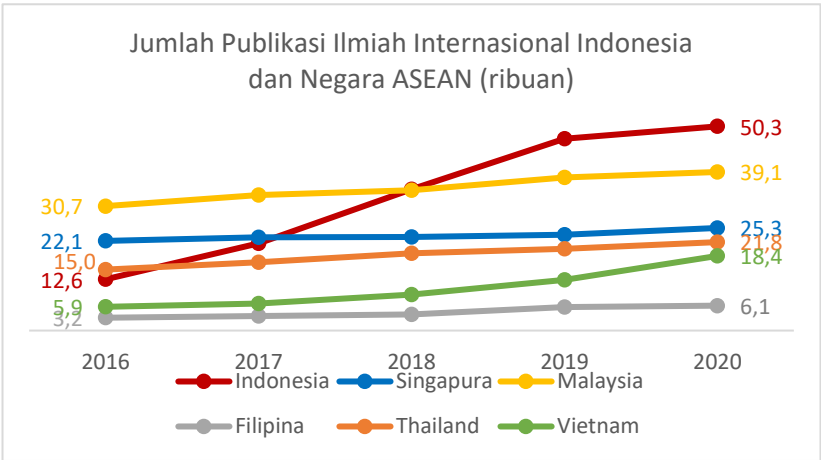
Sebagai wahana pendidikan dan wahana inovasi, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu ukuran produktivitas hasil ilmu pengetahuan dan teknologi adalah publikasi, baik publikasi bereputasi nasional maupun bereputasi internasional. Indikator ini mengukur kinerja produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional.

Gambar 1.26 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Terindeks *Scopus* Berdasarkan Institusi Tahun 2020



Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2020

Gambar 1.27 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara ASEAN Tahun 2016-2020



Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2016-2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia di tahun 2020 secara kuantitas telah mengungguli negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Capaian publikasi ilmiah internasional terindeks Scopus tersebut berasal dari Kemendikbudristek, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

Walaupun jumlah publikasi telah meningkat, dalam hal sitasi Indonesia masih berada di bawah negara lain. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas riset Indonesia masih rendah. Kualitas publikasi dapat dihitung dengan H-indeks. H-indeks merupakan indeks komposit dari 5 (lima)

indikator, yaitu jumlah dokumen, jumlah dokumen yang layak disitasi, jumlah sitasi, jumlah sitasi sendiri, dan jumlah sitasi per dokumen. Menurut *Scientific Journal Ranking* (SJR) tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-58 dengan H-index 259. Di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Singapura (H-indeks 646), Malaysia (H-indeks 373), Thailand (H-indeks 369), dan Filipina (H-indeks 274).

Tabel 1.2 Informasi Sitasi Jurnal Internasional Tahun 1996-2020

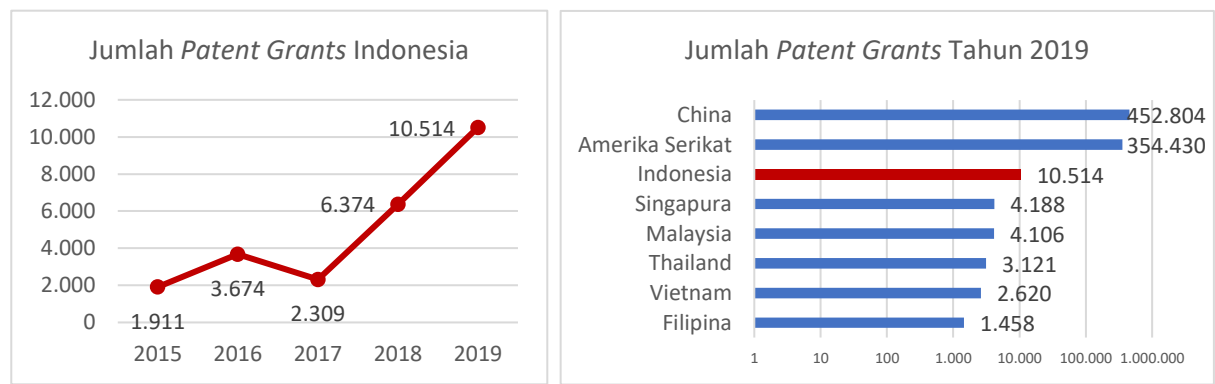
Peringkat	Negara	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang Layak Disitasi	Jumlah Sitasi	Jumlah Sitasi Sendiri	Jumlah Sitasi per Dokumen	H-indeks
24	Singapura	352.240	315.906	8.245.716	841.769	23,41	646
41	Malaysia	368.061	351.217	3.533.978	827.096	9,6	373
42	Thailand	223.696	210.356	2.929.417	447.160	13,1	369
56	Filipina	45.309	41.055	691.955	68.453	15,27	274
58	Indonesia	212.806	206.360	1.054.947	268.853	4,96	259
59	Vietnam	84.359	78.564	922.990	158.551	10,94	248

Sumber: Pangkalan Data *Scimago Journal & Country Rank*, 1996-2020

Rendahnya kualitas publikasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, antara lain, pilihan topik/tema kajian penelitian sering kali tidak sejalan dengan tren topik/tema kajian internasional, sehingga kecil kemungkinannya hasil penelitian Indonesia dapat menjadi masukan penelitian internasional. Kapasitas penelitian (baik peneliti maupun infrastruktur) yang terbatas, juga membatasi jenis penelitian yang dapat dilakukan. Masalah internal lain yang sering muncul adalah adanya tindakan pelanggaran etika ilmiah yang menyebabkan kegagalan akreditasi pada publikasi nasional maupun internasional. Selain itu, kurang berkembangnya budaya menulis di perguruan tinggi menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi civitas penelitian, terutama mahasiswa. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian secara komprehensif pada publikasi tingkat nasional maupun internasional. Dari segi eksternal, dukungan finansial juga diperlukan untuk memfasilitasi dan memberikan dorongan bagi mahasiswa maupun dosen agar dapat melakukan penelitian yang bermutu.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual dihasilkan atas kemampuan intelektual dalam menciptakan produk baru dengan berlandaskan kegiatan penelitian atau kegiatan yang sejenis. Kekayaan intelektual, dengan demikian, perlu dilindungi melalui suatu sistem hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Setiap jenis hak kekayaan intelektual tersebut memberikan perlindungan untuk bidang yang berbeda-beda. Hak cipta untuk melindungi karya intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; paten untuk bidang teknologi; merek untuk simbol atau nama dagang suatu barang/jasa; desain industri digunakan untuk melindungi tampilan 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi suatu benda; desain tata letak sirkuit terpadu digunakan untuk tata letak rangkaian elektronika; rahasia dagang untuk informasi rahasia yang bernilai ekonomis dan dipergunakan dalam kegiatan usaha/bisnis; serta perlindungan varietas tanaman digunakan untuk melindungi varietas tanaman.

Gambar 1.28 Jumlah *Patents Grants* Indonesia Tahun 2015-2019 dan Perbandingan Jumlah *Patent Grants* Indonesia dengan Negara Lain Tahun 2019

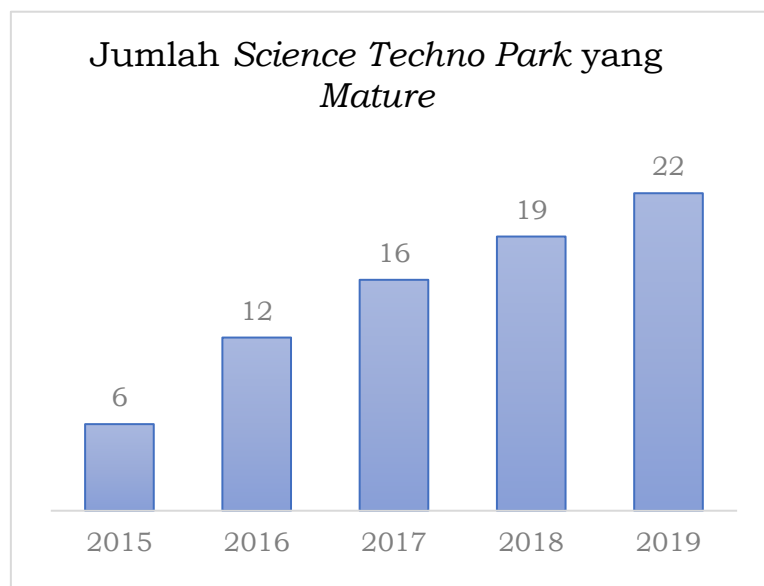


Sumber: *World Intellectual Property Organization*, 2015-2019

Grafik diatas menggambarkan tren capaian kekayaan intelektual di tingkat Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan perorangan. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kekayaan intelektual melonjak cukup tinggi, meningkat sebanyak 4.207 (empat ribu dua ratus tujuh) kekayaan intelektual (63,89% (enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen)) dari capaian tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari adanya fasilitasi peningkatan perolehan kekayaan intelektual domestik, fasilitasi penguatan sentra kekayaan intelektual, dan pemberian insentif pendaftaran paten. Insentif diberikan, salah satunya, melalui Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) yang dicanangkan pada tahun 2019. Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) merupakan bantuan pendaftaran paten yang diberikan pada dosen dan peneliti perguruan tinggi yang telah selesai melakukan penelitiannya.

Gambar 1.29 Jumlah *Science Techno Park* yang *Mature* Tahun 2015-2019



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019

Pada tahun 2015-2019, dalam rangka mengakomodasi hilirisasi produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha mengembangkan *Science Techno Park* serta Taman Sains dan Teknologi. *Science Techno Park* merupakan kawasan yang dikelola secara profesional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan/perekonomian masyarakat sekitar dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis ilmu pengetahuan. Pembangunan *Science Techno Park* ini memiliki fungsi sebagai *center of excellence* (kerja sama dunia usaha/swasta-

pemerintah-perguruan tinggi) yang dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Keberhasilan pembangunan *Science Techno Park* dapat dijadikan salah satu bentuk capaian ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi.

Science Techno Park merupakan simpul kerja sama dunia usaha/swasta-pemerintah-perguruan tinggi dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial. *Science Techno Park* digunakan sebagai sarana menghirilkan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri. *Science Techno Park* juga memfasilitasi berkembangnya industri berbasis inovasi sekaligus menyediakan jasa bernilai ekonomi dalam suatu kawasan.

Dari tahun ke tahun, jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mandiri/matang (*mature*) terus mengalami peningkatan. Taman Sains dan Teknologi dapat dikatakan mandiri/matang apabila telah memperlihatkan kinerja awal berupa (a) melaksanakan riset secara berkesinambungan, (b) menghasilkan perusahaan pemula, dan (c) mampu menarik industri ke kawasan untuk memanfaatkan layanan teknologi oleh Kawasan Sains dan Teknologi.

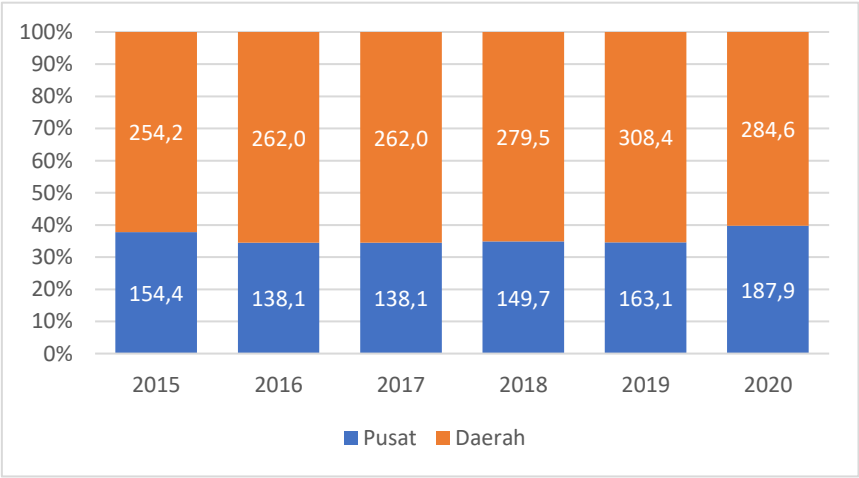
Pada tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan 6 (enam) lokasi baru *Science Techno Park* yang dikembangkan dari 5 (lima) Universitas (Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menambah pengembangan *Science Techno Park* di 3 (tiga) lokasi yaitu *Science Techno Park* Universitas Andalas (Padang, Sumatera Barat), *Science Techno Park* Universitas Indonesia (Depok, Jawa Barat) dan *Science Techno Park* Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Medan, Sumatera Utara), yang merupakan pengembangan dari Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada tahun 2019, 2 (dua) *Science Techno Park* yang berada di bawah wewenang Kemendikbudristek telah mandiri/matang, yakni *Science Techno Park* Universitas Indonesia dan *Science Techno Park* Universitas Andalas.

8. Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan bahwa 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan untuk pendidikan, lebih dari 60% (enam puluh persen) anggaran tersebut adalah anggaran yang dikelola oleh daerah. Pada tahun 2015-2018 proporsi anggaran pendidikan pusat terus menyusut, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020.

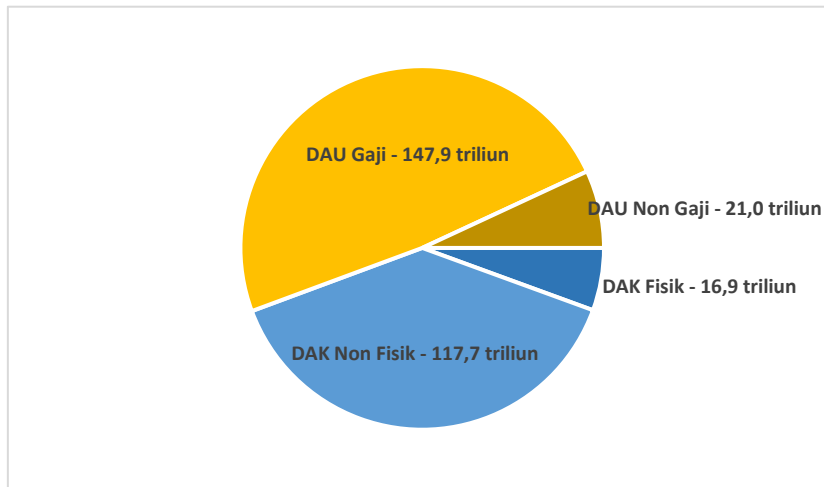
Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan terus mengembangkan mekanisme tata kelola untuk meyakinkan daerah agar menggunakan anggaran pendidikan yang dikelolanya untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Gambar 1.30 Anggaran Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2015-2020 (triliun rupiah)



Sumber: Perpres tentang Rincian APBN, 2015-2020

Gambar 1.31 Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah Tahun 2019



Sumber: Perpres tentang Perincian APBN, 2019

Terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola dana transfer ke daerah, 2 (dua) diantaranya, adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dikelola sebagai *unconditional transfer* untuk menutup kesenjangan kapasitas fiskal daerah. Untuk Dana Alokasi Umum pendidikan, sebagian besar dana (87,6% (delapan puluh tujuh koma enam persen)) digunakan untuk belanja gaji bagi guru, tenaga pendidikan, serta aparat organisasi perangkat daerah di bidang pendidikan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pusat untuk mempengaruhi daerah dalam mengelola pembelanjaan Dana Alokasi Umum.

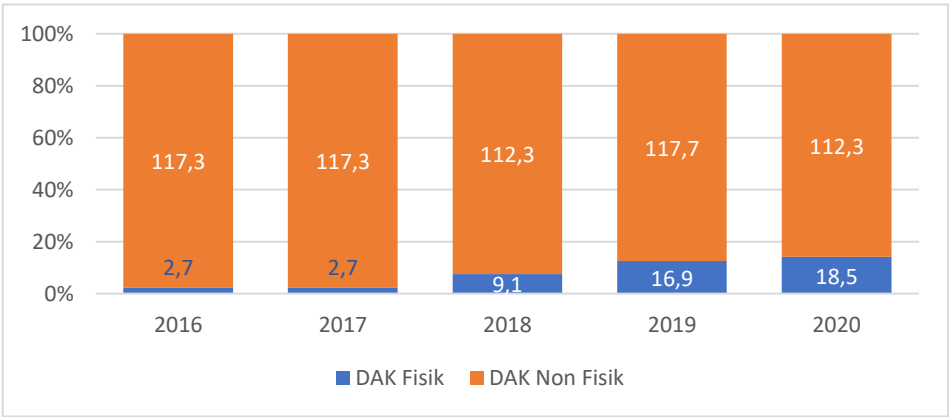
Oleh karena itu, Kemendikbudristek menggunakan kebijakan Dana Alokasi Khusus untuk mengendalikan belanja pendidikan di daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional seperti rehabilitasi, penambahan fasilitas, dan pembelian aset pendukung pembelajaran. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan PAUD/Kesetaraan, tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, serta tunjangan khusus guru yang mengajar di daerah khusus.

Gambar 1.32 menunjukkan adanya penurunan proporsi Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada periode tahun 2016-2020. Penurunan ini mungkin karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus Fisik. Untuk memaksimalkan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Fisik, Kemendikbudristek perlu mengembangkan mekanisme tata kelola dengan memperkuat sinkronisasi dan koordinasi Dana Alokasi Khusus Fisik bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kemendikbudristek dapat mengembangkan mekanisme untuk mempengaruhi pola belanja daerah yang didanai melalui Dana Alokasi Umum dengan memperkuat analisis pola belanja daerah, melakukan sinkronisasi kebijakan perencanaan pendidikan daerah, memperkuat sosialisasi program-program pusat yang dapat didanai proses diseminasinya oleh daerah, dan memperkuat kualitas data pokok pendidikan sebagai alat verifikasi dan validasi proposal Dana Alokasi Khusus Fisik yang diajukan oleh daerah.

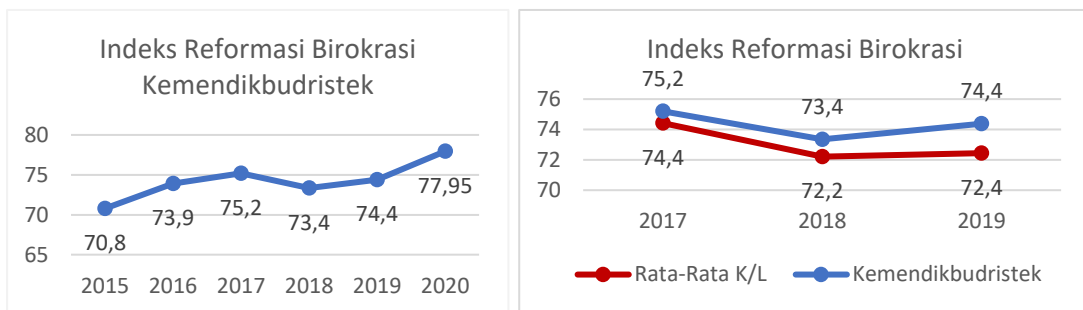
Gambar 1.32 Anggaran Pendidikan Dana Transfer Khusus Tahun 2016-2020 (triliun rupiah)



Sumber: Perpres tentang Rincian APBN, 2016-2020

Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Kemendikbudristek menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Pada tahun 2020, indeks Reformasi Birokrasi berhasil mendapat nilai 77,95 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh lima) dari target yang ditetapkan yaitu 78 (tujuh puluh delapan). Meskipun masih sedikit di bawah target, tren peningkatan sudah cukup baik, karena pada tahun 2015 indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 70,79 (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan). Capaian indeks Reformasi Birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya.

Gambar 1.33 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2015-2020 dan Perbandingan dengan Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Tahun 2017-2019



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2015-2020

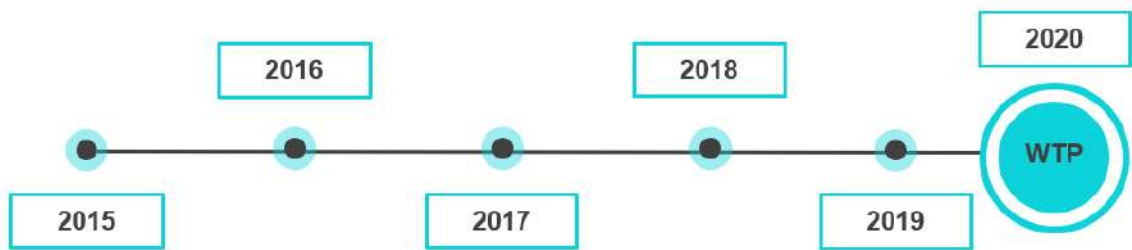
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2019

Selain indeks Reformasi Birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 28 (dua puluh delapan) Satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi serta 2 (dua) Satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh Satker serta pendampingan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan melalui penyelenggaraan forum agen perubahan secara berkala, pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait, dan penyusunan buku agen perubahan yang berjudul “Kisah Sukses Agen Perubahan Kemendikbud 2020” sebagai bahan sosialisasi.

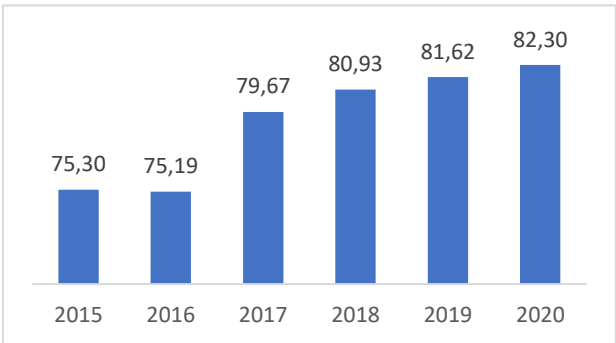
Terkait dengan laporan keuangan, Kemendikbudristek berhasil memperoleh kembali predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2020 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang laporan keuangan secara material yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Capaian predikat ini tidak lepas dari asistensi penyusunan laporan keuangan di satuan kerja, penguatan tim Sistem Akuntansi Instansi Kemendikbudristek, serta analisis dan evaluasi laporan keuangan yang dilakukan secara berkala.

Gambar 1.34 Opini Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud 2015-2020

Gambar 1.35 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud 2015-2020

Selanjutnya, dalam mengukur kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek terus mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil melewati target awal yaitu 81 (delapan puluh satu) dan dapat terealisasi sebesar 82,30 (delapan puluh dua koma tiga puluh). Indeks ini mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan Unit Layanan Terpadu. Peningkatan indeks kepuasan Kemendikbudristek terjadi di seluruh bidang baik bidang pendidikan, kebudayaan, maupun layanan Unit Layanan Terpadu. Ketercapaian ini tidak lepas dari upaya Kemendikbudristek dalam pembinaan dan pendampingan petugas layanan Unit Layanan Terpadu serta publikasi program Kemendikbudristek untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada melalui media cetak, elektronik, daring, dan media sosial.

Salah satu potensi untuk meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dan layanan publik Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui Unit Layanan Terpadu untuk mengakomodasi layanan informasi dan pengaduan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

- A. Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden.

- B. Dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden
- Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

C. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kemendikbudristek. Tujuan Kemendikbudristek sebagai berikut:

1. perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
4. peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

D. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek menetapkan 5 (lima) sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Strategis

No	Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sasaran Strategis
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
3	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

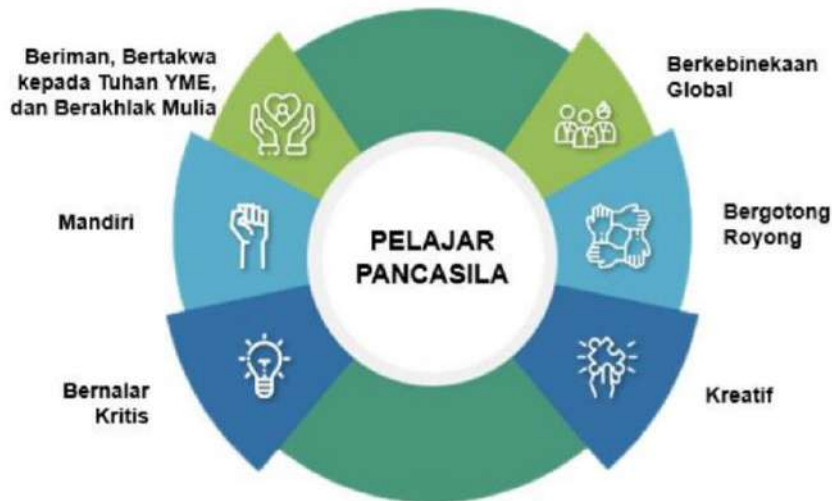
E. Perspektif Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemendikbudristek perlu menyusun arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang selaras. Oleh karena itu, dokumen Renstra Kemendikbudristek menyajikan 2 (dua) perspektif dalam pencapaiannya.

1. Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila)

Profil Pelajar Pancasila sebagai elaborasi tujuan pendidikan nasional adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 (enam) ciri utama: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila



Enam ciri tersebut menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja tetapi juga pada sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global.

2. Perspektif Cara (Merdeka Belajar)

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menyatakan bahwa paradigma pendidikan yang memerdekakan memiliki 3 (tiga) ciri yaitu:

a. Tidak Hidup Terperintah

Peserta didik belajar dengan kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau perintah orang lain.

b. Berdiri Tegak karena Kekuatan Sendiri

Peserta didik berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan mampu menemukan cara dalam mengatasi kesulitan belajar.

c. Cakap Mengatur Hidupnya dengan Tertib

Peserta didik mampu menilai tindakan dan kemajuan belajarnya sehingga dapat melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan belajar.

Pada hakikatnya gagasan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian disebut sebagai Merdeka Belajar, sejalan dengan konsep *self regulated learning* yang telah dikaji oleh beberapa ahli seperti Zimmerman; Boekaerts, Winne dan Hadwin, Pintrich; Efklides, serta Hadwin, Järvelä dan Miller (Panadero, 2017). *Self regulated learning* adalah keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam

menentukan tindakan, pikiran dan perasaan yang mengarah pada pencapaian tujuan, sembari melakukan *monitoring* diri dan refleksi diri terhadap kemajuan dalam mencapai target.

Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar, membentuk 5 (lima) pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, sebagai berikut.

- a. Semula mekanisme kontrol menjadi pemberdayaan melalui umpan balik. Mekanisme kontrol terbukti tidak selalu efektif serta dapat menimbulkan tekanan dan orientasi yang keliru. Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya.
- b. Semula arahan menjadi penguatan praktik baik di lapangan. Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan.
- c. Semula apresiasi hanya bagi yang terbaik menjadi bagi semua kemajuan. Apresiasi hanya bagi yang terbaik dapat menimbulkan demotivasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Semangat merdeka belajar mendorong pengelolaan pendidikan yang mengapresiasi semua kemajuan yang terjadi,

bahkan untuk kemajuan kecil oleh satuan pendidikan kecil yang masih berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem pendidikan akan lebih aktif dan lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini.

- d. Semula kompetisi menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama. Semangat merdeka belajar tanpa meninggalkan kompetisi, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai gotong royong dalam bentuk kolaborasi antarpihak. Dengan kolaborasi, akan lebih banyak energi dan dukungan bagi semua pelaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak tapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak bangsa.
- e. Semula berfokus pada peningkatan akses menjadi peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan afirmatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar pada akhirnya selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Semangat merdeka belajar mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing-masing.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan kementerian/ lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Renstra Kemendikbudristek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4, dan 7. Maka dari itu, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikbudristek harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional berikut ini:

Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber

daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek sebagai berikut.

Tabel 3.1 Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 3

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
A	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	
1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
2	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
3	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
4	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
5	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
B	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing	
1	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
2	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas	SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3	Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi	SS 4 Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan

Agenda Pembangunan 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek sebagai berikut.

Tabel 3.2 Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 4

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
A	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	
1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	SS 2 Meningkatkan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
3	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	SS 2 Meningkatkan kualitas pembelajaran (kompetensi dan

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
B	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	
1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antar warga	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
2	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
3	Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4	Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
C	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	
1	Peningkatan budaya literasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia,	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	bahasa dan aksara daerah, serta sastra	
3	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

Agenda Pembangunan 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem *merit* yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut.

Tabel 3.3 Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 7

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
A	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
1	Penguatan manajemen aparatur sipil negara, melalui: penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara, peningkatan penerapan Manajemen sumber daya manusia berbasis sistem <i>merit</i> , dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Kemendikbudristek	SS 5 Menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2	Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
3	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
4	Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-service</i>), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan; dan
- b. lulusan pendidikan tinggi meningkat.

Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, kebijakan standar pelayanan minimal, maupun swadaya masyarakat, untuk mendorong tersedianya 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD;
- b. meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD kepada anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi;
- c. meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMP melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- e. meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMK melalui peningkatan kapasitas terpasang pada program kompetensi yang dibutuhkan;
- f. program afirmasi pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA dan SMK untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar melalui pembangunan SMA/SMK satu atap atau layanan sekolah berasrama untuk melayani daerah yang tidak mungkin dibangun sekolah;
- g. menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal;
- h. perluasan layanan pendidikan khusus untuk memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dilayani oleh satuan pendidikan reguler dan inklusi;
- i. melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah; dan

- j. menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan di daerah afirmasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan pendidikan tinggi meningkat sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi berkualitas yang relevan dengan kebutuhan daerah;
- b. memperkuat peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi; dan
- c. menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu.

- 2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa indonesia dan berkewargaan global;
- b. sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas;
- c. lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- d. lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional; dan
- e. sumber belajar yang relevan dan berkualitas.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewarganegaraan global sebagai berikut:

- a. mendorong pertumbuhan satuan PAUD yang menerapkan layanan PAUD holistik integratif;
- b. melaksanakan program sekolah penggerak sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
- c. menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk

- mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa;
- d. mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi, dan karakter;
 - e. menerapkan pembelajaran paradigma baru pada semua satuan pendidikan melalui pengimbasan sekolah penggerak ataupun penerapan secara mandiri;
 - f. memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
 - g. memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan;
 - h. mengembangkan program penguatan iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebinekaan satuan pendidikan;
 - i. memfasilitasi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membangun karier sesuai dengan bidangnya; dan
 - j. melakukan pembinaan minat dan bakat bagi siswa berprestasi.

Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas sebagai berikut:

- a. menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar;
- b. mengembangkan profil dan rapor pendidikan di tingkat daerah dan satuan pendidikan dengan menggunakan asesmen nasional dan data pendidikan;
- c. menguatkan pemanfaatan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung penjaminan mutu dan akreditasi otomatis; dan
- d. menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis data dan meta analisis dari berbagai bukti ilmiah untuk secara bertahap dan berkelanjutan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan untuk menangani isu pembangunan pendidikan di Indonesia.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai berikut:

- a. menjalankan program SMK Pusat Keunggulan serta Kampus Merdeka untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran serta peningkatan kualitas lulusan;
- b. membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industri untuk:
(1) memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; (2) menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri; (3) menyediakan pemagangan dan praktik kerja; (4) mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; dan (5) menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri;
- c. membangun kerja sama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industri dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan kompetensi pengajar, pertukaran praktik baik pengajaran, dan penguatan pengukuran mutu lulusan;
- d. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *centres of excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi kelas dunia dan pembinaan perguruan tinggi lainnya yang sedang berkembang dan pembentukan *Science Techno Park* di lima universitas: Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e. menitikberatkan pengembangan *soft skills* seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman nilai etos kerja, serta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja; dan
- f. mengembangkan *platform* teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak kebekerjaan lulusan.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

- a. melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
- b. pengembangan sistem pembelajaran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru, *platform* daring pembelajaran guru, pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pembentukan ekosistem belajar guru di daerah serta pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan;
- c. penguatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan melalui pelaksanaan program guru penggerak;
- d. penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;
- e. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia; dan
- f. strategi revitalisasi LPTK, yaitu:
 - 1) Penguatan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) *Literacy* dan Pendampingan dalam Pembelajaran;
 - 2) Penguatan Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif;
 - 3) Inovasi Pembelajaran Berbasis Model Kolaboratif dan Partisipatif;
 - 4) Pengembangan Modul Digital Berbasis *Micro Learning*;
 - 5) Program *Micro Credentials* Bersertifikat; dan
 - 6) Program Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi sumber belajar yang relevan dan berkualitas sebagai berikut:

- a. mengembangkan desain sistem perbukuan yang secara aktif melibatkan aktor perbukuan di pusat, daerah, perwakilan masyarakat, dan sektor swasta;
- b. mengembangkan sistem informasi perbukuan untuk mendukung pendataan aktor perbukuan, produk perbukuan, dan publikasi lainnya;
- c. melaksanakan penjaminan sektor perbukuan untuk meyakinkan produk perbukuan dan publikasi memenuhi standar kualitas;
- d. menyediakan bahan pengayaan literasi berkualitas dalam berbagai moda;
- e. memberdayakan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan dengan usia; dan
- f. memanfaatkan *platform* digital untuk penyediaan sumber belajar yang berkualitas baik bagi pendidik dan Peserta Didik.

3. Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam memajukan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;
- b. penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;
- b. meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;
- c. meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;

- d. mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana pendidikan karakter;
- e. mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;
- f. meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal; dan
- g. memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional sebagai berikut:

- a. menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia;
- b. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia; dan
- c. meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (*friends of Indonesia*), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- b. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
- c. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;

- d. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
 - f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
 - g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan;
 - h. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
 - i. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah; dan
 - j. mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah.
4. Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:
- a. penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga riset nasional maupun internasional untuk mengikuti perkembangan riset, teknologi, dan ilmu pengetahuan global;
- b. memperkuat proses diskusi antara dunia industri dan pemerintah untuk sinergi dukungan dan meningkatkan relevansi penelitian; dan
- c. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
- b. memperkuat kerja sama dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian;
- c. memperkuat mekanisme penjaminan mutu proses penelitian untuk memperoleh rekognisi internasional; dan
- d. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

5. Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- a. tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas;
- b. pelayanan publik yang prima.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:

- a. penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru;
- b. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- c. memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah;
- d. penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;

- e. memperkuat mekanisme pengelolaan dana transfer daerah bidang pendidikan yang lebih terkoordinasi dengan baik;
- f. mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia Kemendikbudristek yang berbasis mekanisme manajemen talenta.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pelayanan publik yang prima sebagai berikut:

- a. pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;
- b. memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu;
- c. mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan pendidikan.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 2. pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; 3. konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. standar pendidikan; 5. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 6. konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); dan 7. kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).	
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan, antara lain: 1. undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; dan 4. hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.	
4.	Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain: 1. perizinan perfilman; 2. tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak; 3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur mengenai: a. jenis dan tarif sensor film; b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan c. pendanaan: - apakah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan.	
5.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan	1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, secara eksplisit memastikan kembali bahwa mandat pendanaan pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		terlaksana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melakukan pengawasan secara teknis dari menteri sebagai bentuk kontrol pemerintah pusat terkait untuk menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimandatkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	
6.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	1. Bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. 2. Bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah. 4. Ruang lingkup pengaturan: - rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan; - sertifikasi pendidik; - bobot muatan belajar; - tugas tambahan; - tunjangan profesi; - penilaian kinerja; - pemenuhan beban kerja sebagai guru; - tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional; - tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; - maslahat tambahan; - pengembangan dan peningkatan kompetensi guru; - pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan - perencanaan kebutuhan guru.	
7.	Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	- Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien; - mengakomodasikan berbagai perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; dan 3. praxis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 4. Ruang lingkup pengaturan: a. mengubah syarat usia calon peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk pendidikan formal lainnya yang sederajat; b. penghapusan syarat hasil ujian nasional dan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10; c. semua ketentuan tentang pendidikan tinggi dan RSBI dihapus; d. kewajiban satuan pendidikan dalam penyediaan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas.	
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian	1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		2. Ruang lingkup pengaturan: a. jenis program studi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian merupakan program studi yang bersifat teknis dan spesifik serta tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian; b. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian diselenggarakan untuk memperkuat tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian melalui pendidikan kedinasan untuk CPNS atau PNS instansi bersangkutan. Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan c. bentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian tidak dibatasi politeknik atau akademi, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.	
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	1. Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai konsekuensi telah diprakarsainya perubahan pola pengelolaan universitas negeri dari Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 2. Mengatur bagaimana kemandirian tata kelola bidang akademik dan nonakademik yang akan dimiliki oleh universitas negeri setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 3. Melalui Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, pendidikan tinggi akan menjadi berkualitas, peran serta masyarakat terbuka lebar, dan adanya akses bagi yang tidak mampu. 4. Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan sistem pengelolaan antara lain: a. identitas; b. dasar, visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan; c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan d. struktur pengelolaan universitas, pengelolaan aset, dan pengelolaan keuangan Perguruan	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dalam penetapan universitas- universitas negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		Tinggi Negeri Berbadan Hukum.	
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Dalam ketentuan di Undang-Undang ini, bahasa dan sastra daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat (diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek) berwenang, antara lain, menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.	Tahun 2024
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tertentu Widyabasa	Widyabasa adalah jabatan fungsional tertentu yang sangat diperlukan dalam rangka menganalisis dan menyintesiskan masalah kebahasaan sebagai dampak dari perpindahan para peneliti bahasa dan sastra ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Analisis dan sintesis yang tepat diperlukan sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.	Tahun 2022
12.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016	Agar memuat ketentuan tentang kewajiban uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi para tenaga profesional, khususnya tenaga profesional yang terlibat	Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	langsung dalam urusan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, seperti dosen, guru (pendidik), tenaga kependidikan, mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya.	
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Amanat Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.	Tahun 2022
14.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang tentang Standar Pendidikan Guru (Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru	Pengaturan mengenai pendidikan profesi guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebijakan saat ini sehingga perlu diganti.	Tahun 2022
15.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat mengenai standar teknis pelayanan minimal sehingga perlu diganti.	Tahun 2022

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbudristek harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

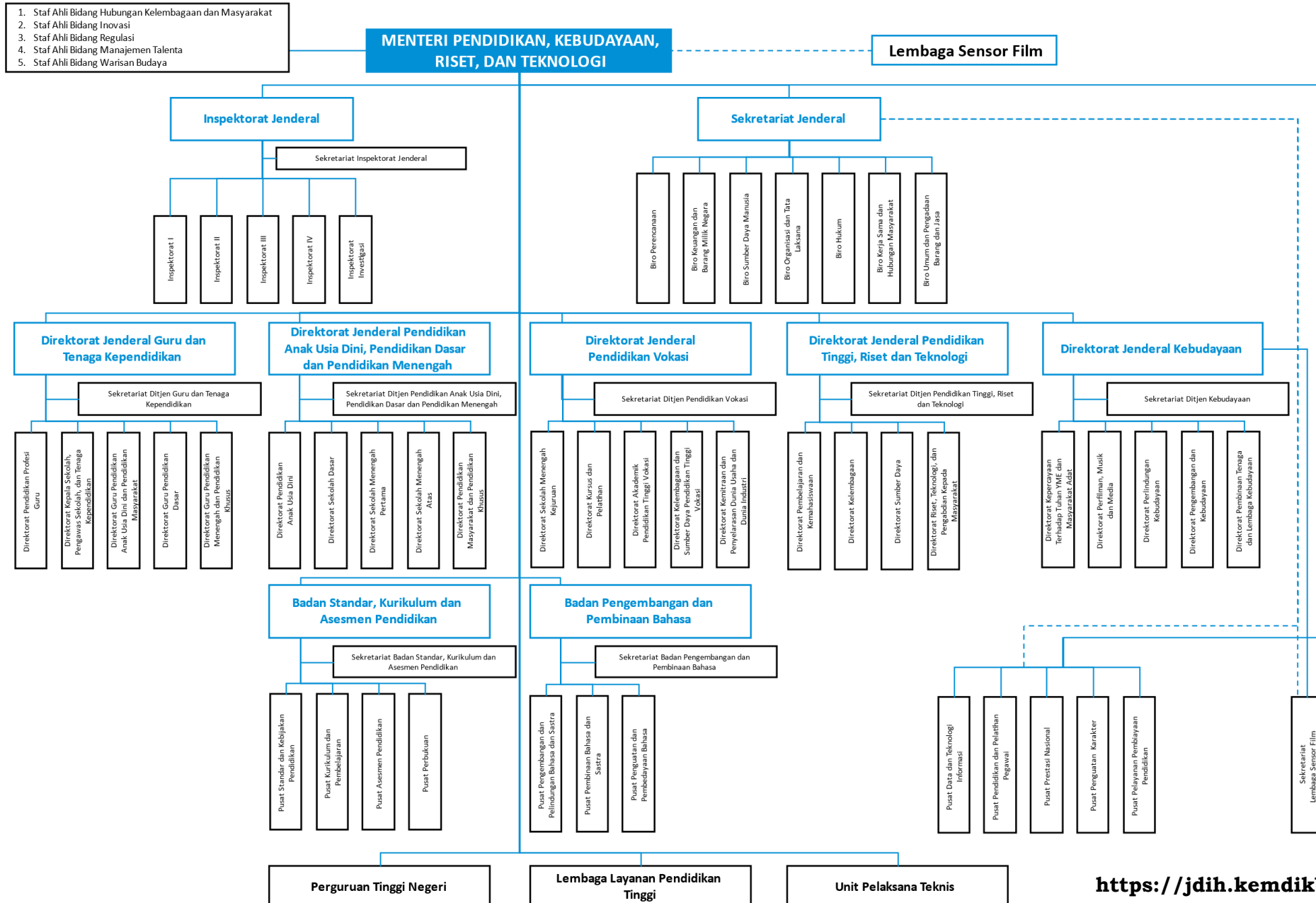
1. Struktur Organisasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbudristek, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (sembilan) Unit Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;

- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- f. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; dan
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian.



2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbudristek. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan Kemendikbudristek berupaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *roadmap* sumber daya manusia secara nasional yaitu aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, teknologi informasi dan komunikasi, dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh aparatur sipil negara.

a. Kondisi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi di Kemendikbudristek, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 jumlah sumber daya manusia Kemendikbudristek saat ini adalah sebanyak 124.726 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam) pegawai.

Tabel 3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan	778
2	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.316
3	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	1.322
4	Direktorat Jenderal Kebudayaan	3.035
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,	4.819

	Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	
6	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	252
7	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	1.678
8	Inspektorat Jenderal	391
9	Sekretariat Jenderal	1.432
10	Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	109.703
	Total	124.726

- b. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024
- Kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbudristek. Di samping itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 3.6 menggambarkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia Kemendikbudristek sampai tahun 2024.

Tabel 3.6 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbudristek Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan	40	38	43	35	44
2	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	33	35	26	24	24
3	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	160	164	150	168	170
4	Direktorat Jenderal Kebudayaan	150	152	187	162	177
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	188	193	197	204	227
6	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	41	30	37	30	30
7	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	22	10	28	19	24
8	Inspektorat Jenderal	30	21	25	31	27

9	Sekretariat Jenderal	87	71	100	86	78
10	Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	11.201	10.563	11.150	11.796	11.334
	Total	11.952	11.277	11.943	12.555	12.135

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen aparatur sipil negara tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbudristek berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Sumber daya manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan

Kemendikbudristek Sehubungan dengan begitu pentingnya sumber daya manusia aparatur, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula, dalam reformasi birokrasi, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek sumber daya manusia aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi 8 (delapan) area perubahan, yakni:

1. manajemen perubahan;
2. penguatan pengawasan;
3. penguatan akuntabilitas kinerja;
4. penguatan kelembagaan;
5. penguatan tata laksana;
6. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
7. penguatan peraturan perundang-undangan;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik yang terdiri atas:
 - a. layanan peserta didik;
 - b. layanan satuan pendidikan;
 - c. layanan substansi pendidikan;
 - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. layanan kebudayaan;
 - f. layanan kebahasaan; dan
 - g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbudristek menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP).

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2021

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target 2020	Target 2021
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang			
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,2	42,62
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang			
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	%	47,1	48,30

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target 2020	Target 2021
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan	%	64,77	65,25
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43	48,33
IKSS 2.10	Persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12	18
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69	71,8
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik			
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan			
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510	515
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000	50.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,5	57,3
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel			
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,5	73
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81

Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang					
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	74,96	75,38	75,59	75,79
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,26	99,30	99,32	99,34
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	95,74	96,14	96,34	96,55
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SM LB/ Sederajat	%	84,53	88,39	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang					
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0.49	0.51	0.52	0.53
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum					
	a. Literasi	%	43,00	47,50	49,75	52,00
	b. Numerasi	%	22,90	28,30	29,20	30,10
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	27.5	30	32.5
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga	%	46,01	47,84	48,83	49,83

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
	kependidikan profesional					
IKSS 2.5	Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karier belajar dan karier profesionalnya	%	5	5	5,50	6
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1 X UMP	%	36,57	42,77	45,00	47,77
IKSS 2.7	Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2 X UMP)	%	19,50	19,70	20,00	20,50
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan					
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	indeks	57	69	75	81
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	indeks	54,65	59,71	61.20	62,70
SS 4	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan					
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau	Karya	74.908	82.500	86.500	90.500

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
	diterapkan oleh masyarakat					
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel					
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	opini	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	indeks	82,3	82	83	84
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	predikat	BB	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	indeks	78	83	85	87

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) program di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2020 dan 6 (enam) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud; b. Opini laporan keuangan Kemendikbud; c. Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud; d. Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		e. Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>; f. Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen; g. Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu; h. Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan; i. Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah; j. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK; dan k. Persentase pendayagunaan dan pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan.
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	a. Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; dan b. Nilai PMPRB Kemendikbud.
	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	a. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (emas, perak, perunggu, dan penghargaan lainnya); dan b. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional.
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan b. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar.
	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		b. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan c. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran.
	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi.
	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional	Persentase tingkat keberhasilan Budaya Sensor Mandiri.
2. Program Guru dan Tenaga Kependidikan		
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	a. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru); b. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1; c. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak; d. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya; dan e. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan.
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan minimal BB; dan b. Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah		
	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	a. Persentase anak kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun); b. Jumlah kabupaten/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi); dan c. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi).
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi); dan b. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak.
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan; b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum; dan c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum.
	Meningkatnya karakter peserta didik	a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter; dan b. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum.
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini,	a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu; b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai; c. Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan; dan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	pendidikan dasar dan menengah	d. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan.
	Terwujudnya tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen minimal BB; dan b. Jumlah Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
4. Program Pendidikan Vokasi		
	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	a. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha; b. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1 x UMR; c. Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha; d. Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2 x UMR; e. Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/ Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5 x UMR; dan f. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha.
	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	a. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri; b. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian; c. Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional; d. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD; dan e. Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i> .

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	a. Jumlah sumber daya manusia pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi; b. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional; c. Jumlah satuan pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH; dan d. Jumlah satuan pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	Jumlah sumber daya manusia lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB; dan b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
5. Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	a. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>; b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>; c. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH; d. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN); e. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan; f. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR; g. Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; dan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		h. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN).
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	a. Persentase dosen yang bersertifikat; b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya; dan c. Persentase dosen berkualifikasi akademik S3.
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB; dan b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
6. Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan		
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	a. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni; b. Jumlah festival skala internasional (<i>mega events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 (lima puluh ribu) orang dan 15% (lima belas persen) di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan; dan c. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.
	Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	a. Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan; b. Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum; c. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian; dan d. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah.
	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat	a. Persentase penduduk 10 (sepuluh) tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni; b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	kebudayaan yang inklusif	c. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan; dan d. Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki.
	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	a. Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan; b. Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD; c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda; dan d. Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya.
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal BB; dan b. Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud		
	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	a. Persentase Satker yang berintegritas; b. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>; c. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; d. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud; dan e. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud.
	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan	a. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi; dan b. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas	Nilai kinerja Inspektorat Jenderal
8. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra		
	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	a. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji; dan b. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.
	Meningkatnya budaya literasi	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan).
	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	Indeks daya hidup bahasa daerah.
	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	a. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia; dan b. Jumlah pelajar BIPA.
	Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB; dan b. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
9. Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud		
	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional	a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas; dan b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina.
	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	a. Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran; dan b. Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		terstandar untuk perbaikan pembelajaran.
	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan	a. Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global; b. Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah; c. Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan d. Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan.
	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	a. Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); b. Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP; dan c. Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar	a. Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar; dan b. Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar.
	Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB; dan b. Jumlah Satker Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2021, sesuai dengan restrukturisasi program Kementerian/Lembaga, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud; b. Opini laporan keuangan Kemendikbud; c. Kategori capaian kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud; d. Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN; e. Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i> ; f. Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen; g. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu; h. Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan; i. Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah; j. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK; dan k. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan.
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	a. Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; dan b. Nilai PMPRB Kemendikbud.
	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	a. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya); dan b. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional.

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan b. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar.
	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi
	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional	Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	a. Persentase Satker yang berintegritas; b. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i> ; c. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; dan d. Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud.
	Meningkatnya Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan	a. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi; dan b. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	a. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru); b. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1; c. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak; d. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya; dan e. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan.
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan; b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum; dan c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum.
	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
	Terwujudnya sistem perbukuan nasional	a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas; dan b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina.
	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	a. Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran; dan b. Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran.
	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan	a. Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global; b. Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		c. Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan d. Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan.
	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	a. Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai SNP; b. Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP; dan c. Jumlah Standar SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik; b. Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor iklim keamanan satuan pendidikan pada kategori baik; dan c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan pada kategori baik.
	Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar	Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar
3. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun		
	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	a. Persentase kabupaten/kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75% (tujuh puluh lima persen); b. Persentase kabupaten/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen); c. Persentase kabupaten/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95% (sembilan puluh lima persen); d. Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 100% (seratus persen);

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		e. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; f. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan g. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya.
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard minimum</i> 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi); dan b. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak.
	Meningkatnya karakter peserta didik	a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter; dan b. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum.
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu; b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai; c. Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan; dan d. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan.
4. Program Pendidikan Vokasi		
	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi	a. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	b. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1 x UMR; c. Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha; d. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2 x UMR; e. Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/ Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5 x UMR; dan f. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha.
	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	a. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri; b. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian; c. Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional; d. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD; dan e. Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>.
	Meningkatnya relevansi lulusan kursus dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja	a. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri; b. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian; c. Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional; d. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD; dan e. Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>.

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	a. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi; b. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional; c. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH; dan d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri.
5. Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi	a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya; b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 <i>World Class University</i> ; c. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 <i>World Class University by Subject</i> ; d. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH; e. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN); f. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan; g. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR; h. Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; dan i. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN).

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	a. Persentase dosen yang bersertifikat; b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya; dan c. Persentase dosen berkualifikasi akademik S-3.
6. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	a. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni; b. Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 (lima puluh ribu) orang dan 15% (lima belas) di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan; dan c. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.
	Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	a. Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilestarikan; b. Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan; c. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; dan d. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.
	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	a. Persentase penduduk 10 (sepuluh) tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni; b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat; c. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan; dan d. Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki.
	Terwujudnya peningkatan	a. Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	mutu pengelolaan kebudayaan	b. Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD; c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda; dan d. Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya.
	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	a. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji; dan b. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.
	Meningkatnya budaya literasi	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan).
	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya.
	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	a. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia; dan b. Jumlah pemelajar BIPA.

Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2022-2024, yang disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Dukungan Manajemen		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	a. Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN; b. Persentase hasil reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		c. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu; dan d. Persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholders</i> terkait.
	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	a. Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi; b. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan; c. Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek; d. Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen; e. Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal; f. Predikat SAKIP Ditjen GTK; g. Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen; h. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi; i. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; j. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan; k. Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; l. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; m. Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal; n. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek; dan o. Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan minimal baik.
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	a. Nilai PMPRB Kemendikbudristek; b. Persentase satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; c. Jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		d. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; e. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM; f. Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; g. Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; h. Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; dan i. Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek.
2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan PAUD-HI.
	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	a. Jumlah satuan pendidikan yang menjadi Sekolah Penggerak; b. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru; c. Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; d. Persentase satuan pendidikan yang terpetakan kompetensinya; dan e. Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran.

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	a. Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan <i>Platform Digital</i> Pendidikan; dan b. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran.
	Terwujudnya buku yang berkualitas	Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar.
	Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis; dan b. Persentase satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP.
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik; b. Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan; c. Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan; dan d. Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan.
	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	a. Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik; b. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya; c. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya; d. Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu.
	Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional.
3. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		
	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	a. Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75% (tujuh puluh lima persen); b. Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99% (sembilan puluh Sembilan persen); c. Persentase kabupaten/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95% (sembilan puluh lima persen); d. Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95% (sembilan puluh lima persen); e. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; f. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan g. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	a. Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1 x UMP; b. Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2 x UMP; c. Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha; dan d. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan dunia kerja.
	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat.
5. Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan b. Persentase peningkatan mahasiswa di perguruan tinggi negeri akademik.
	Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi	a. Persentase mahasiswa yang berkegiatan Kampus Merdeka; dan b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 <i>World Class University</i> .
	Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus.
	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi dari PT Akademik	Jumlah keluaran penelitian PT Akademik yang diterapkan oleh masyarakat.

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT Akademik	Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional.
6. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		
	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	a. Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya; dan b. Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya.
	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia.
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni.
	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	a. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan; b. Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan; c. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; dan d. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.
	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	a. Persentase penduduk 10 (sepuluh) tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni; dan b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.
	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya.

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbudristek dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek dibagi ke dalam 2 (dua) periode yakni:

- 1. Pagu 2021 dan Pagu 2022; dan
- 2. Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023-2024.

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021-2022

No.	Program	Pagu 2021	Pagu 2022
1.	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	11.868.301.547.000	10.139.195.732
2.	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.087.702.794.000	705.222.791
3.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	12.269.248.017.000	11.439.457.777
4.	Program Pendidikan Tinggi	28.205.232.540.000	28.646.007.592
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.669.792.391.000	3.061.582.460
6.	Program Dukungan Manajemen	23.433.723.791.000	19.003.441.979
	JUMLAH	81.534.001.080.000	72.994.908.331

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Anggaran	
		2023	2024
1.	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	10.443.371.604.000	10.756.672.752.000
2.	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	726.379.475.000	748.170.859.000
3.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	11.782.641.510.000	12.136.120.756.000
4.	Program Pendidikan Tinggi	29.505.387.820.000	30.390.549.454.000
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.153.429.934.000	3.248.032.832.000
6.	Program Dukungan Manajemen	19.573.545.238.000	20.160.751.596.000
	JUMLAH	75.184.755.581.000	77.440.298.248.000

BAB V PENUTUP

Penyesuaian Renstra Kemendikbudristek ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana yang menjadi mandat Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi di perguruan tinggi.

Renstra Kemendikbudristek ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; (5) peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan; dan (6) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk penguatan peran Kemendikbudristek sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbudristek beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbudristek menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbudristek, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyesuaian Renstra Kemendikbudristek menjadi pedoman dan arah pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup Kemendikbudristek, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemendikbudristek ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan, kebudayaan, selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18		
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,20		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	-		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	-		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	-		
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,10		
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77		
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43		
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12		
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10		
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10		
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan				
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510		
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000		
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,50		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,50		
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	81		
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78		
023.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud			22.788,64	Sekretariat Jenderal
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas				
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB		
IKP 1.1.2	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	kategori	sangat baik		
IKP 1.1.4	Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN	%	80		
IKP 1.1.5	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	%	80		
IKP 1.1.6	Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	%	10		
IKP 1.1.7	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	indeks	84		
IKP 1.1.8	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,50		
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	%	16		
IKP 1.1.10	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	%	2,79		
IKP 1.1.11	Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	53,33		
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud				
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	10		
IKP 1.2.2	Nilai PMPRB Kemendikbud	nilai	87		
SP 1.3	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional				
IKP 1.3.1	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	%	76,47		
IKP 1.3.2	Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	%	0		
SP 1.4	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter				
IKP 1.4.1	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10		
IKP 1.4.2	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10		
SP 1.5	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan				
IKP 1.5.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,69		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 1.5.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,18		
IKP 1.5.3	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	%	95		
SP 1.6	Meningkatnya kualitas film dan iklan film				
IKP 1.6.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	%	83		
SP 1.7	Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional				
IKP 1.7.1	Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	%	67		
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja			113,25	Biro Perencanaan
SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud				
IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100		
IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan	%	92,25		
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	kategori	Baik		
SK	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan				
IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	item	1		
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	70		
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	72		
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	71		
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud				
IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	laporan	3		
IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	45		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan				
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	nilai	80		
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara			198,33	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran				
IKK	Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	509		
IKK	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal	%	70		
IKK	Persentase penyelesaian kerugian negara	%	20		
IKK	Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91	%	85		
IKK	Persentase Satker yang capaian target PNBPN-nya $\geq$ 100%	%	85		
IKK	Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU	%	100		
IKK	Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A	%	70		
IKK	Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah	lembaga	5.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SK	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud				
IKK	Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100		
IKK	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	laporan	13		
IKK	Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A	%	80		
IKK	Jumlah laporan BMN yang disusun	laporan	9		
IKK	Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN	%	81		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN				
IKK	Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A	predikat	A		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91	nilai	91		
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara			66	Biro Sumber Daya Manusia
SK	Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud				
IKK	Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan	%	60		
IKK	Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu	%	75		
IKK	Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80	%	85		
IKK	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi	%	84		
SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud				
IKK	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	%	80		
IKK	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen	%	59		
IKK	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu	%	60		
IKK	Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja	%	83		
IKK	Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional	%	45		
IKK	Persentase kesesuaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi	%	70		
IKK	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai	%	79		
IKK	Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja	%	55		
IKK	Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK	%	76		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro SDM				
IKK	Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90	nilai	90		
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana			27,87	Biro Organisasi dan Tata Laksana
SK	Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM)	satker	22		
IKIK	Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9		
IKIK	Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9		
SK	Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbud				
IKK	Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif	%	60		
IKK	Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud	%	50		
IKK	Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud	%	50		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Ortala				
IKK	Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91	nilai	91		
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum			60,23	Biro Hukum
SK	Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi	%	100		
IKK	Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud	%	100		
IKK	Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun	%	100		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Hukum				
IKK	Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91	nilai	91		
1987, 4079	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di kawasan Asia Tenggara			502,73	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
SK	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama				
IKK	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	70		
IKK	Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	orang	650		
IKK	Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri	%	70		
SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga				
IKK	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	%	80		
IKK	Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	koleksi	750		
IKK	Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat	laporan	179		
SK	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	%	82		
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama yang berkualitas di kawasan asia tenggara				
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	satuan pendidikan	30		
IKK	Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	penelitian	20		
IKK	Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	satuan pendidikan	20		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara	satuan pendidikan	200		
IKK	Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara	Orang	472		
IKK	Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara	orang	1.200		
IKK	Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara	orang	300		
IKK	Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan <i>parenting</i> yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara	lembaga	15		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat				
IKK	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86	nilai	86		
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa			429,71	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah Satker yang melaksanakan PBJ melalui <i>e-procurement</i>	satker	167		
IKK	Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	%	10		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ				
IKK	Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91	nilai	91		
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan			394,93	Pusat Data dan Teknologi Informasi
SK	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Persentase belanja sekolah melalui <i>online marketplace</i> kecuali 3T	%	20		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital	orang	28.000		
IKK	Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan <i>platform toolkit</i> pembelajaran	orang	300.237		
IKK	Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui <i>platform</i> pencarian kerja <i>online</i>	orang	100.000		
IKK	Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran	%	60		
SK	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran				
IKK	Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	%	40,33		
IKK	Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data	%	66,33		
SK	Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK				
IKK	Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK	%	20		
IKK	Persentase <i>downtime</i> tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud	%	2		
IKK	Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud	%	20		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusdatin				
IKK	Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95	nilai	95		
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			173,45	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
SK	Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud				
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25	nilai	87,25		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25	nilai	86,25		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75	nilai	86,75		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60	nilai	87,60		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50	nilai	78,50		
SK	Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas				
IKK	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35	%	87,35		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A	predikat	A		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A	predikat	A		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A	predikat	A		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87,21	nilai	87,21		
4267	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik			396,10	Pusat Prestasi Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SK	Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan				
IKK	Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	medali	221		
IKK	Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional	orang	289		
IKK	Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional	kompetisi	176		
IKK	Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang	satuan pendidikan	-		
IKK	Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta	orang	50		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86	nilai	86		
4268	Kebijakan Penguatan Karakter			459,79	Pusat Penguatan Karakter
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
IKK	Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
IKK	Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	nilai	85		
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan			19.925,01	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan				
IKK	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992		
IKK	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773.064		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85		
5173	Peningkatan Sensor Film			41,25	Lembaga Sensor Film
SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor				
IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	film	38.500		
SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri				
IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	orang	1.250		
SK	Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film				
IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat	BB		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai	90		
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan			3.593,39	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	8,61		
SP 2.3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKP 2.3.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	90,73		
IKP 2.3.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1	%	89,19		
IKP 2.3.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	%	10		
IKP 2.3.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	14,20		
IKP 2.3.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	%	20		
SP 2.4	Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas				
IKP 2.4.1	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	predikat	BB		
IKP 2.4.2	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus			773,55	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	2.266		
IKK	Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.797		
IKK	Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.117		
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya				
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	37.469		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	90.894		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	71.637		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881		
5634; 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.093,36	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	10.000		
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.166,36	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	orang	20.000		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	orang	400		
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			560,13	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93		
023.03.06	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			6.050,60	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SP 3.1	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun				
IKP 3.1.1	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	66,49		
IKP 3.1.2	Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota	6		
IKP 3.1.3	Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi	6		
SP 3.2	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.2.1	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)	%	-		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 3.2.2	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	-		
SP 3.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	58,68		
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,20		
IKP 3.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
SP 3.4	Meningkatnya karakter peserta didik				
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKP 3.4.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	57,20		
SP 3.5	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.5.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	50		
IKP 3.5.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai	%	1,80		
IKP 3.5.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%	55		
IKP 3.5.4	Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95		
SP 3.6	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas				
IKP 3.6.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB	predikat	BB		
IKP 3.6.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	11		
4272	Penyediaan Layanan PAUD			358,60	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	7,48		
IKK	Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	103		
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	kab/kota	115		
IKK	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	-		
IKK	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3		
IKK	Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	20		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	25		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	80		
2003	Pembinaan Sekolah Dasar			1.122,75	Direktorat Sekolah Dasar
SK	Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	391		
IKK	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53		
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKK	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	62,50		
IKK	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,10		
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama			944,48	Direktorat Sekolah Menengah Pertama
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	317		
IKK	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKK	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	62,50		
IKK	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,20		
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas			514,67	Direktorat Sekolah Menengah Atas
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	219		
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	73,84		
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,10		
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus			698,16	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	9,65		
IKK	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKK	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	pemda	514		
IKK	Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	orang	94.500		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	98,93		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			350,26	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99		
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab/kota	300		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	69		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80	nilai	81		
IKK	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,20		
4273	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD			490,07	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas				
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%	35		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%	35		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%	35		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	80		
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan			1.571,61	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
SK	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan				
IKK	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>score card</i>) minimal 75	%	26,50		
IKK	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5		
IKK	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95		
023.18.15	Program Pendidikan Vokasi			7.790,28	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan				
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45		
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42		
IKP 4.1.3	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,80		
IKP 4.1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	53,98		
IKP 4.1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20		
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,10		
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri				
IKP 4.2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	2.600		
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian	%	2		
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	10		
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1		
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	%	5		
SP 4.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri				
IKP 4.3.1	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	300		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 4.3.2	Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	20		
IKP 4.3.3	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	1		
IKP 4.3.4	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	3		
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri				
IKP 4.4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	300		
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas				
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB		
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
4262, 4264	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri			2.808,30	
IKK	Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri	orang	2.160		
IKK	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	orang	440		
IKK	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	268		
IKK	Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana	sekolah	268		
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	65		
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	-		
IKK	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	101		
4263, 4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri			4.246,63	
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3.318		
IKK	Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	50		
IKK	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	50		
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	15		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	20		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	46		
IKK	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat	100		
IKK	Jumlah Institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH	lembaga	1		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	3		
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan			440,50	Direktorat Kursus dan Pelatihan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri				
IKK	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	100		
IKK	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200		
IKK	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	100		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			294,85	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	9		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93		
023.17.14	Program Pendidikan Tinggi			32.002,16	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SP 5.1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi				
IKP 5.1.1	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3		
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4		
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	14		
IKP 5.1.4	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	10		
IKP 5.1.5	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77		
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	30		
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	30		
IKP 5.1.8	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	5		
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan				
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	45,10		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	69		
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3	%	17,28		
SP 5.3	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas				
IKP 5.3.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB	predikat	BB		
IKP 5.3.2	Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
4258,4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan			3.334,72	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan
SK	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas				
IKK	Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	prodi	850		
IKK	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	prodi	20		
IKK	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100	prodi	600		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i>	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi	lembaga	40		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	lembaga	1.000		
SK	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas				
IKK	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	orang	200.000		
IKK	Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	orang	625		
IKK	Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	orang	3.000		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	51.500		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	orang	7.500		
IKK	Jumlah publikasi (artikel) internasional	artikel	17.916		
IKK	Jumlah sitasi di jurnal internasional	sitasi	42.821		
IKK	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	prototipe	136		
IKK	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	KI	972		
IKK	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	paten	7		
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya			2.411,72	Direktorat Sumber Daya
SK	Tersedianya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas				
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya	orang	6.034		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri	orang	1.515		
IKK	Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	orang	10.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	orang	3.070		
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi Akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>	orang	60		
SK	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>				
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya	lembaga	13		
IKK	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi	lembaga	4		
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi			26.255,72	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	5		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80		
023.15.12	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya			1.804,61	Direktorat Jenderal Kebudayaan
SP 6.1	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
IKP 6.1.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31		
IKP 6.1.2	Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	festival	9		
IKP 6.1.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	34,22		
SP 6.2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional				
IKP 6.2.1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	30		
IKP 6.2.2	Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	CB	-		
IKP 6.2.3	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	%	30		
IKP 6.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10,78		
SP 6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif				
IKP 6.3.1	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,94		
IKP 6.3.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,09		
IKP 6.3.3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	%	20		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 6.3.4	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	%	55		
SP 6.4	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan				
IKP 6.4.1	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	%	40		
IKP 6.4.2	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RPKD dan RPJMD	%	35		
IKP 6.4.3	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	%	20		
IKP 6.4.4	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	%	30		
SP 6.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas				
IKP 6.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B	predikat	B		
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK			254	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya takbenda				
IKK	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya takbenda	orang	400		
SK	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan				
IKK	Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	-		
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	satuan pendidikan	5.100		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah	satuan pendidikan	300		
SK	Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia				
IKK	Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia	event	20		
SK	Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan				
IKK	Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan	desa	539		
5179	Pelestarian Nilai Budaya			413,20	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam <i>platform</i> festival budaya tingkat nasional				
IKK	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam <i>platform</i> festival budaya tingkat nasional	festival	30		
5178	Pengelolaan Permuseuman				
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah kunjungan Cagar Budaya	orang	680.000		
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala				
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU				
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	4.135		
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	CB	-		
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru			163	Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru
SK	Meningkatnya jumlah pengunjung <i>Mega Events</i> Kebudayaan				
IKK	Jumlah pengunjung domestik <i>Mega Events</i> Kebudayaan	orang	450.000		
IKK	Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional	%	-		Galeri Nasional Indonesia (Unit Pelaksana Teknis)
IKK	Jumlah pengunjung internasional <i>Mega Events</i> Kebudayaan	orang	67.500		
SK	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses <i>platform</i> kerjasama distribusi film dan musik				
IKK	Jumlah orang yang mengakses <i>platform</i> kerjasama distribusi film dan musik	orang	1.000		
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru				
IKK	Jumlah produksi film, musik dan media baru	produksi	30		
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			10,10	Direktorat Pelindungan Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan				
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	150		
IKK	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	WBTB	200		
SK	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan				
IKK	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	izin	50		
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat			53,20	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah				
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	materi pelajaran	3		
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya				
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	orang	300		
IKK	Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	%	30		
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	wilayah adat	3		
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	komunitas adat	25		
SK	Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa				
IKK	Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa	orang	359		
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan			48	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan				
IKK	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	lembaga	140		
IKK	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	orang	1.620		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB	kab/kota	100		
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB	kab/kota	-		
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan			863,11	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
SK	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan				
IKK	Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	<i>event</i>	20		
IKK	Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	<i>pemda</i>	20		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	kab/kota	50		
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	10		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94		
023.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud			221,82	Inspektorat Jenderal
SP 7.1	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud				
IKP 7.1.1	Persentase Satker yang berintegritas	%	70		
IKP 7.1.2	Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	%	10		
IKP 7.1.3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85		
IKP 7.1.4	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud	skor	3,10		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 7.1.5	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
SP 7.2	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan				
IKP 7.2.1	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	%	20		
IKP 7.2.2	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	%	20		
SP 7.3	Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas				
IKP 7.3.1	Nilai kinerja Inspektorat Jenderal	nilai	94,40		
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I			20,64	Inspektorat I
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I	%	20		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I	%	20		
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I	%	70		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	nilai	3,10		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I	%	100		
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II			19,72	Inspektorat II
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	20		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	20		
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	70		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	nilai	3,10		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100		
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III			19,72	Inspektorat III
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	%	20		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	%	20		
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	70		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	skor	3,10		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100		
4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV			21,17	Inspektorat IV
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV				
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV	%	70		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	nilai	3,10		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	%	100		
1996	Penguatan Audit Investigasi			10,73	Inspektorat Investigasi
SK	Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
IKK	Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	%	20		
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85		
IKK	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	%	72		
IKK	Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	%	75		
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud			129,84	Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal				
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	65		
IKK	Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi	orang	1.149		
IKK	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A	predikat	A		
IKK	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal minimal 91	nilai	98		
IKK	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	nilai	92		
023.13.10	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra			516,16	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SP 8.1	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia				
IKP 8.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	%	42		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 8.1.2	Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik	%	26		
SP 8.2	Meningkatnya budaya literasi				
IKP 8.2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	indeks	58,20		
SP 8.3	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah				
IKP 8.3.1	Indeks daya hidup bahasa daerah	indeks	0,55		
SP 8.4	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional				
IKP 8.4.1	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	negara	30		
IKP 8.4.2	Jumlah pemelajar BIPA	orang	75.865		
SP 8.5	Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas				
IKP 8.5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB	predikat	BB		
IKP 8.5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2		
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			71,26	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
SK	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia				
IKK	Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	baterai	22		
IKK	Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	naskah	18		
IKK	Jumlah bahan ajar kebahasaan	naskah	89		
IKK	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	43		
SK	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia				
IKK	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	130.030		
SK	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan				
IKK	Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	lembaga	323		
IKK	Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	orang	993		
IKK	Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	bahan	50		
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra			42,07	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
SK	Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik				
IKK	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	3.589		
SK	Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca				
IKK	Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan	judul	100		
IKK	Jumlah buku pengayaan literasi	judul	711		
IKK	Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca	buku	120		
SK	Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	73.050		
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah			233,23	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah				
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	orang	17.000		
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	orang	17.000		
IKK	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	sastra	6		
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			169,60	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	5		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	nilai	91		
023.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud			935	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
SP 9.1	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum				
IKP 9.1.1	Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%	100		
SP 9.2	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional				
IKP 9.2.1	Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas	%	13		
IKP 9.2.2	Persentase pelaku perbukuan yang dibina	%	15		
SP 9.3	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran				
IKP 9.3.1	Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran	%	100		
IKP 9.3.2	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	%	5		
SP 9.4	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan				
IKP 9.4.1	Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global	publikasi	31		
IKP 9.4.2	Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah	laporan	33		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 9.4.3	Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan	%	17		
IKP 9.4.4	Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan	%	19		
SP 9.5	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi				
IKP 9.5.1	Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP	%	98		
IKP 9.5.2	Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP	%	38		
IKP 9.5.3	Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	dokumen	8		
SP 9.6	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar				
IKP 9.6.1	Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar	%	100		
IKP 9.6.2	Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar	%	-		
SP 9.7	Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas				
IKP 9.7.1	Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB	predikat	BB		
IKP 9.7.2	Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
2027	Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan			93,55	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
SK	Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun				
IKK	Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	model	9		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan	satuan pendidikan	50		
IKK	Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi	laporan penelitian	6		
SK	Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat				
IKK	Jumlah buku pendidikan yang disusun	judul buku	75		
IKK	Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar	judul buku	2.000		
IKK	Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi	lembaga	20		
IKK	Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi	orang	250		
IKK	Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam <i>database</i> sistem informasi	profesi pelaku perbukuan	2		
IKK	Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam <i>database</i> sistem informasi	buku	2.000		
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran			121,88	Pusat Asesmen dan Pembelajaran
SK	Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen	model pembelajaran	36		
IKK	Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran	mitra	50		
SK	Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan				
IKK	Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan	soal	67.280		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer	satuan pendidikan	89.000		
IKK	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran	%	5		
IKK	Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran	dokumen	7		
5632	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan			36,79	Pusat Penelitian Kebijakan
SK	Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	laporan penelitian	18		
IKK	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	laporan penelitian	18		
IKK	Jumlah hasil penjaminan mutu	dokumen	8		
5633	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi			169,67	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
SK	Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah hasil penelitian Arkeologi	laporan penelitian	104		
IKK	Jumlah rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi	rumah peradaban	22		
2031	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi			470,28	Badan Independen
SK	Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	satuan pendidikan	5.000		
SK	Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
IKK	Jumlah satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP	satuan pendidikan	5.000		
SK	Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (<i>learning outcome</i>) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	dokumen	8		
SK	Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP				
IKK	Jumlah peserta didik yang diukur kompetensinya	orang	8.424.500		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya	satuan pendidikan	-		
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud			42,82	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	3		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.80	nilai	90,80		

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	42,62		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	104,48		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	94,34		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	88,39		
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	34,56		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3,25		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	58,20		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	394		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	385		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	399		
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	48,30		
IKSS 2.8	Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25		
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	48,33		
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	18		
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	71,80		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	15		
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	15		
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	515		
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	50.000		
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	57,30		
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	73		
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	82		
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	81		
1	Program Dukungan Manajemen			3.219,29	Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas				
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB		
IKP 1.1.2	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	kategori	sangat baik		
IKP 1.1.4	Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN	%	85		
IKP 1.1.5	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	%	85		
IKP 1.1.6	Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	%	20		
IKP 1.1.7	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	indeks	84,50		
IKP 1.1.8	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	73		
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	%	20		
IKP 1.1.10	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	%	4,87		
IKP 1.1.11	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	68,75		
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud				
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	17		
IKP 1.2.2	Nilai PMPRB Kemendikbud	nilai	88		
SP 1.3	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional				
IKP 1.3.1	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	%	76,78		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKP 1.3.2	Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	%	50		
SP 1.4	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter				
IKP 1.4.1	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	15		
IKP 1.4.2	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	15		
SP 1.5	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan				
IKP 1.5.1	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	%	96,16		
SP 1.6	Meningkatnya kualitas film dan iklan film				
IKP 1.6.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	%	85		
SP 1.7	Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional				
IKP 1.7.1	Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	%	70		
SP 1.8	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud				
IKP 1.8.1	Persentase Satker yang berintegritas	%	75		
IKP 1.8.2	Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	%	20		
IKP 1.8.3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85		
IKP 1.8.4	Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud	skor	3,20		
SP 1.9	Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan				
IKP 1.9.1	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	%	35		
IKP 1.9.2	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	%	35		
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			4.664,24	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	13,53		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
SP 2.2	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	91,05		
IKP 2.2.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	%	89,20		
IKP 2.2.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	%	30		
IKP 2.2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	28,40		
IKP 2.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	%	40		
SP 2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
IKP 2.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	64,68		
IKP 2.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	58,20		
IKP 2.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
SP 2.4	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum				Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
IKP 2.4.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%	100		
SP 2.5	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional				Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
IKP 2.5.1	Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas	%	30		
IKP 2.5.2	Persentase pelaku perbukuan yang dibina	%	35		
SP 2.6	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran				Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
IKP 2.6.1	Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran	%	100		
IKP 2.6.2	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	%	50		
SP 2.7	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan				Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
IKP 2.7.1	Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global	publikasi	47		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKP 2.7.2	Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah	laporan	44		
IKP 2.7.3	Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan	%	36		
IKP 2.7.4	Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan	%	39		
SP 2.8	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi				Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
IKP 2.8.1	Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP	%	98		
IKP 2.8.2	Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP	%	55		
IKP 2.8.3	Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	dokumen	8		
SP 2.9	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar				Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
IKP 2.9.1	Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar	%	100		
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			23.265,62	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Sekretariat Jenderal
SP 3.1	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun				
IKP 3.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,71		
IKP 3.1.2	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	68,06		
IKP 3.1.3	Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota	56		
IKP 3.1.4	Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi	10		
SP 3.2	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.2.1	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)	%	5		
IKP 3.2.2	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	4.503		
SP 3.3	Meningkatnya karakter peserta didik				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKP 3.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	58,20		
SP 3.4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	60		
IKP 3.4.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai	%	15,86		
IKP 3.4.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%	60		
IKP 3.4.4	Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95		
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			8.023,99	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan				
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	48		
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	66,57		
IKP 4.1.3	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	49		
IKP 4.1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	55,49		
IKP 4.1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	54,15		
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	56,30		
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri				
IKP 4.2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	5.200		
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian	%	4		
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	15		
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1,30		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	%	8		
SP 4.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri				
IKP 4.3.1	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	600		
IKP 4.3.2	Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	30		
IKP 4.3.3	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	2		
IKP 4.3.4	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	4		
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri				
IKP 4.4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	400		
5	Program Pendidikan Tinggi			43.726,54	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Sekretariat Jenderal
SP 5.1	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi				
IKP 5.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,19		
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3		
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4		
IKP 5.1.4	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	17		
IKP 5.1.5	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	11		
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25		
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	33		
IKP 5.1.8	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	35		
IKP 5.1.9	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	8		
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan				
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	49,30		
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	71,80		
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3	%	17,96		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			2.390,40	Direktorat Jenderal Kebudayaan; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SP 6.1	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat				Direktorat Jenderal Kebudayaan
IKP 6.1.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31		
IKP 6.1.2	Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	festival	9		
IKP 6.1.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	36		
SP 6.2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional				Direktorat Jenderal Kebudayaan
IKP 6.2.1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	30		
IKP 6.2.2	Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	CB	-		
IKP 6.2.3	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	%	30		
IKP 6.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12		
SP 6.3	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif				Direktorat Jenderal Kebudayaan
IKP 6.3.1	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,96		
IKP 6.3.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,33		
IKP 6.3.3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan	%	30		
IKP 6.3.4	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	%	55,20		
SP 6.4	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan				Direktorat Jenderal Kebudayaan
IKP 6.4.1	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	%	42		
IKP 6.4.2	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD	%	40		
IKP 6.4.3	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	%	30		
IKP 6.4.4	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	%	50		
SP 6.5	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia				Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKP 6.5.1	Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	%	44		
IKP 6.5.2	Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik	%	35		
SP 6.6	Meningkatnya budaya literasi				Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKP 6.6.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	indeks	61,40		
SP 6.7	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah				Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKP 6.7.1	Indeks daya hidup bahasa daerah	indeks	0,56		
SP 6.8	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional				Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKP 6.8.1	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	negara	31		
IKP 6.8.2	Jumlah pemelajar BIPA	orang	80.865		
	Sekretariat Jenderal			30.788,64	
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja				Biro Perencanaan
SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud				
IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100		
IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	%	92,50		
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	kategori	Baik		
SK	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	item	2		
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	75		
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian <i>output</i>	%	74		
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	72		
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud				
IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	laporan	3		
IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	60		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	nilai	80		
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara				Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran				
IKK	Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	869		
IKK	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal	%	73		
IKK	Persentase penyelesaian kerugian negara	%	25		
IKK	Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91	%	95		
IKK	Persentase Satker yang capaian target PNBPN-nya $\geq$ 100%	%	90		
IKK	Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU	%	100		
IKK	Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A	%	75		
IKK	Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah	lembaga	5.000		
SK	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud				
IKK	Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100		
IKK	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	laporan	13		
IKK	Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A	%	85		
IKK	Jumlah laporan BMN yang disusun	laporan	9		
IKK	Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN	%	82		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN				
IKK	Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A	predikat	A		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91	nilai	92		
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara				Biro Sumber Daya Manusia
SK	Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud				
IKK	Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan	%	70		
IKK	Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu	%	80		
IKK	Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80	%	95		
IKK	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi	%	90		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud				
IKK	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	%	85		
IKK	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen	%	68		
IKK	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu	%	70		
IKK	Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja	%	87		
IKK	Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional	%	50		
IKK	Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi	%	77		
IKK	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai	%	83		
IKK	Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja	%	60		
IKK	Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK	%	82		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro SDM				
IKK	Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90	nilai	91		
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana				Biro Organisasi dan Tata Laksana
SK	Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal				
IKK	Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM)	satker	37		
IKK	Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9		
IKK	Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9		
SK	Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbud				
IKK	Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif	%	70		
IKK	Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud	%	60		
IKK	Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud	%	70		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Ortala				
IKK	Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91	nilai	92		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum				Biro Hukum
SK	Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi	%	100		
IKK	Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud	%	100		
IKK	Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun	%	100		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Hukum				
IKK	Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91	nilai	92		
1987, 4079	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara				Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
SK	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama				
IKK	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	75		
IKK	Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	orang	700		
IKK	Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri	%	75		
SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga				
IKK	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	%	82		
IKK	Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	koleksi	800		
IKK	Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat	laporan	179		
SK	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat				
IKK	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	%	83		
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama yang berkualitas di kawasan Asia Tenggara				
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	satuan pendidikan	32		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	penelitian	20		
IKK	Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	satuan pendidikan	20		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara	satuan pendidikan	150		
IKK	Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara	Orang	420		
IKK	Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara	orang	1.250		
IKK	Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara	orang	350		
IKK	Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan <i>parenting</i> yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara	lembaga	15		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat				
IKK	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86	nilai	88		
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa				Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah Satker yang melaksanakan PBJ melalui <i>e-procurement</i>	satker	207		
IKK	Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	%	20		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ				
IKK	Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91	nilai	92		
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan				Pusat Data dan Teknologi Informasi
SK	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Persentase belanja sekolah melalui <i>online marketplace</i> kecuali 3T	%	30		
IKK	Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital	orang	40.000		
IKK	Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan <i>platform toolkit</i> pembelajaran	orang	408.323		
IKK	Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui <i>platform</i> pencarian kerja <i>online</i>	orang	299.290		
IKK	Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran	%	70		
SK	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran				
IKK	Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	%	55,25		
IKK	Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data	%	82,25		
SK	Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK				
IKK	Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK	%	40		
IKK	Persentase <i>downtime</i> tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud	%	1,75		
IKK	Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud	%	15		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusdatin				
IKK	Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95	nilai	95		
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
SK	Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud				
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25	nilai	87,50		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25	nilai	86,80		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75	nilai	87		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60	nilai	87,90		
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50	nilai	80,01		
SK	Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas				
IKK	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35	%	87,60		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A	predikat	A		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A	predikat	A		
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A	predikat	A		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21	nilai	87,71		
4267	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik				Pusat Prestasi Nasional
SK	Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan				
IKK	Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	medali	238		
IKK	Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional	orang	310		
IKK	Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional	kompetisi	194		
IKK	Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang	satuan	200		
IKK	Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta	orang	60		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86	nilai	87		
4268	Kebijakan Penguatan Karakter				Pusat Penguatan Karakter
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
IKK	Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
IKK	Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	nilai	86		
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan				Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992		
IKK	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	1.102.587		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	321.024		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	86		
5173	Peningkatan Sensor Film				Lembaga Sensor Film
SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor				
IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	film	39.500		
SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri				
IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	orang	2.000		
SK	Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film				
IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat	BB		
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai	91		
	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan			3.701,20	
5636, 5637, 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus				Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	2.266		
IKK	Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.797		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.117		
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya				
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	37.469		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	90.894		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	71.637		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881		
5634; 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan				Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	20.000		
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan				Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	Orang	50.000		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	Orang	400		
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,20		
	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			6.232,10	
4272	Penyediaan Layanan PAUD				Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	8,65		
IKK	Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	154		
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	kab/kota	135		
IKK	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	626		
IKK	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3,25		
IKK	Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	40		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	35		
IKK	Persentase data pokok PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	90		
2003	Pembinaan Sekolah Dasar				Direktorat Sekolah Dasar
SK	Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	401		
IKK	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	1.172		
IKK	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	55		
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKK	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	65		
IKK	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,20		
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama				Direktorat Sekolah Menengah Pertama
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	327		
IKK	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	1.603		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	55		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKK	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	65		
IKK	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,90		
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas				Direktorat Sekolah Menengah Atas
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	229		
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	650		
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	55		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	76,06		
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95		
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus				Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	452		
IKK	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	14,08		
IKK	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan	pemda	514		
IKK	Jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan keaksaraan	orang	94.500		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	99,19		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah				Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99		
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab /kota	330		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	14		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	82		
IKK	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,40		
4273	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD				Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas				
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%	50		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%	50		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%	40		
IKK	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	90		
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan				Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
SK	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan				
IKK	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%	27,40		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5		
IKK	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,20		
	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi			8.023,99	
4262, 4264	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri				
IKK	Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> berstandar Industri	orang	2.160		
IKK	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	orang	440		
IKK	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	560		
IKK	Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana	sekolah	292		
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	65		
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	420		
IKK	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	152		
4263, 4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri				
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3.818		
IKK	Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	100		
IKK	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	50		
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	30		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	40		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	95		
IKK	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat	600		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH	lembaga	2		
IKK	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	4		
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan				Direktorat Kursus dan Pelatihan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri				
IKK	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200		
IKK	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200		
IKK	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	100		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi				Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	5		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,50		
	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi			32.962,22	
4258, 4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan				Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan
SK	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas				
IKK	Jumlah program studi relevan KKNi/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	prodi	2.000		
IKK	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	prodi	32		
IKK	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT <i>QS Rank 100</i>	prodi	700		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i>	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi	lembaga	45		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	lembaga	1.050		
SK	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas				
IKK	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	orang	220.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	orang	700		
IKK	Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	orang	3.300		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	143.523		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	orang	8.250		
IKK	Jumlah publikasi (artikel) internasional	artikel	21.226		
IKK	Jumlah sitasi di jurnal internasional	sitasi	47.056		
IKK	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	prototipe	178		
IKK	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	KI	1.182		
IKK	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	paten	10		
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya				Direktorat Sumber Daya
SK	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas				
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya	orang	9.463		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri	orang	1.790		
IKK	Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	orang	10.000		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	orang	3.090		
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>	orang	100		
SK	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>				
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya	lembaga	24		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya	lembaga	13		
IKK	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi	lembaga	4		
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi				Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	82		
	Direktorat Jenderal Kebudayaan			1.858,75	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK				Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda				
IKK	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda	orang	500		
SK	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan				
IKK	Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	-		
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	satuan pendidikan	5.200		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah	satuan pendidikan	944		
SK	Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia				
IKK	Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia	event	22		
SK	Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan				
IKK	Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan	desa	914		
5179	Pelestarian Nilai Budaya				Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam <i>platform</i> festival budaya tingkat nasional				
IKK	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam <i>platform</i> festival budaya tingkat nasional	festival	60		
5178	Pengelolaan Permuseuman				
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah				
IKK	Jumlah kunjungan Cagar Budaya	orang	700.000		
5181	Pelestarian dan pengelolaan Peninggalan Purbakala				
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU				
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	4.230		
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	CB			
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru				Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru
SK	Meningkatnya jumlah pengunjung <i>Mega Events</i> Kebudayaan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah pengunjung domestik <i>Mega Events</i> Kebudayaan	orang	500.000		
IKK	Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar Internasional	%			
IKK	Jumlah pengunjung internasional <i>Mega Events</i> Kebudayaan	orang	75.000		
SK	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses <i>platform</i> kerjasama distribusi film dan musik				
IKK	Jumlah orang yang mengakses <i>platform</i> kerjasama distribusi film dan musik	orang	2.000		
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru				
IKK	Jumlah produksi film, musik dan media baru	produksi	35		
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				Direktorat Perlindungan Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetapkan				
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	180		
IKK	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	WBTB	225		
SK	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan				
IKK	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	izin	60		
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat				Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah				
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	materi pelajaran	3		
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya				
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	orang	500		
IKK	Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	%	30		
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan				
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	wilayah adat	5		
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	komunitas adat	30		
SK	Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa	orang	370		
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan				Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan				
IKK	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	lembaga	230		
IKK	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	orang	3.600		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB	kab/kota	150		
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB	kab/kota	-		
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan				Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
SK	Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan				
IKK	Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah	event	20		
IKK	Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional	pemda	20		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD	kab/kota	50		
SK	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD				
IKK	Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD	kab/kota	50		
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94,60		
	Inspektorat Jenderal			228,47	
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I				Inspektorat I
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I	%	35		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I	%	35		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I	%	75		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	nilai	3,20		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I	%	100,00		
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II				Inspektorat II
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	35		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	35		
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	75		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	nilai	3,20		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100		
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III				Inspektorat III
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	%	35		
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	%	35		
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	75		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	skor	3,20		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV				Inspektorat IV
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV				
IKK	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV	%	75		
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	nilai	3,20		
IKK	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	%	100		
1996	Penguatan Audit Investigasi				Inspektorat Investigasi
SK	Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
IKK	Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan <i>fraud</i> /kecurangan	%	30		
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85		
IKK	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	%	74		
IKK	Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	%	80		
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud				Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal				
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	70		
IKK	Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi	orang	1.607		
IKK	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A	predikat	A		
IKK	Nilai kinerja Inspektorat Jenderal	nilai	95,10		
	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			531,65	
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra
SK	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia				
IKK	Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	baterai	27		
IKK	Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	naskah	25		
IKK	Jumlah bahan ajar kebahasaan	naskah	96		
IKK	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	32		
SK	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	147.522		
SK	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan				
IKK	Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	lembaga	435		
IKK	Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	orang	1.213		
IKK	Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	bahan	75		
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra				Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
SK	Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik				
IKK	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	3.977		
SK	Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca				
IKK	Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan	judul	125		
IKK	Jumlah buku pengayaan literasi	judul	786		
IKK	Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca	buku	180		
SK	Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina				
IKK	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	80.355		
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah				Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah				
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	orang	25.000		
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	orang	25.000		
IKK	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	sastra	10		
2020	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra				Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	nilai	92		
	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan			963,05	
2027	Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan				Pusat Kurikulum dan Perbukuan
SK	Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun				
IKK	Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	model kurikulum	9		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan	satuan pendidikan	200		
IKK	Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi	laporan penelitian	6		
SK	Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat				
IKK	Jumlah buku pendidikan yang disusun	judul buku	93		
IKK	Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar	judul buku	2.500		
IKK	Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi	lembaga	20		
IKK	Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi	orang	300		
IKK	Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam <i>database</i> sistem informasi	profesi pelaku perbukuan	2		
IKK	Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam <i>database</i> sistem informasi	buku	2.500		
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran				Pusat Asesmen dan Pembelajaran
SK	Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan				
IKK	Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen	model pembelajaran	72		
IKK	Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran	mitra	200		
SK	Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan				
IKK	Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan	soal	18.000		
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer	satuan pendidikan	137.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran	%	50		
IKK	Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran	dokumen	7		
5632	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan				Pusat Penelitian Kebijakan
SK	Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	laporan penelitian	20		
IKK	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	laporan penelitian	20		
IKK	Jumlah hasil penjaminan mutu	dokumen	8		
5633	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi				Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
SK	Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan				
IKK	Jumlah hasil Penelitian Arkeologi	laporan penelitian	105		
IKK	Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi	rumah peradaban	22		
2031	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi				Badan Independen
SK	Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
IKK	Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	satuan pendidikan	57.490		
SK	Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				
IKK	Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP	satuan pendidikan	44.767		
SK	Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (<i>learning outcome</i>) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan				
IKK	Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	dokumen	8		
SK	Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya	satuan pendidikan	271.523		
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud				Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.80	nilai	90,85		

C. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 - 2024

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang										
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	74,96	75,38	75,59	75,79					BPS
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,26	99,30	99,32	99,34					BPS
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	95,74	96,14	96,34	96,55					BPS
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	84,53	88,39	92,80	95,00					BPS
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63					BPS
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang										
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0,49	0,51	0,52	0,53					BAN PAUD
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum										Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
	a. Literasi	%	43,00	47,50	49,75	52,00					
	b. Numerasi	%	22,90	28,30	29,20	30,10					
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	27,50	30	32,50					Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	46,01	47,84	48,83	49,83					Laporan Evaluasi Ditjen GTK berdasarkan DAPODIK

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKSS 2.5	Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	%	5	5	5,50	6					Database Manajemen Talenta Kemendikbud
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	%	36,57	42,77	45	47,77					Sakernas, BPS
IKSS 2.7	Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	%	19,50	19,70	20	20,50					Dashboard IKU PDDIKTI (berdasarkan Tracer Study)
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan										
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	Indeks	57	69	75	81					Pangkalan Data UKBI
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	54,65	59,71	61,20	62,70					Ditjen Kebudayaan dan BPS
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan										
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya	74.908	82.500	86.500	90.500					PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 5 Gabungan Dikti & Diksi)
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel										
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP					Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud
IKSS 5.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	82,30	82	83	84					Survey Kepuasan pemangku kepentingan (SSS)

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A					Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87					Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbud
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun											
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah										
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75	%	63,42	63,81	64,20	64,59	6.268,85	6.582,29	6.911,40	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	BPS
4272	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini										
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas										
IKK 1.1.1.1	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Lembaga	-	105	108	110	6.268,85	6.582,29	6.911,40	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	APBN
IKP 1.2.1	Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun diatas 99%	%	76,85	77,82	78,40	76,85	34.375,77	36.094,56	37.899,29	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	BPS
2003	Pembinaan Sekolah Dasar										
SK	Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas										
IKK 1.2.1.1	Jumlah SD menerima program afirmasi	Lembaga	-	320	330	340	34.375,77	36.094,56	37.899,29	Direktorat Sekolah Dasar	APBN
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9904	0,9924	0,9934	0,9944	4.221.726,65	4.221.726,65	4.221.726,65	Sekretariat Jenderal	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar										
IKK 1.2.2.1	Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	4.221.726,65	4.221.726,65	4.221.726,65	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Dapodik, Sipintar
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah										
IKP 1.3.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun diatas 95%	%	66,73	68,48	68,68	69,26	43.373,69	45.542,38	47.819,50	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	BPS
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama										
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas										
IKK 1.3.1.1	Jumlah SMP menerima program afirmasi	Lembaga	-	490	500	510	43.373,69	45.542,38	47.819,50	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	APBN
IKP 1.3.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9392	0,9422	0,9437	0,9452	2.727.548,14	2.727.548,14	2.727.548,14	Sekretariat Jenderal	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat Dasar										
IKK 1.3.2.1	Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	2.727.548,14	2.727.548,14	2.727.548,14	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Dapodik, Sipintar
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah										
IKP 1.4.1	Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat diatas 95%	%	11,76	20,59	23,53	26,47	41.552,46	43.630,08	45.811,58	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	BPS
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas										

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas										
IKK 1.4.1.1	Jumlah SMA menerima program afirmasi	Lembaga	-	185	208	220	41.552,46	43.630,08	45.811,58	Direktorat Sekolah Menengah Atas	APBN
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus										
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas										
IKK 1.4.1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang menyediakan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus	%	-	90,08	92,02	94,36	806.361,27	850.242,35	907.087,84	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	APBN
IKP 1.4.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,77	0,79	0,80	0,81	2.920.301,21	2.920.301,21	2.926.215,21	Sekretariat Jenderal	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah										
IKK 1.4.2.1	Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.197.410	3.197.410	3.197.410	2.723.158,21	2.723.158,21	2.723.158,21	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Pusdatin, Sipintar
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri										
IKK 1.4.2.2	Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	13	13	13	13	197.143,00	197.143,00	203.057,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan Internal
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
SP	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan PAUDHI	%	9,73	29,19	38,92	48,64	21.880,83	28.445,07	36.978,59	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini										
SK	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas										
IKK 2.1.1.1	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	25,78	30,66	33,12	35,56	21.880,83	28.445,07	36.978,59	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Dapodik
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan										
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	Sekolah	-	9.100	14.100	19.100	100.464,13	130.603,37	169.784,38	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Database Sekolah Penggerak
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas										
IKK 2.2.1.1	Jumlah PAUD Penggerak	Lembaga	-	2.000	3.150	4.300	23.751,50	30.876,95	40.140,04	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Database Sekolah Penggerak
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar										
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah dasar yang berkualitas										
IKK 2.2.1.2	Jumlah SD Penggerak	Lembaga	-	4.156	6.479	8.802	35.083,90	45.609,07	59.291,79	Direktorat Sekolah Dasar	Database Sekolah Penggerak
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama										
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas										
IKK 2.2.1.3	Jumlah SMP Penggerak	Lembaga	-	1.779	2.750	3.721	15.163,62	19.712,70	25.626,51	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Database Sekolah Penggerak
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas										
IKK 2.2.1.4	Jumlah SMA Penggerak	Lembaga	-	980	1.458	1.936	18.925,11	24.602,64	21.983,44	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Database Sekolah Penggerak
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang berkualitas										
IKK 2.2.1.5	Jumlah SLB Penggerak	Lembaga	-	185	263	341	7.540,00	9.802,00	12.742,60	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Database Sekolah Penggerak
IKP 2.2.2	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	2,14	3,32	4,49	91.678,44	119.181,97	154.936,57	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini										
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas										
IKK 2.2.2.1	Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	0,98	1,54	2,11	27.431,68	35.661,18	46.359,53	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Dapodik yang diolah
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar										
SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah dasar yang berkualitas										
IKK 2.2.2.2	Persentase SD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	2,78	4,34	5,9	22.019,54	28.625,40	37.213,02	Direktorat Sekolah Dasar	Dapodik yang diolah
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama										
SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah pertama yang berkualitas										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.2.2.3	Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	4,31	6,67	9,02	21.792,00	28.329,60	36.828,48	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Dapodik yang diolah
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas										
SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas										
IKK 2.2.2.4	Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	7,01	10,43	13,85	10.435,23	13.565,80	17.635,53	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Dapodik yang diolah
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas										
IKK 2.2.2.5	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	8,23	11,7	15,18	10.000,00	13.000,00	16.900,00	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Dapodik yang diolah
IKP 2.2.3	Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum dan Pembelajaran	1.025	1.434	2.247	2.998	58.120,50	59.864,12	61.660,04	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Laporan Internal
6694	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran										
SK	Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran										
IKK 2.2.3.1	Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum	239	452	707	975	38.888,88	40.055,55	41.257,21	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Laporan Internal
SK	Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran										
IKK 2.2.3.2	Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Pembelajaran	786	982	1540	2023	19.231,62	19.808,57	20.402,83	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Laman Perangkat Pembelajaran Kemendikbudristek

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.2.4	Persentase satuan pendidikan yang terpetakan kompetensinya	%	-	95	96	97	131.131,59	135.065,80	139.118,04	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Database Helpdesk dan Proktor
2029	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan										
SK	Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan										
IKK 2.2.4.1	Jumlah butir soal terkalibrasi untuk asesmen yang berkualitas dan relevan	Soal	70392	18.000	18.000	18.000	17.383,11	17.904,60	18.441,74	Pusat Asesmen Pendidikan	Bank Soal
IKK 2.2.4.2	Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	Satuan Pendidikan	0	250.800	256.500	270.750	85.990,48	88.570,20	91.227,30	Pusat Asesmen Pendidikan	Database <i>Helpdesk</i> & Proktor,
IKK 2.2.4.3	Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	Rekomendasi Kebijakan	7	5	5	5	27.758,00	28.591,00	29.449,00	Pusat Asesmen Pendidikan	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
IKP 2.2.5	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran	Satuan Pendidikan	182	186	188	190	10.307,00	10.606,00	10.934,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara										
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan asia tenggara										
IKK 2.2.5.1	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ), gizi dan pangan di Kawasan Asia Tenggara	Satuan Pendidikan	180	184	186	188	3.995,00	4.115,00	4.238,00	SEAMEO SEAMOLEC SEAMEO RECFON	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan asia tenggara										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.2.5.2	Jumlah penelitian bidang Biologi Tropika yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	Penelitian	20	20	22	22	1.666,00	1.716,00	1.767,00	SEAMEO BIOTROP	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara										
IKK 2.2.5.3	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara	Orang	1.972	3.510	3.700	3.900	3.549,00	3.655,00	3.765,00	SEAMEO QITEP	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara										
IKK 2.2.5.4	Jumlah Lembaga yang dijadikan model pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keluarga di Kawasan Asia Tenggara	Lembaga	15	15	17	17	1.097,00	1.130,00	1.164,00	SEAMEO CECCEP	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran										
IKP 2.2.6	Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan <i>Platform Digital Pendidikan</i>	%	-	15,00	20,00	30,00	258.685,49	266.447,00	274.440,00	Sekretariat Jenderal	www.belajar.id
6394	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran										
SK	Meningkatnya jumlah pendidik dan peserta didik dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran										
IKK 2.2.6.1	Jumlah Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform digital	Orang	-	3.382.604	5.073.906	6.765.208	258.685,49	266.447,00	274.440,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	DIPA akhir 2021 dan awal 2022

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	%	-	25	50	75	3.344.961,43	3.428.924,87	3.651.964,81	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Profil dan Rapor Pendidikan
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini										
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas										
IKK 2.2.7.1	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	0,98	1,54	2,11	36.636,00	47.626,80	61.914,83	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Laporan Internal
IKK 2.2.7.2	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	9,54	10,21	10,88	12,23	128.625,00	171.500,00	343.000,00	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Dapodik yang diolah
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar										
SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah dasar yang berkualitas										
IKK 2.2.7.3	Persentase SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	2,78	4,34	5,90	30.788,72	40.025,34	52.032,94	Direktorat Sekolah Dasar	Laporan Internal
IKK 2.2.7.4	Persentase SD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	25,83	44,33	59,49	74,66	2.828.250,00	2.828.250,00	2.828.250,00	Direktorat Sekolah Dasar	Dapodik yang diolah
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama										
SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah pertama yang berkualitas										
IKK 2.2.7.5	Persentase SMP yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	4,31	6,67	9,02	32.646,83	42.440,88	55.173,14	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Laporan Internal

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.2.7.6	Persentase SMP yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	68,37	87,37	90,78	94,18	175.625,00	175.625,00	175.625,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Dapodik yang diolah
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas										
SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas										
IKK 2.2.7.7	Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	7,01	10,43	13,85	26.663,88	34.663,05	45.061,96	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Laporan Internal
IKK 2.2.7.8	Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	79,43	91,88	95,78	99,68	68.125,00	68.125,00	68.125,00	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Dapodik yang diolah
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas										
IKK 2.2.7.9	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	8,23	11,70	15,18	10.226,00	13.293,80	17.281,94	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Laporan Internal
IKK 2.2.7.10	Persentase SLB yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	11,88	13,90	13,90	13,90	7.375,00	7.375,00	5.500,00	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Dapodik yang diolah
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Masyarakat										
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.2.7.11	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,96	3,92	51.015,26	66.319,84	86.215,80	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	UPT Ditjen Pauddasmen
IKK 2.2.7.12	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25,00	30,00	35,00	60.385,42	78.501,04	102.051,35	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	UPT Ditjen Pauddasmen
SP	Terwujudnya Buku yang Berkualitas										
IKP 2.2.8	Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	449	2600	2860	3289	57.020,00	58.731,00	60.493,00	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Laporan Tahunan
6695	Pengembangan Perbukuan										
SK	Tersedianya Buku Pendidikan dan SDM yang Berkualitas										
IKK 2.2.8.1	Jumlah buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	1.952	2.550	2.805	3.226	51.434,00	52.977,02	54.566,33	Pusat Perbukuan	Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri
IKK 2.2.8.2	Jumlah buku umum pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	0	50	55	63	2.913,00	3.000,39	3.090,40	Pusat Perbukuan	Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri
IKK 2.2.8.3	Jumlah SDM perbukuan yang meningkat kompetensinya	Orang	250	432	732	942	2.673,00	2.753,19	2.835,79	Pusat Perbukuan	Laporan Internal
SP	Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan										
IKP 2.2.9	Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	%	22,22	57	65	74	31.093,30	32.026,09	32.986,88	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	JDIH, Laporan Evaluasi
6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan										
SK	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.2.9.1	Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	54	13	13	13	20.537,90	21.154,03	21.788,65	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Laporan Internal
IKK 2.2.9.2	Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	Rekomendasi Kebijakan		10	10	10	10.555,40	10.872,06	11.198,22	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Laporan BSNP
IKP 2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	%	68,93	74,83	79,69	83,13	235.765,33	242.838,29	250.123,43	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Surat Keputusan Hasil Akreditasi
2031	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi										
SK	Terlaksananya akreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)										
IKK 2.2.10.1	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	Lembaga	10.018	85.000	103.533	101.688	235.765,33	242.838,29	250.123,43	Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BAN S/M dan BAN PAUD PNF)	Surat Keputusan & Ringkasan Eksekutif Hasil Akreditasi
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter										
IKP 2.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	50	51	52	53	17.044,51	22.157,87	28.805,23	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar										
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Dasar										
IKK 2.3.1.1	Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	50	51	52	53	3.231,41	4.200,84	5.461,09	Direktorat Sekolah Dasar	Inventori data hasil AN
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama										
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Pertama										
IKK 2.3.1.2	Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	44	45	46	47	5.726,77	7.444,80	9.678,25	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Inventori data hasil AN

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas										
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Atas										
IKK 2.3.1.3	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	65	66	67	68	6.159,66	8.007,56	10.409,83	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Inventori data hasil AN
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Khusus										
IKK 2.3.1.4	Persentase lembaga pendidikan kesetaraan dan SLB yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	45	46	47	48	1.926,67	2.504,67	3.256,07	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Inventori data hasil AN
IKP 2.3.2	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan	%	-	40	65	100	16.440,00	16.933,00	17.441,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota
6393	Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan										
IKK 2.3.2.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	Provinsi/Kab/ Kota	-	219	356	548	16.440,00	16.933,00	17.441,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.3.3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	%	-	35	65	100	19.978,00	20.577,00	21.195,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota
6393	Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan										
IKK 2.3.3.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	Provinsi/Kab/ Kota	-	191	356	548	19.978,00	20.577,00	21.195,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota
IKP 2.3.4	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan	%	-	30	60	100	8.161,00	8.406,00	8.658,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota
6393	Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan										
IKK 2.3.4.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	Provinsi/Kab/ Kota	-	164	328	548	8.161,00	8.406,00	8.658,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota
SP	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
IKP 2.4.1	Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik	%	8,94	29,20	34,31	39,42	53.703,00	74.658,00	76.898,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal GTK

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional										
IKK 2.4.1.1	Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus baik	Provinsi	9	2	3	3	17.354,00	17.874,00	18.411,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan internal
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional										
IKK 2.4.1.2	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Dikmas baik	Kab/Kota	129	20	25	25	17.882,00	18.419,00	18.971,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan internal
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional										
IKK 2.4.1.3	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas baik	Kab/Kota	129	20	25	25	18.467,00	19.021,00	19.592,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Laporan internal
6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional										
IKK 2.4.1.4	Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Prov/Kab/Kota	-	-	28	28	-	19.344,00	19.924,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
IKP 2.4.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	%	46,01	47,84	48,83	49,83	1.476.650,00	1.520.949,00	1.566.570,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal GTK
6697	Pendidikan Profesi Guru										
SK	Meningkatnya guru yang profesional										
IKK 2.4.2.1	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	Orang	20.000	60.000	60.000	60.000	34.706,00	35.747,00	36.819,00	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Laporan internal

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan										
IKK 2.4.2.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	-	48.528	64.704	129.408	318.333,00	327.883,00	337.720,00	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
IKK 2.4.2.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	-	300.000	300.000	300.000	3.811,00	3.925,00	4.043,00	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
IKK 2.4.2.4	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	10.000	20.000	25.000	25.000	1.000.252,00	1.030.260,00	1.061.168,00	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional										
IKK 2.4.2.5	Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik	Orang	4.871	4.871	4.871	4.871	17.130,00	17.644,00	18.174,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan internal
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional										
IKK 2.4.2.6	Jumlah guru Dikdas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik	Orang	38.235	38.235	38.235	38.235	101.600,00	104.648,00	107.778,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.4.2.7	Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik	Orang	400	400	400	400	818,00	842,00	868,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
IKP 2.4.3	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	%	18,03	18,94	19,39	19,85	9.325.075,36	9.377.529,68	9.398.940,68	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal GTK
6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional										
IKK 2.4.3.1	Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	-	-	10.200	10.300	-	13.000,00	14.300,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
IKK 2.4.3.2	Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	-	-	250	5.000	-	1.498,00	9.363,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
IKK 2.4.3.3	Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	Orang	-	-	30	30	-	184,00	190,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
IKK 2.4.3.4	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	-	7.500	10.000	20.000	9.363,18	9.644,08	9.933,41	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan internal
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional										
IKK 2.4.3.5	Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	100	100	100	100	1.896,00	1.953,00	2.011,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan internal
IKK 2.4.3.6	Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang menerima penghargaan dan perlindungan	Orang	60	60	60	60	356,00	367,00	378,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan internal

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional										
IKK 2.4.3.7	Jumlah guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	2.842,00	2.927,00	3.015,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Laporan internal
IKK 2.4.3.8	Jumlah guru Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan	Orang	40	40	40	40	466,00	479,00	494,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Laporan internal
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional										
IKK 2.4.3.9	Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	1.300	1.300	1.300	1.300	1.739,00	1.791,00	1.845,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan internal
IKK 2.4.3.10	Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang menerima penghargaan dan perlindungan	Orang	70	70	70	70	465,00	479,00	493,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan internal
IKP 2.4.4	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu	%	99,43	99,75	99,81	99,87	8.446.851,76	9.354.851,68	9.366.851,68	Sekretariat Jenderal	Sistem Aplikasi Tunjangan
4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
IKK 2.4.4.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	311.577	355.500	346.262	341.599	8.446.851,76	9.354.851,68	9.366.851,68	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Sistem Aplikasi Tunjangan, Dapodik
SP	Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional										
IKP 2.5.1	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional	%	76,47	77,05	77,29	77,50	516.277,00	487.820,00	536.602,00	Sekretariat Jenderal	Database Manajemen Talenta

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik										
SK	Meningkatnya peserta didik yang meraih prestasi pada kompetisi di tingkat Internasional										
IKK 2.5.1.1	Jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem manajemen talenta	Orang	5.000	15.000	20.000	25.000	396.143,40	435.757,74	479.333,52	Pusat Prestasi Nasional	Database Manajemen Talenta
IKK 2.5.1.2	Jumlah peserta didik berprestasi di berbagai bidang pada semua jenjang pendidikan	Orang	100.000	300.000	400.000	500.000	120.133,00	311.605,00	342.766,00	Pusat Prestasi Nasional dan Unit Pelaksana Teknis (Badan Pengembangan Teknologi Informasi)	Database Manajemen Talenta
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi										
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98	335.528,00	345.594,00	355.962,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	PDDIKTI
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi										
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi										
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10	328.892,00	338.759,00	348.921,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (PTN)	SK Penerima UKT
SP	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKP 2.6.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33,57	39,18	42,18	46,18	1.907.162,00	1.968.301,00	2.031.150,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Sakernas
4262	Pembinaan SMK										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	33	36	40	24.517,00	25.252,00	26.010,00	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Dapodik, Laporan Internal
SK	Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.1.2	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	%	6	24	36	48	1.882.645,00	1.943.049,00	2.005.140,00	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Dapodik, Data Internal
IKP 2.6.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	31,15	44,37	47,37	50,37	1.555.406,00	1.605.187,00	1.656.361,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Sakernas, BPS
6700; 6701	Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV; Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PTV										
SK	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.2.1	Jumlah mahasiswa yang berkualifikasi akademik D1- D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus	Orang	15.000	8.000	8.500	8.500	12.064,00	12.426,00	12.798,00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
SK	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.6.2.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri	Orang	300	100	150	200	6.636,00	9.954,00	13.272,00	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
SK	Meningkatnya Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.2.3	Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	Prodi	-	825	950	1.075	9.500,00	9.785,00	10.079,00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
IKK 2.6.2.4	Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Prodi	113	120	125	130	1.678.218,00	1.728.564,00	1.780.421,00	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
IKP 2.6.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	46,74	53,37	56,69	60	100.818,00	460.342,00	548.472,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Laporan Internal Suslat & <i>Tracer Study</i>
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan										
SK	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.3.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	70.385	17.164	85.000	100.000	88.661,00	419.435,00	494.555,00	Direktorat Kursus dan Pelatihan	Dapodik, http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id , laporan pelaksanaan PKK dan PKW
SK	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.3.2	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	974	1.075	1.794	2.430	12.157,00	40.908,00	53.917,00	Direktorat Kursus dan Pelatihan	kursus.kemdikbud.go.id

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.6.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	12,31	50,00	55,00	60,00	263.385,43	299.153,23	308.929,05	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Dapodik, <i>Tracer Study</i> , Laporan Internal
4264; 4468	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri; Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi										
SK	Meningkatnya satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan DUDI										
IKK 2.6.4.1	Jumlah kemitraan dan penyelarasan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi	Kesepakatan	520	865	954	1.061	37.062,00	40.334,00	41.542,00	Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Dapodik, <i>Tracer Study</i> , Laporan Internal
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi										
IKK 2.6.4.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2.876	13.872	15.648	16.245	203.423,00	209.525,00	215.811,00	Balai Besar Vokasi	Laporan Internal
IKK 2.6.4.3	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	-	3.048	5.306	5.306	19.200,00	44.453,00	44.453,00	Balai Besar Vokasi	Laporan Internal
IKK 2.6.4.4	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	-	14	21	28	3.700,00	4.841,23	7.123,05	Balai Besar Vokasi	Laporan Internal
SP	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi										
IKP 4.1.3	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.270	2.506	2.611	2.722	309.709,00	323.742,00	338.432,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	PDDIKTI, Dashboard IKU-Diksi
6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV										
SK	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Vokasi										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 4.1.3.1	Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah	Judul	-	65	69	75	229.142,00	239.146,00	249.607,00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Kedaireka dan PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 6)
IKK 4.1.3.2	Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi	KI	304	132	162	174	5.000,00	5.250,00	5.513,00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Simlitabmas
SK	Meningkatnya kualitas hasil riset PT Vokasi										
IKK 4.1.3.3	Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional	Artikel	1.165	1.250	1.350	1.500	75.567,00	79.345,00	83.312,00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Sinta/Scopus/ Scimago
Program Pendidikan Tinggi											
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi										
IKP 1.5.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,28	0,292	0,297	0,302	11.156.316,63	14.949.590,35	19.221.448,02	Sekretariat Jenderal	Susenas, BPS
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi										
IKK 1.5.2.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	773.064	775.620	816.271	927.627	11.156.316,63	14.949.590,35	19.221.448,02	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Sistem Aplikasi KIP Kuliah
IKP 1.5.3	Persentase peningkatan mahasiswa di perguruan tinggi negeri akademik	%	-1,5	2	3	5	15.412.973,00	15.945.362,00	16.423.723,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	PDDIKTI (PTN Akademik semua jenjang)
4470; 4471	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi										
SK	Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau										
IKK 1.5.3.1	Persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10	12.943.445,00	13.331.748,00	13.731.701,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (PTN)	PDDIKTI

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 1.5.3.2	Persentase peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi	%	0.9	1,2	1,5	2	2.469.528,00	2.613.614,00	2.692.023,00	Direktorat Sumber Daya	Data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP)
SP	Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi										
IKP 2.7.1	Persentase mahasiswa yang berkegiatan Kampus Merdeka	%	3,3	20	25	30	45.248,00	46.605,00	48.004,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	PDDIKTI
4258	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan										
SK	Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas										
IKK 2.7.1.1	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program <i>flagship</i> Kampus Merdeka	Orang	2.300	3.075	3.150	3.250	15.000,00	15.450,00	15.914,00	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	PDDIKTI
IKK 2.7.1.2	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka yang diselenggarakan perguruan tingginya sendiri	Orang	120.641	5.200	5.350	5.500	30.248,00	31.155,00	32.090,00	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	PDDIKTI
IKP 2.7.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 <i>World Class University</i>	Lembaga	3	4	4	5	89.758,00	116.051,00	119.532,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	QS World Rank
4258; 4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Pengembangan Kelembagaan										
SK	Meningkatnya program studi yang berkualitas										
IKK 2.7.2.1	Persentase Prodi bekerjasama dengan mitra	%	20,37	35	40	50	40.105,00	41.309,00	42.548,00	Direktorat Kelembagaan	PDDIKTI
IKK 2.7.2.2	Persentase Prodi memenuhi standar atau akreditasi internasional	%	2,31	1,00	1,50	2,00	49.652,00	74.742,00	76.984,00	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	PDDIKTI
SP	Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan										
IKP 2.7.3	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus	%	22,05	22	24	25	243.000,00	255.290,00	262.949,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	PDDIKTI

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya										
SK	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas										
IKK 2.7.3.1	Persentase dosen berkegiatan di luar kampus	%	22,33	23,54	24,51	25,45	13.000,00	13.390,00	13.792,00	Direktorat Sumber Daya	PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
IKK 2.7.3.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	21,78	22,61	23,11	23,61	230.000,00	241.900,00	249.157,00	Direktorat Sumber Daya	PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
	a. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3	%	17,9	18,78	19,65	20	230.000,00	236.900,00	244.007,00	Direktorat Sumber Daya	PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
	b. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	1	1,53	1,94	2,36	0,00	5.000,00	5.150,00	Direktorat Sumber Daya	PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
	c. Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	3,2	3,92	4,34	4,75	0,00			Direktorat Sumber Daya	PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
SP	Meningkatnya riset, inovasi dan iptek dari PT akademik										
IKP 4.1.1	Jumlah keluaran penelitian PT Akademik yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	20.432	22.550	23.500	24.500	952.000,00	980.560,00	1.009.977,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 5 Dikti saja)
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri										
SK	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Akademik										
IKK 4.1.1.1	Jumlah prototipe dari riset keluaran PT Akademik	Prototipe	48	175	185	195	1.000,00	1.030,00	1.061,00	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Simlitabmas
IKK 4.1.1.2	Jumlah kemitraan yang terjalin antara PT Akademik dengan industri/pemerintah(<i>Matching Fund</i>)	Judul	1.237	430	460	500	950.000,00	978.500,00	1.007.855,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Kedaireka dan PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 6)

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 4.1.1.3	Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Akademik	KI	2.535	1.100	1.350	1.450	1.000,00	1.030,00	1.061,00	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Simlitabmas - DJKI
SP	Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT akademik										
IKP 4.1.2	Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional	Sitasi	17.017	45.000	50.000	54.000	1.202.000,00	1.988.060,00	2.047.702,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Sinta/Scopus/Scimago
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri										
SK	Meningkatnya kualitas hasil riset PT Akademik										
IKK 4.1.2.1	Jumlah hasil riset yang dikeluarkan oleh PT Akademik	Artikel	11.901	13.000	13.500	14.000	-	750.000,00	772.500,00	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sinta
IKK 4.1.2.2	Jumlah publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional	Artikel	23.291	25.000	27.000	30.000	1.202.000,00	1.238.060,00	1.275.202,00	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sinta/Scopus/Scimago
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan											
SP	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan										
IKP 3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	%	58	66	70	72	58.149,00	66.779,00	70.055,00	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra										
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra										
IKK 3.1.1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	70	273	374	477	11.566,00	12.153,00	12.771,00	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan										
IKK 3.1.1.2	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	Produk	60	210	310	410	16.565,00	22.749,00	23.431,00	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan Internal
IKK 3.1.1.3	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	41.833	105.657	108.932	112.309	30.019,00	31.878,00	33.852,00	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
IKP 3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	%	27,87	59,93	75,96	91,99	15.631,00	16.100,00	16.583,00	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa
SK	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan										
IKK 3.1.2.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	2.626	1.395	1.395	1.395	8.314,00	8.564,00	8.821,00	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
IKK 3.1.2.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	-	797	797	797	7.317,00	7.536,00	7.762,00	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
SP	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional										
IKP 3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	30	48	49	50	35.201,00	62.357,00	62.599,00	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Kegiatan BIPA
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan										
SK	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 3.1.3.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	91.146	141.045	166.045	191.045	14.345,00	14.776,00	15.219,00	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
SK	Tersedianya produk diplomasi bahasa										
IKK 3.1.3.2	Jumlah produk penerjemahan	Produk	76	3.178	2.473	2.349	20.856,00	47.582,00	47.380,00	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat										
IKP 3.2.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31	0,31	0,50	0,50	51.424,34	93.863,93	161.800,34	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Susenas MSBP
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan										
IKK 3.2.1.1	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	Orang	400	270	500	1000	7.170,00	19.200,00	39.500,00	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
SK	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan										
IKK 3.2.1.2	Jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan	Desa	30	100	150	300	22.000,00	42.550,00	87.000,00	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
5179	Pelestarian Nilai Budaya										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah									UPT BPNB	
IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah	Kegiatan	164	110	125	135	22.254,34	32.113,93	35.300,34	Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya	Laporan Internal
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional										
IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	44,93	55,76	58,86	61,62	115.737,79	191.708,29	217.250,60	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Laporan Internal
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan										
IKK 3.2.2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	Unit	328	225	260	280	2.200,00	2.250,00	2.275,00	Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Laporan Internal
4275;5172;5178;5179;5181	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan;Pengembangan Galeri Nasional;Pengelolaan Permuseuman;Pelestarian Nilai Budaya;Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala										
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi										
IKK 3.2.2.2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	6.013	4.553	4.558	4.462	109.636,68	177.137,70	207.898,24	1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya 3. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya	Laporan Internal
IKK 3.2.2.3	Jumlah Koleksi yang dilindungi	Unit	45.174	48.577	42.500	42.515	3.901,11	12.320,59	7.077,36	Unit Pelaksana Teknis Permuseuman dan Galeri Nasional	Laporan Internal

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024			
IKP 3.2.3	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,10	0,14	0,46	0,56	22.200,00	56.250,00	69.830,00	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Laporan Internal	
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan											
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan objek pemajuan kebudayaan											
IKK 3.2.3.1	Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan objek pemajuan kebudayaan	Lembaga	219	300	1000	1230	12.950,00	45.000,00	56.580,00	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal	
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat											
SK	Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan											
IKK 3.2.3.2	Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	Model	3	3	3	3	1.300,00	1.500,00	1.750,00	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Laporan Internal	
IKP 3.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10,78	12	12	15	72.585,82	168.147,20	88.729,61	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Susenas MSBP	
5172;5178; 5181	Pengembangan Galeri Nasional;Pengelolaan Permuseuman;Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala											
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya											
IKK 3.2.4.1	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Orang	680.000	967.132	1.132.591	1.268.206	70.485,82	162.492,20	80.143,61	1. Unit Pelaksana Teknis Permuseuman 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya 3. Galeri Nasional	Laporan Internal	

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan										
SK	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan										
IKK 3.2.4.2	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Lembaga	126	122	150	200	2.100,00	5.655,00	8.586,00	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Laporan Internal
IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	34,22	36	36	50	202.443,92	350.014,27	358.014,27	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Susenas MSBP
4274;4276	Pengembangan Film, Musik, dan Media;Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah <i>mega events</i> kebudayaan										
IKK 3.2.5.1	Jumlah <i>event</i> film dan musik Indonesia	Kegiatan/ <i>Event</i>	4	4	4	4	54.900,00	68.625,00	110.093,00	Direktorat Perfilman, Musik, dan Media	Laporan Internal
IKK 3.2.5.2	Jumlah <i>event</i> diplomasi berbasis Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan	Kegiatan/ <i>Event</i>	20	2	6	6	13.903,69	67.600,00	82.600,00	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
IKK 3.2.5.3	Jumlah <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/ <i>Event</i>	1	1	1	1	13.000,00	83.391,43	20.391,43	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Laporan Internal
4274	Pengembangan Film, Musik, dan Media										
SK	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia										
IKK 3.2.5.4	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Orang	1.000	3.000	4.000	5.000	4.725,00	7.500,00	8.875,00	Direktorat Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media										
IKK 3.2.5.5	Jumlah produksi film, musik, dan media	Layanan	30	40	45	50	107.950,00	118.950,00	131.950,00	Direktorat Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film										
SK	Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor										
IKK 3.2.5.6	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	38.500	40.500	41.000	41.500	3.055,23	4.582,84	6.874,26	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Internal
SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film										
IKK 3.2.5.7	Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	Orang	1.250	3.450	4.000	5.000	4.910,00	7.365,00	11.047,50	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Internal
SP	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif										
IKP 3.2.6	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,94	1,99	2,01	2,04	97.489,10	185.505,79	206.821,13	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Susenas MSBP
4277;5184	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat										
SK	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi										
IKK 3.2.6.1	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	1.184	5.580	7.750	10.000	36.324,00	56.845,00	72.050,00	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Laporan Internal
IKK.3.2.6.2	Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	300	550	500	750	2.988,00	2.500,00	3.000,00	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Laporan Internal
5179;4276	Pelestarian Nilai Budaya;Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola										
IKK 3.2.6.3	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	323	250	380	400	58.177,56	126.160,79	131.771,13	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya	Laporan Internal
IKP 3.2.7	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,09	22,58	22,82	23,06	23.225,00	26.250,00	30.000,00	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Susenas MSBP
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat										
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan										
IKK 3.2.7.1	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Desa	3	7	10	12	10.500	12.500	15.000	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Laporan Internal
SK	Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan										
IKK 3.2.7.2	Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	Lembaga	25	35	40	50	12.725,00	13.750,00	15.000,00	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Laporan Internal
SP	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah										
IKP 3.2.8	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	-	18,73	19,67	20,54	11.135,00	14.337,00	18.352,00	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Kegiatan Pelindungan Bahasa
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra										
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah										
IKK 3.2.8.1	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	-	47	53	61	1.774,00	1.827,00	2.510,00	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Laporan Internal

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 3.2.8.2	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	6.842	12.393	15.405	19.193	9.361,00	12.509,00	15.843,00	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
Program Dukungan Manajemen											
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas										
IKP 5.1.1	Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	42.330,00	43.600,00	44.909,00	Sekretariat Jenderal	Capaian kinerja Biro keuangan & BMN
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara										
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara										
IKK 5.1.1.1	Persentase Satker tertib pengelolaan anggaran	%	72,69	85	90	93	29.516,00	30.401,00	31.314,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan Monev Tindak Lanjut LHP, molk.kemdikbud.go.id, Laporan hasil penilaian kinerja satker BLU
IKK 5.1.1.2	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan perundang-undangan	Laporan	22	22	22	22	4.233,00	4.360,00	4.491,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan Keuangan Biro Keuangan dan BMN,
IKK 5.1.1.3	Persentase satker tertib pengelolaan BMN	%	72	85	90	95	8.581,00	8.839,00	9.104,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	simas.kemdikbud.go.id, SIMAN, kertas kerja penilaian BMN
IKP 5.1.2	Persentase Hasil reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel	%	100	100	100	100	4.965,64	5.114,61	5.268,05	Inspektorat Jenderal	Hasil Reviu LK
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I										
SK	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.1.2.1	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100	100	463,15	477,04	491,36	Inspektorat I	Hasil Reviu LK Inspektorat I
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II										
SK	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II										
IKK 5.1.2.2	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	%	100	100	100	100	16,00	16,48	16,97	Inspektorat II	Hasil Reviu LK Inspektorat II
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III										
SK	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III										
IKK 5.1.2.3	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III	%	100	100	100	100	978,80	1.008,16	1.038,41	Inspektorat III	Hasil Reviu LK Inspektorat III
4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV										
SK	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat IV										
IKK 5.1.2.4	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat IV	%	100	100	100	100	110,34	113,65	117,06	Inspektorat IV	Hasil Reviu LK Inspektorat IV
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kemendikbud										
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK										
IKK 5.1.2.5	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	65	70	75	80	3.397,35	3.499,27	3.604,25	Sekretariat Inspektorat Jenderal	

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 5.2.1	Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	Indeks	84,60	85	85	85	62.910,00	64.797,00	66.741,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Survei Kepuasan Stakeholder
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan										
SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga										
IKK 5.2.1.1	Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	%	92,40	84	86	88	60.250,00	120.000,00	125.000,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan Data Analisis Media Sosial, Hasil SSS
SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga										
IKK 5.2.1.2	Persentase kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	%	85	82	84	86	2.660,00	2.740,00	2.822,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Isian Instrumen Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
IKP 5.2.2	Persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh stakeholders terkait	%	0	77	79	81	32.720,00	110.778,00	114.101,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
SK	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama										
IKK 5.2.2.1	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	%	70	77	79	81	32.720,00	110.778,00	114.101,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan Mou & Kerja sama
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKP 5.2.3	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi	%	20	40	50	60	11.266,40	11.604,39	11.952,52	Inspektorat Jenderal	Laporan Hasil Pengawasan
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I										
IKK 5.2.3.1	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	%	20	40	50	60	1.296,77	1.335,67	1.375,74	Inspektorat I	Laporan hasil pengawasan Itjen
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II										
SK	Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II										
IKK 5.2.3.2	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	%	20	40	50	60	7.380,20	7.601,61	7.829,65	Inspektorat II	Laporan hasil pengawasan Itjen
4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV										
SK	Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat IV										
IKK 5.2.3.3	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat IV	%	20	40	50	60	2.589,43	2.667,11	2.747,12	Inspektorat IV	Laporan hasil pengawasan Itjen
IKP 5.3.1	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	40,33	70,16	85,10	100	9.781,00	16.104,00	16.587,00	Sekretariat Jenderal	Dapodik, Dapobud Dapobas, Operasional <i>Data store</i> Pusdatin
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya integritas data dan pendayagunaan data pokok pendidikan dan kebudayaan										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.3.1.1	Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	%	40,33	70,16	85,10	100	9.781,00	16.104,00	16.587,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Dapodik, Dapobud Dapobas, Operasional Data store Pusdatin
IKP 5.3.2	Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek	Level	Level 3	Level 4	Level 5	Level 5	7.722,00	7.954,00	8.192,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa										
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKK 5.3.2.1	Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek	%	38	75	88	100	7.722,00	7.954,00	8.192,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Evaluasi
IKP 5.3.3	Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	%	25	60	80	100	3.346,00	3.446,00	3.550,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa										
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKK 5.3.3.1	Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	Unit Kerja	86	206	274	343	3.346,00	3.446,00	3.550,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Evaluasi
IKP 5.3.4	Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal	Predikat	A	A	A	A	95.430,83	107.910,78	114.543,81	Sekretariat Jenderal	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1984	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
SK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024			
IKK 5.3.4.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	36	55	65	80	5.081,96	5.285,00	5.497,00	Biro Perencanaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan											
IKK 5.3.4.2	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	A	A	A	16.112,74	16.757,00	17.428,00	Biro Perencanaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum											
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Hukum											
IKK 5.3.4.3	Predikat SAKIP Biro Hukum minimal A	Predikat	BB	A	A	A	1.440,00	1.584,00	1.742,00	Biro Hukum	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara											
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN											
IKK 5.3.4.4	Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A	Predikat	A	A	A	A	2.014,00	2.074,00	2.136,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana											
SK	Meningkatnya tata kelola Organisasi dan Tata Laksana											
IKK 5.3.4.5	Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	504,45	529,67	556,15	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara											
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Sumber Daya Manusia											
IKK 5.3.4.6	Predikat SAKIP Biro Sumber Daya Manusia minimal A	Predikat	BB	A	A	A	972,00	1.002,00	1.032,00	Biro Sumber Daya Manusia	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa											

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ										
IKK 5.3.4.7	Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	12.660,00	13.040,00	15.431,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat										
IKK 5.3.4.8	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	37.256,00	38.373,00	39.524,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara										
SK	Meningkatnya tata kelola SEAMEO SEAMOLEC										
IKK 5.3.4.9	Predikat SAKIP SEAMEO SEAMOLEC minimal BB	Predikat	A	A	A	A	2.556,00	2.633,00	2.712,00	SEAMEO SEAMOLEC	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi										
IKK 5.3.4.10	Predikat SAKIP Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	7.987,00	15.025,00	16.528,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
IKK 5.3.4.11	Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal A	Predikat	A	A	A	AA	158,69	163,45	168,35	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter										
IKK 5.3.4.12	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	-	BB	A	A	1.080,00	1.112,00	1.146,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional										
IKK 5.3.4.13	Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	108,00	111,00	115,00	Pusat Prestasi Nasional	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan										
IKK 5.3.4.14	Predikat SAKIP Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	-	A	A	A	7.500,00	10.221,66	10.528,30	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.5	Predikat SAKIP Ditjen GTK	Predikat	A	A	A	A	69.150,00	71.505,00	73.453,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK										
IKK 5.3.5.1	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	67	83	92	100	69.150,00	71.505,00	73.453,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.6	Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Predikat	A	A	A	A	110.287,35	143.373,56	186.385,62	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan hasil evaluasi SAKIP
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen										
IKK 5.3.6.1	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	39	44	47	50	110.287,35	143.373,56	186.385,62	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A	135.034,21	135.034,21	135.034,21	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi										
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96	135.034,00	135.034,00	135.034,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.8	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Predikat	A	A	A	A	27.685,00	28.515,00	29.371,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
IKK 5.3.8.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	59	63	66	68	27.685,00	28.515,00	29.371,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.9	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	A	A	A	141.410,22	249.099,68	268.105,00	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan										
IKK 5.3.9.1	Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	54,30	62,50	70	80	141.410,22	249.099,68	268.105,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.10	Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Predikat	A	A	A	A	38.536,77	39.692,88	40.883,66	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan										
IKK 5.3.10.1	Persentase satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang memiliki predikat sakip minimal A	%	86	80	100	100	38.536,77	39.692,88	40.883,66	Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.11	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	4.446,00	4.579,00	4.716,00	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan hasil evaluasi SAKIP
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa										
IKK 5.3.11.1	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	69,70	75,75	78,80	81,80	4.446,00	4.579,00	4.716,00	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 5.3.12	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	A	A	A	A	13.332,70	13.732,68	14.144,66	Inspektorat Jenderal	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kemendikbud										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal										
IKK 5.3.12.1	Persentase Satker di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	100	100	100	100	13.332,70	13.732,68	14.144,66	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKK 5.3.12.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Inspektorat Jenderal minimal 93	Nilai	94,4	94,5	95	95,5	87.349,45	89.969,94	92.669,04	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Smart DJA
IKP 5.3.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	568.911,36	585.710,19	604.138,38	Sekretariat Jenderal	Smart DJA
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran										
IKK 5.3.13.1	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Nilai	90	92	93	94	6.018,04	6.259,00	6.509,00	Biro Perencanaan	SMART DJA
SK	Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek										
IKK 5.3.13.2	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	70	85	90	95	16.876,86	17.552,00	18.254,00	Biro Perencanaan	Aplikasi e-planning Kemendikbud, KRISNA Renja, dan SAKTI
SK	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan										
IKK 5.3.13.3	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	97,68	92	93	94	4.719,05	4.908,00	5.104,00		SMART DJA

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Hukum										
IKK 5.3.13.4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91	Nilai	91,00	93,00	94,00	95,00	5.924,00	6.517,00	7.169,00	Biro Hukum	SMART DJA
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN										
IKK 5.3.13.5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91	Nilai	99,69	93	94	95	12.914,00	13.302,00	13.701,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	SMART DJA
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana										
IKK 5.3.13.6	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal 91	Nilai	91	92	92	93	5.294,50	5.559,23	5.837,19	Biro Organisasi dan Tata Laksana	SMART DJA
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Sumber Daya Manusia										
IKK 5.3.13.7	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Sumber Daya Manusia minimal 93,75	Nilai	93,75	94	94,50	95	11.621,00	11.970,00	12.330,00	Biro Sumber Daya Manusia	SMART DJA
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.3.13.8	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90	Nilai	91	93	94	95	330.699,00	340.620,00	350.839,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	SMART DJA
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat										
IKK 5.3.13.9	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 88	Nilai	98,54	90	92	94	468,00	482,00	497,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	SMART DJA
4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara										
SK	Meningkatnya tata kelola SEAMEO SEAMOLEC										
IKK 5.3.13.10	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L SEAMEO SEAMOLEC minimal 88	Nilai	94,92	90	92	94	45.200,00	46.556,00	47.953,00	SEAMEO SEAMOLEC	SMART DJA
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi										
IKK 5.3.13.11	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal 89	Nilai	89	90	90	92	67.061,00	64.993,00	66.943,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	SMART DJA
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024			
IKK 5.3.13.12	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 91,82	Nilai	91,72	91,90	91,98	92,06	23.608,15	24.316,40	25.045,89	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	SMART DJA	
4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter											
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter											
IKK 5.3.13.13	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	85,00	90,45	90,80	91,15	10.627,00	10.946,00	11.274,00	Pusat Penguatan Karakter	SMART DJA	
4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik											
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional											
IKK 5.3.13.14	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86	Nilai	86,00	88,50	90,00	91,00	11.558,60	11.905,00	12.263,00	Pusat Prestasi Nasional	SMART DJA	
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan											
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan											
IKK 5.3.13.15	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	85,00	86,00	88,00	90,00	16.322,15	19.824,57	20.419,30	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	SMART DJA	
IKP 5.3.17	Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik	%	74	77,5	79	80	6.103,91	6.384,00	6.602,00	Sekretariat Jenderal	OMSPAN, SIM DAK, SPASIKITA	
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja											
SK	Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik											

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.3.17.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	85,90	88	89	90	6.103,91	6.384,00	6.602,00	Biro Perencanaan	OMSPAN, SIMDAK, SPASIKITA
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek						30.263,00	32.078,78	34.003,51		
IKP 5.4.1	Nilai PMPRB Kemendikbudristek	Nilai	87	89	90	91	1.555,80	1.633,59	1.715,28	Sekretariat Jenderal	Surat Menteri PAN RB tentang Hasil PMPRB
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara										
SK	Meningkatnya Indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbudristek										
IKK 5.4.1.1	Persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja minimal 110	%	-	35	40	45	7.542,00	7.768,00	8.002,00	Biro Sumber Daya Manusia	Nilai PPKP dari aplikasi e-SKP
IKK 5.4.1.2	Persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20 JP	%	-	60	75	90	3.227,00	3.323,00	3.423,00	Biro Sumber Daya Manusia	Data aplikasi HCDP, data pelaksanaan pengembangan pegawai
IKK 5.4.1.3	Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah sesuai pola karir Kemendikbudristek dan kebutuhan organisasi	%	-	55	70	85	4.413,00	4.546,00	4.682,00	Biro Sumber Daya Manusia	Laporan Internal
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana										
SK	Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbudristek										
IKK 5.4.1.4	Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang hasil evaluasi organisasinya efektif	%	90	95	95	100	7.076,89	7.430,73	7.802,27	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Laporan Internal
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum										
SK	Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.1.5	Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang telah diharmonisasi	%	100	100	100	100	6.501,00	7.151,00	7.866,00	Biro Hukum	Data usulan rancangan peraturan perundang-undangan
IKK 5.4.1.6	Persentase masalah hukum dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbudristek	%	100	100	100	100	3.580,00	3.938,00	4.332,00	Biro Hukum	Data laporan dan inventarisasi masalah hukum dan perkara
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
SK	Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbudristek melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbudristek										
IKK 5.4.1.7	Rerata nilai dampak pasca pelatihan minimal 89,79	Nilai	89,72	89,86	89,93	90	54.358,65	55.989,41	57.669,09	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Laporan Monev Pasca Pelatihan Dasar, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional
SK	Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas										
IKK 5.4.1.8	Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pelatihan Minimal 88,31	%	88,21	88,41	88,51	88,61	3.773,29	3.886,48	4.003,08	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Laporan Monev Pasca Pelatihan Dasar, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan										
IKK 5.4.1.9	Jumlah kumulatif SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran	Orang	663	750	1.250	1.500	3.210,00	6.378,00	6.569,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	https://jabfung.kemdikbud.go.id
SK	Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.1.10	Peningkatan Nilai indeks SPBE Kemendikbudristek	Indeks	3,40	3,50	3,60	3,70	33.454,00	66.587,00	68.584,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Hasil penilaian SPBE oleh Menpan RB
IKP 5.4.2	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	18	20	30	40	23.472,32	24.176,48	24.901,79	Inspektorat Jenderal	Keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I										
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I										
IKK 5.4.2.1	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	45	50	55	60	1.213,32	1.249,72	1.287,21	Inspektorat I	Keputusan Menteri PAN-RB
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II										
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II										
IKK 5.4.2.2	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	%	45	50	55	60	2.925,11	3.012,86	3.103,25	Inspektorat II	Keputusan Menteri PAN-RB
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III										
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III										
IKK 5.4.2.3	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	%	45	50	55	60	1.287,16	1.325,77	1.365,55	Inspektorat III	Keputusan Menteri PAN-RB
4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat IV										
IKK 5.4.2.4	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat IV	%	45	50	55	60	2.575,67	2.652,94	2.732,53	Inspektorat IV	Keputusan Menteri PAN-RB
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kemendikbud										
SK	Terwujudnya SDM pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan										
IKK 5.4.2.5	Jumlah SDM pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	Peserta	1.149	2.065	2.523	2.981	3.812,85	3.927,23	4.045,05	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Laporan hasil kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi
1996	Penguatan Audit Investigasi										
SK	Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN										
IKK 5.4.2.6	Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi <i>anti fraud</i>	%	10	40	50	60	1.079,42	1.111,81	1.145,16	Inspektorat Investigasi	Laporan hasil kegiatan pembinaan anti-fraud
IKK 5.4.2.7	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	85	87	90	90	10.578,79	10.896,15	11.223,04	Inspektorat Investigasi	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat
IKP 5.4.3	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	8	9	10	329.569,00	339.456,00	349.640,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Keputusan Menteri PAN-RB
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.3.1	Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	7	7	7	329.569,00	339.456,00	349.640,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
IKP 5.4.4	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	13	14	15	16	1.016.229,98	1.321.098,97	1.717.428,66	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Keputusan Menteri PAN-RB
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah										
SK	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen										
IKK 5.4.4.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	25	17	22	27	1.016.229,98	1.321.098,97	1.717.428,66	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
IKP 5.4.5	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46	2.331.770,00	2.401.723,00	2.473.775,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Keputusan Menteri PAN-RB
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi										
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30	2.331.770,00	2.401.723,00	2.473.775,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	-	7	8	9	11.327.805,00	11.667.639,00	12.017.668,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Keputusan Menteri PAN-RB

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
IKK 5.4.6.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	14	62	64	65	11.327.805,00	11.667.639,00	12.017.668,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
IKP 5.4.7	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	2	2	2	547.216,09	847.102,90	880.407,70	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Keputusan Menteri PAN-RB
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan										
IKK 5.4.7.1	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	10	10	10	547.216,09	847.102,90	880.407,70	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
IKP 5.4.8	Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	1	1	1	155.884,00	160.560,00	165.377,00	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Keputusan Menteri PAN-RB
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan										
IKK 5.4.8.1	Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	3	3	3	155.883,87	160.560,00	165.377,00	Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 5.4.9	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	2	3	4	15.116,22	15.569,71	16.036,80	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Keputusan Menteri PAN-RB
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa										
IKK 5.4.9.1	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	5	5	5	5	15.116,22	15.569,71	16.036,80	Sekretariat Badan Bahasa	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
SP	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek										
IKP 5.4.10	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek	Nilai	3,10	3,30	3,40	3,50	38.988,78	40.158,45	41.363,20	Inspektorat Jenderal	Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I										
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I										
IKK 5.4.10.1	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai	3,10	3,30	3,40	3,50	8.218,64	8.465,20	8.719,16	Inspektorat I	Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II										
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.10.2	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	Nilai	3,10	3,30	3,40	3,50	8.000,19	8.240,19	8.487,40	Inspektorat II	Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III										
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III										
IKK 5.4.10.3	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	Nilai	3,10	3,30	3,40	3,50	9.392,25	9.674,02	9.964,24	Inspektorat III	Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP
4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV										
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV										
IKK 5.4.10.4	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	Nilai	3,10	3,30	3,40	3,50	13.377,70	13.779,03	14.192,40	Inspektorat IV	Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 2. pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; 3. konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Unit Eselon I terkait	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Agama c. Kementerian Dalam Negeri d. Kementerian Keuangan	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		4. standar pendidikan; 5. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 6. konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); 7. kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).			
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	a. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi b. Kementerian Keuangan	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi b. Direktorat Jenderal	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		Pokok-pokok perubahan, antara lain: 1. undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; dan 4. hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan		Pendidikan Vokasi c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah d. Kementerian Agama e. Kementerian Dalam Negeri f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.			
4.	Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain: 1. perizinan perfilman; 2. tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak;	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Kebudayaan	a. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif b. Kementerian Komunikasi dan Informatika c. Lembaga Sensor Film d. Komisi Penyiaran Indonesia	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur mengenai: a. jenis dan tarif sensor film; b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan c. pendanaan: - apakah bersumber APBN dan/atau APBD; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan.			
5.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan	1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, secara eksplisit memastikan kembali bahwa mandat pendanaan pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlaksana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan Pusat Layanan Pmebiayaan Pendidikan)	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Agama c. Kementerian Dalam Negeri d. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		Kebijakan pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melakukan pengawasan secara teknis dari menteri sebagai bentuk kontrol pemerintah pusat terkait untuk menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimandatkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.		Manusia dan Kebudayaan e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
6.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	1. Bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. 2. Bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah. 4. Ruang lingkup pengaturan: a. rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan; b. sertifikasi pendidik; c. bobot muatan belajar; d. tugas tambahan; e. tunjangan profesi; f. penilaian kinerja;	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	a. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan d. Kementerian Keuangan	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		g. pemenuhan beban kerja sebagai guru; h. tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional; i. tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; j. maslahat tambahan; k. pengembangan dan peningkatan kompetensi guru; l. pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan m. perencanaan kebutuhan guru.			
7.	Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. 2. Mengakomodasikan berbagai perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang terkait dengan	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 3. Praksis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 4. Ruang lingkup pengaturan: a. mengubah syarat usia calon peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk pendidikan formal lainnya yang sederajat; b. penghapusan syarat hasil ujian nasional dan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10; c. semua ketentuan tentang pendidikan tinggi dan RSBI dihapus; d. kewajiban satuan pendidikan dalam penyediaan akses bagi		c. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan d. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan e. Kementerian Dalam Negeri f. Kementerian Agama g. Kementerian Keuangan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		peserta didik penyandang disabilitas.			
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian	1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. 2. Ruang lingkup pengaturan: a. jenis program studi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian merupakan program studi yang bersifat teknis dan spesifik serta tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian; b. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian diselenggarakan untuk memperkuat tugas dan	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	a. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan d. Kementerian Keuangan e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia f. Kementerian atau Lembaga Pemerintah	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian melalui pendidikan kedinasan untuk CPNS atau PNS instansi bersangkutan. Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan c. bentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian tidak dibatasi politeknik atau akademi, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.		Nonkementerian yang memiliki sekolah kedinasan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	1. Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai konsekuensi telah diprakarsainya perubahan pola pengelolaan universitas negeri dari Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 2. Mengatur bagaimana kemandirian tata kelola bidang akademik dan nonakademik yang akan dimiliki oleh universitas negeri setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 3. Melalui Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, pendidikan tinggi akan menjadi berkualitas, peran serta masyarakat terbuka lebar, dan adanya akses bagi yang tidak mampu. 4. Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan sistem pengelolaan antara lain: a. identitas; b. dasar, visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan;	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi b. Kementerian Keuangan	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dalam penetapan universitas-universitas negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan d. struktur pengelolaan universitas, pengelolaan aset, dan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.			
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, bahasa dan sastra daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat (diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek) berwenang, antara lain, menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2024
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tertentu Widyabasa	Widyabasa adalah jabatan fungsional tertentu yang sangat diperlukan dalam rangka menganalisis dan menyintesis masalah kebahasaan sebagai dampak	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		dari perpindahan para peneliti bahasa dan sastra ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Analisis dan sintesis yang tepat diperlukan sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.		dan Reformasi Birokrasi	
12.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Agar memuat ketentuan tentang kewajiban uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) bagi para tenaga profesional, khususnya tenaga profesional yang terlibat langsung dalam urusan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, seperti dosen, guru (pendidik), tenaga kependidikan, mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Agama c. Kementerian Ketenagakerjaan	Tahun 2023
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman	Amanat Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia				
14.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pendidikan Guru (Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru	Pengaturan mengenai pendidikan profesi guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebijakan saat ini sehingga perlu diganti.	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	a. Kementerian Agama b. Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2022
15.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat mengenai standar teknis pelayanan minimal sehingga perlu diganti.	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001